



Pemerintah Kabupaten
Purwakarta

PERUBAHAN RKPD 2024

Kabupaten Purwakarta

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2024 tentang
Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Purwakarta
Tahun 2024



**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 47 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024**



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan nasional dan daerah serta penyesuaian kemampuan riil keuangan daerah, maka RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
33. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
34. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 35);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);

39. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
40. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah;
5. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun;
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu dan berpedoman pada RKPD;
10. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya;
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran daerah yang memuat kerangka ekonomi daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2024 digunakan sebagai :

- a. pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2024;
- b. pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024;
- c. pedoman dalam penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2024.

Pasal 4

- (1) Isi dan uraian dokumen Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan
 - b. BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2024
 - c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - f. BAB VI Penutup

- (2) Isi dan uraian dokumen Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 26 Juli 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA,



Benni Irwan
BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 26 Juli 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,
NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 47

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

Nomor : 47

Tanggal : 26 Juli 2024

Tentang : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|--|----------------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR GAMBAR | iii |
| DAFTAR GRAFIK | iv |
| DAFTAR TABEL | v |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | I - 1 |
| 1.1. Latar Belakang | I - 1 |
| 1.2. Dasar Hukum Penyusunan | I - 3 |
| 1.3. Hubungan Antar Dokumen | I - 9 |
| 1.4. Maksud dan Tujuan | I - 11 |
| 1.5. Sistematika | I - 12 |
| | |
| BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024 | II - 1 |
| 2.1. Capaian Program Triwulan II Tahun 2024 | II - 2 |
| 2.2. Evaluasi RKPD Tahun 2024 terhadap RPD | II - 68 |
| 2.3. Permasalahan Pelaksanaan Program Triwulan II Tahun 2024 | II - 74 |
| | |
| BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH | III - 1 |
| 3.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan | III - 29 |
| 3.2. Kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 | III - 30 |
| 3.3. Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 | III - 33 |
| 3.4. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 | III - 36 |
| | |
| BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ... | IV - 1 |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan | IV - 1 |
| 4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional | IV - 1 |
| 4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat | IV - 8 |
| 4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Purwakarta | IV - 10 |
| 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan | IV - 15 |

| | |
|---|---------------|
| 4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional | IV - 15 |
| 4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat | IV - 28 |
| 4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Purwakarta | IV - 29 |
| BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH | V - 1 |
| Bab ini memuat rencana program kegiatan dan subkegiatan prioritas daerah yang disusun beserta pendanaanya | V - 1 |
| BAB VI PENUTUP | VI - 1 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|--------|
| Gambar 1.1 | Hubungan Antar Dokumen | I-10 |
| Gambar 3.1 | Data Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Purwakarta | III-18 |
| Gambar 4.1 | Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024 | IV-26 |
| Gambar 4.2 | Arah Kebijakan RKP Tahun 2024 | IV-27 |
| Gambar 4.3 | Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP Tahun 2024 | IV-27 |

DAFTAR GRAFIK

| | | |
|-------------|---|--------|
| Grafik 3.1 | Pertumbuhan Ekonomi | III-3 |
| Grafik 3.2 | Persandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Purwakarta dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Wilayah Perbatasan..... | III-4 |
| Grafik 3.3 | Inflasi Kabupaten Purwakarta..... | III-13 |
| Grafik 3.4 | Persandingan Inflasi Kabupaten Purwakarta (Kota Cirebon) dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat | III-14 |
| Grafik 3.5 | Tingkat Kemiskinan Kabupaten Purwakarta | III-15 |
| Grafik 3.6 | Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan Kabupaten Purwakarta..... | III-16 |
| Grafik 3.7 | Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purwakarta..... | III-19 |
| Grafik 3.8 | Persandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Wilayah Perbatasan | III-20 |
| Grafik 3.9 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta | III-22 |
| Grafik 3.10 | Persandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Purwakarta dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Wilayah Perbatasan..... | III-23 |
| Grafik 3.11 | Persandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kab. Purwakarta dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Wilayah Perbatasan | III-23 |
| Grafik 3.12 | Indeks Gini Kabupaten Purwakarta | III-24 |
| Grafik 3.13 | Persandingan Indeks Gini Kabupaten Purwakarta dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Wilayah Perbatasan..... | III-25 |
| Grafik 3.14 | Pendapatan Perkapita Kabupaten Purwakarta . | III-26 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|--------|
| Tabel 2.1 | Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 | II-3 |
| Tabel 2.2 | Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Indikator Program Tahun 2024 Triwulan 2 | II-64 |
| Tabel 2.3 | Rekap Capaian Kinerja dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan 2 per Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah | II-69 |
| Tabel 2.4 | Hasil Capaian SPM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Triwulan II | II-72 |
| Tabel 3.1 | Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023 | III-2 |
| Tabel 3.2 | Persandingan Pertumbuhsn Ekonomi Kabupaten Purwakarta dengan Nasional Provinsi dan Kab di wilayah perbatasan Tahun 2019 - 2023 | III-3 |
| Tabel 3.3 | Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2019 - 2023 | III-7 |
| Tabel 3.4 | Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Usaha), Tahun 2019-2023 | III-7 |
| Tabel 3.5 | Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019 - 2023 | III-8 |
| Tabel 3.6 | Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019- 2023 | III-8 |
| Tabel 3.7 | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab Purwakarta Tahun 2019 - 2023 | III-9 |
| Tabel 3.8 | Perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta dengan Kab./Kota di wilayah perbatasan Tahun 2019 - 2023 | III-10 |
| Tabel 3.9 | Inflasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 | III-12 |
| Tabel 3.10 | Persandingan Inflasi Kabupaten Purwakarta (Kota Cirebon) dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 - 2023 | III-14 |
| Tabel 3.11 | Tingkat Kemiskinan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 - 2023 | III-15 |

| | | |
|------------|--|--------|
| Tabel 3.12 | Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 - 2023 | III-16 |
| Tabel 3.13 | Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten di Wilayah Perbatasan Tahun 2019 - 2023 | III-16 |
| Tabel 3.14 | Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 - 2023 | III-19 |
| Tabel 3.15 | Persandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten di wilayah perbatasan Tahun 2019 - 2023 | III-20 |
| Tabel 3.16 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 - 2023 | III-22 |
| Tabel 3.17 | Persandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten di wilayah perbatasan Tahun 2019 - 2023 | III-22 |
| Tabel 3.18 | Capaian Indeks Gini / Gini Rasio Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2019 - 2023 | III-24 |
| Tabel 3.19 | Persandingan Indeks Gini / Gini Rasio Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten di wilayah perbatasan Tahun 2019 - 2024 | III-24 |
| Tabel 3.20 | Pendapatan Perkapita Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 - 2023 | III-26 |
| Tabel 3.21 | Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 | III-28 |
| Tabel 3.22 | Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2024 | III-32 |
| Tabel 3.23 | Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024 | III-35 |
| Tabel 3.24 | Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 | III-36 |
| Tabel 4.1 | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 | IV-12 |
| Tabel 4.2 | Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah | IV-36 |
| Tabel 4.3 | Keselarasn Pokok-pokok Pikiran DPRD dengan Prioritas Pembangunan Kab. Purwakarta Tahun 2024..... | IV-37 |

| | | |
|------------|---|-------|
| Tabel 4.4 | Keselaran Sasaran Pokok RPJPD Kab. Purwakarta Tahun 2005-2025 dengan RPD Kab. Purwakarta Tahun 2024-2026 | IV-38 |
| Tabel 4.5 | Keselaran Sasaran RPD Kab. Purwakarta Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Tahun 2020 – 2024 | IV-39 |
| Tabel 4.6 | Keselaran Sasaran RPD Kabupaten Purwakarta dengan dan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 | IV-41 |
| Tabel 4.7 | Keselaran Prioritas Pembangunan Kab. Purwakarta dengan Prioritas Nasional Tahun 2024 | IV-43 |
| Tabel 4.8 | Keselaran Arah Kebijakan dan Indikator Sasaran RKP Nasional dengan RKPD Kab. Purwakarta Tahun 2024 | IV-44 |
| Tabel 4.9 | Keselaran Indikator Sasaran Nasional dengan Indikator Sasaran Daerah Kab. Purwakarta Tahun 2024..... | IV-46 |
| Tabel 4.10 | Rekap Inovasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Urusan Pemerintahan di Kabupaten Purwakarta | IV-50 |
| Tabel 5.1 | Jumlah Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pagu Anggaran pada Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 | V-19 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. RKPD tersebut telah menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. Namun demikian memasuki pertengahan tahun berjalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta memandang perlu melakukan Perubahan RKPD Tahun 2024.

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan melakukan perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksudkan diatas, tidak terlepas dari amanat Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka terdapat beberapa hal kebijakan yang mendasari untuk melakukan perubahan RKPD Tahun 2024, yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 318/KU.01.03.07/BPKAD tanggal 12 Januari 2024 perihal Penyampaian Rincian Bagi Hasil Pajak Provisi dan Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada APBD Tahun Anggaran Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
3. Penyesuaian proyeksi target pendapatan daerah hasil analisis terhadap realisasi target sebelumnya selama kurun waktu semester I tahun 2024;
4. Penyesuaian proyeksi kebutuhan pagu anggaran belanja daerah pada masing-masing perangkat daerah, disesuaikan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah dan kemampuan riil keuangan daerah;
5. Penyesuaian target kinerja, lokasi sasaran, dan pagu anggaran pada subkegiatan yang akan dilaksanakan;
6. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan II Tahun 2024.

Proses penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan:

- a. penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- c. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- d. penetapan.

Dalam pelaksanaannya, proses perubahan ini melibatkan seluruh Perangkat Daerah, Kabupaten Purwakarta. Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) untuk tahun yang sama.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
21. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
38. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);

39. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 35);
40. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
41. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 88);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan acuan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Tahapan Penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, yang terdiri atas Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dituangkan secara detail di dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah, seperti digambarkan pada Gambar 1.1 berikut ini :

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun Tujuan disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara antara DPRD Kabupaten Purwakarta dengan Bupati Purwakarta yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan;
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Perubahan RKPD Tahun 2024, landasan hukum pelaksanaan Perubahan RKPD, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan Perubahan RKPD, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Memuat evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 pada Triwulan II, dan permasalahan pelaksanaan RKPD Tahun 2024.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat telaahan arah kebijakan pembangunan ekonomi Nasional dan Provinsi serta Kab. Purwakarta, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi Tahun 2024, serta arah kebijakan keuangan daerah terkait dengan kondisi pelaksanaan APBD Tahun 2024 sampai dengan pertengahan tahun ini.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional, Provinsi dan Kab. Purwakarta, serta prioritas pembangunan nasional, Provinsi, dan Kab. Purwakarta. Pada bagian ini dibahas juga keterkaitan pembangunan Kab. Purwakarta dengan pembangunan nasional dan Provinsi. Selain itu pada bab ini disajikan juga arah kebijakan pembangunan kewilayahan dan inovasi pembangunan dan perencanaan pembangunan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2023, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan. Secara rinci disajikan kegiatan tahun 2024, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB VI PENUTUP

Memuat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Perubahan RKPD Kab. Purwakarta Tahun 2024.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kab. Purwakarta Tahun 2024 pada triwulan II dilakukan guna mengetahui pencapaian hasil kinerja pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis sesuai dengan bidang urusan yang diampunya. Capaian kinerja urusan bidang pemerintahan tersebut terlihat pada capaian kinerja indikator program pada tiap bidang urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai tolok ukur dalam pencapaian kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Pada pelaksanaan RKPD tahun 2024 telah dilakukan proses Pergeseran APBD Tahun 2024 guna menindaklanjuti beberapa kebijakan pemerintah dan daerah yang harus dilaksanakan diantaranya yaitu :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 318/KU.01.03.07/BPKAD tanggal 12 Januari 2024 perihal Penyampaian Rincian Bagi Hasil Pajak Provisi dan Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada APBD Tahun Anggaran Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
3. Penyesuaian proyeksi target pendapatan daerah hasil analisis terhadap realisasi target sebelumnya selama kurun waktu semester I tahun 2024;
4. Penyesuaian proyeksi kebutuhan pagu anggaran belanja daerah pada masing-masing perangkat daerah, disesuaikan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah;
5. Penyesuaian target kinerja, lokasi sasaran, dan pagu anggaran pada subkegiatan yang akan dilaksanakan;
6. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan II Tahun 2024.

Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II ini masih belum menunjukkan hasil yang optimal terkait tingkat capaian kinerja program perangkat daerah beserta tingkat penyerapan atau realisasi pagu anggarannya. Realisasi capaian kinerja dan keuangan tersebut harus dievaluasi kembali agar pelaksanaan target capaian pembangunan dapat lebih optimal dan efektif serta efisien dalam pelaksanaannya. Selain itu juga pencapaian target realisasi kinerja pendapatan daerah sampai dengan semester I harus dievaluasi dan diproyeksi ulang sampai semester II, guna menjamin ketersediaan pagu anggaran dan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah yang dibutuhkan oleh perangkat daerah untuk pelaksanaan pembangunan.

2.1. Capaian Program Triwulan II Tahun 2024

Kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahan daerah, sejatinya dapat dilihat dari pencapaian target indikator program pada masing-masing bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis.

Adapun hasil capaian kinerja program pembangunan pada perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|---|---|---|----------|---|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH | | | | | 2.709.858.394.270 | | 1.013.013.265.627 | 47,76 | 37,38 | Kabupaten Purwakarta | SANGAT RENDAH |
| 1. | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 1.489.293.410.418 | | 531.328.370.078 | 63,10 | 35,68 | | |
| 2. | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 284.919.347.645 | | 105.555.319.167 | 40,22 | 37,05 | | |
| 3. | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | 30.541.475.063 | | 9.952.206.768 | 45,91 | 32,59 | | |
| 4. | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 165.619.559.078 | | 77.165.070.375 | 40,03 | 46,59 | | |
| 5. | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 570.561.543.411 | | 210.032.469.332 | 62,27 | 36,81 | | |
| 6. | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 31.335.945.006 | | 13.598.425.004 | 50,34 | 43,40 | | |
| 7. | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | 86.008.136.215 | | 33.001.212.728 | 48,11 | 38,37 | | |
| 8. | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | 51.578.977.434 | | 32.380.192.175 | 32,12 | 62,78 | | |
| 1.01.0.00.0.0 | DINAS PENDIDIKAN | | | | 714.756.181.859 | | 275.445.170.120 | 89,58 | 14,55 | Dinas Pendidikan | TINGGI |
| 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | 714.756.181.859 | | 275.445.170.120 | 89,58 | 14,55 | Dinas Pendidikan | |
| 1.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 482.984.573.659 | | 267.847.204.520 | 55,46 | | Dinas Pendidikan | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | | A | | 100,00 | | Dinas Pendidikan | SANGAT TINGGI |
| 1.01.02 | Program : Pengelolaan Pendidikan | | | | 230.819.038.200 | | 7.518.485.600 | 3,26 | | Dinas Pendidikan | |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | Persen | 74,29 | | 60,42 | | 81,33 | | Dinas Pendidikan | TINGGI |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | Persen | 99,50 | | 99,61 | | 100,11 | | Dinas Pendidikan | MELAMPAUI |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | Persen | 94,33 | | 84,27 | | 89,34 | | Dinas Pendidikan | TINGGI |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Persen | 0,54 | | 12,02 | | 4,49 | | Dinas Pendidikan | SANGAT RENDAH |
| | | Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi | Persen | 100,00 | | 99,37 | | 99,37 | | Dinas Pendidikan | SANGAT TINGGI |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|------|--|---|--------|---|----|--|----|--|----|------------------|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | dalam pendidikan dasar | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Persen | 0,50 | | 12,02 | | 4,16 | | Dinas Pendidikan | SANGAT RENDAH |
| | | Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional | Persen | 1,75 | | 2,25 | | 128,57 | | Dinas Pendidikan | MELAMPAUI |
| | | Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | Persen | 100,00 | | 60,42 | | 60,42 | | Dinas Pendidikan | RENDAH |
| | | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Persen | 100,00 | | 60,42 | | 60,42 | | Dinas Pendidikan | RENDAH |
| | | Angka partisipasi kasar | Persen | 24,30 | | 60,42 | | 248,64 | | Dinas Pendidikan | MELAMPAUI |
| | | Angka pendidikan yang ditamatkan | Persen | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | Dinas Pendidikan | SANGAT TINGGI |
| | | Angka Partisipasi Murni | Persen | 22,80 | | 60,42 | | 265,00 | | Dinas Pendidikan | MELAMPAUI |
| | | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | Persen | 99,61 | | 99,61 | | 100,00 | | Dinas Pendidikan | SANGAT TINGGI |
| | | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | Persen | 84,00 | | 84,27 | | 100,32 | | Dinas Pendidikan | MELAMPAUI |
| | | Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A | Persen | 99,50 | | 99,61 | | 100,11 | | Dinas Pendidikan | MELAMPAUI |
| | | Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B | Persen | 94,30 | | 84,27 | | 89,36 | | Dinas Pendidikan | TINGGI |
| | | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | Persen | 0,50 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Pendidikan | SANGAT RENDAH |
| | | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | Persen | 5,70 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Pendidikan | SANGAT RENDAH |
| | | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | Persen | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | Dinas Pendidikan | SANGAT TINGGI |
| | | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | Persen | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | Dinas Pendidikan | SANGAT TINGGI |
| | | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | Persen | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | Dinas Pendidikan | SANGAT TINGGI |
| | | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | Persen | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | Dinas Pendidikan | SANGAT TINGGI |
| | | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | Persen | 24,19 | | 24,19 | | 100,00 | | Dinas Pendidikan | SANGAT TINGGI |
| | | Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik | Persen | 44,88 | | 44,88 | | 100,00 | | Dinas Pendidikan | SANGAT TINGGI |
| | | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar | Persen | 41,55 | | 41,55 | | 100,00 | | Dinas Pendidikan | SANGAT TINGGI |
| | | Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar | Persen | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | Dinas Pendidikan | SANGAT TINGGI |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|----------------|--|---|--------|---|--------------------|--|-------------------|--|--------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki | Persen | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | Dinas Pendidikan | SANGAT TINGGI |
| | | Penduduk yang berusia lebih dari 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) | Persen | 100,00 | | 98,13 | | 98,13 | | Dinas Pendidikan | SANGAT TINGGI |
| | | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS) | % | 59,10 | | 60,42 | | 102,24 | | Dinas Pendidikan | MELAMPAUI |
| | | Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | % | 98,86 | | 99,61 | | 100,76 | | Dinas Pendidikan | MELAMPAUI |
| | | Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS) | % | 7,93 | | 12,02 | | 151,58 | | Dinas Pendidikan | MELAMPAUI |
| | | Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional | nilai | 52,54 | | 79,15 | | 150,65 | | Dinas Pendidikan | MELAMPAUI |
| | | Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen Nasional | nilai | 40,77 | | 73,34 | | 179,87 | | Dinas Pendidikan | MELAMPAUI |
| | | Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | nilai | 60,83 | | 70,98 | | 116,70 | | Dinas Pendidikan | MELAMPAUI |
| | | Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | nilai | 53,33 | | 67,78 | | 127,09 | | Dinas Pendidikan | MELAMPAUI |
| | | Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B | % | 43,50 | | 40,67 | | 93,49 | | Dinas Pendidikan | SANGAT TINGGI |
| | | Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1 | % | 21,63 | | 67,10 | | 310,25 | | Dinas Pendidikan | MELAMPAUI |
| | | Indeks Iklim Keamanan SD | nilai | 81,68 | | 78,59 | | 96,22 | | Dinas Pendidikan | SANGAT TINGGI |
| | | Indeks Iklim Kebinekaan SD | nilai | 79,27 | | 74,57 | | 94,07 | | Dinas Pendidikan | SANGAT TINGGI |
| | | Indeks Inklusivitas SD | nilai | 75,66 | | 59,99 | | 79,29 | | Dinas Pendidikan | TINGGI |
| | | Indeks Iklim Keamanan SMP | nilai | 78,41 | | 71,76 | | 91,52 | | Dinas Pendidikan | SANGAT TINGGI |
| | | Indeks Iklim Kebinekaan SMP | nilai | 69,95 | | 73,15 | | 104,57 | | Dinas Pendidikan | MELAMPAUI |
| | | Indeks Inklusivitas SMP | nilai | 70,31 | | 57,43 | | 81,69 | | Dinas Pendidikan | TINGGI |
| 1.01.03 | Program : Pengembangan Kurikulum | | | | 346.000.000 | | 71.000.000 | | 20,52 | Dinas Pendidikan | |
| | | Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Pendidikan | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang ditetapkan | Persen | 100,00 | | 48,63 | | 48,63 | | Dinas Pendidikan | SANGAT RENDAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|----------------------------|---|--|----------|---|-----------------|--|----------------|--|-------|------------------|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.01.04 | Program : Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | | | | 200.000.000 | | 0 | | 0,00 | Dinas Pendidikan | |
| | | Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar | Persen | 38,77 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Pendidikan | SANGAT RENDAH |
| | | Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar | Persen | 41,80 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Pendidikan | SANGAT RENDAH |
| | | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | Persen | 96,06 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Pendidikan | SANGAT RENDAH |
| 1.01.05 | Program : Pengendalian Perizinan Pendidikan | | | | 99.320.000 | | 7.780.000 | | 7,83 | Dinas Pendidikan | |
| | | Persentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Pendidikan | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Pendidikan | SANGAT RENDAH |
| 1.01.06 | Program : Pengembangan Bahasa Dan Sastra | | | | 307.250.000 | | 700.000 | | 0,23 | Dinas Pendidikan | |
| | | Persentase karya bahasa dan sastra yang dikembangkan | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Pendidikan | SANGAT RENDAH |
| 1.02.0.00.0.0 0.01.0000 | DINAS KESEHATAN | | | | 237.686.073.189 | | 45.645.114.136 | 67,65 | 21,34 | Dinas Kesehatan | SEDANG |
| 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | 237.686.073.189 | | 45.645.114.136 | 67,65 | 21,34 | Dinas Kesehatan | |
| 1.02.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 109.544.610.449 | | 35.211.795.675 | | 32,14 | Dinas Kesehatan | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | | BB | | 88,89 | | Dinas Kesehatan | TINGGI |
| 1.02.02 | Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | 114.025.181.740 | | 4.281.919.081 | | 3,76 | Dinas Kesehatan | |
| | | Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi | Persen | 50,00 | | 100,00 | | 200,00 | | Dinas Kesehatan | MELAMPAUI |
| | | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | Persen | 100,00 | | 34,19 | | 34,19 | | Dinas Kesehatan | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | Persen | 100,00 | | 36,53 | | 36,53 | | Dinas Kesehatan | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Persen | 100,00 | | 38,45 | | 38,45 | | Dinas Kesehatan | SANGAT RENDAH |
| | | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | Persen | 100,00 | | 32,95 | | 32,95 | | Dinas Kesehatan | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 100,00 | | 60,89 | | 60,89 | | Dinas Kesehatan | RENDAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|------|--|---|--------|---|----|--|----|--|----|------------------|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Persen | 100,00 | | 38,02 | | 38,02 | | Dinas Kesehatan | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Persen | 100,00 | | 35,80 | | 35,80 | | Dinas Kesehatan | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 80,00 | | 45,95 | | 57,44 | | Dinas Kesehatan | RENDAH |
| | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 100,00 | | 41,89 | | 41,89 | | Dinas Kesehatan | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | Persen | 100,00 | | 67,83 | | 67,83 | | Dinas Kesehatan | SEDANG |
| | | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | Persen | 95,00 | | 58,62 | | 61,71 | | Dinas Kesehatan | RENDAH |
| | | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | Persen | 80,00 | | 39,30 | | 49,13 | | Dinas Kesehatan | SANGAT RENDAH |
| | | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 100,00 | | 34,19 | | 34,19 | | Dinas Kesehatan | SANGAT RENDAH |
| | | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 100,00 | | 36,53 | | 36,53 | | Dinas Kesehatan | SANGAT RENDAH |
| | | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 100,00 | | 38,45 | | 38,45 | | Dinas Kesehatan | SANGAT RENDAH |
| | | Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 100,00 | | 32,95 | | 32,95 | | Dinas Kesehatan | SANGAT RENDAH |
| | | Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 100,00 | | 60,89 | | 60,89 | | Dinas Kesehatan | RENDAH |
| | | Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 100,00 | | 41,08 | | 41,08 | | Dinas Kesehatan | SANGAT RENDAH |
| | | Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 100,00 | | 49,20 | | 49,20 | | Dinas Kesehatan | SANGAT RENDAH |
| | | Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 100,00 | | 45,95 | | 45,95 | | Dinas Kesehatan | SANGAT RENDAH |
| | | Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 100,00 | | 41,89 | | 41,89 | | Dinas Kesehatan | SANGAT RENDAH |
| | | Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 100,00 | | 67,83 | | 67,83 | | Dinas Kesehatan | SEDANG |
| | | Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang | Persen | 95,00 | | 58,62 | | 61,71 | | Dinas Kesehatan | RENDAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|------|--|---|--------|---|----|--|----|--|----|------------------|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 80,00 | | 52,00 | | 65,00 | | Dinas Kesehatan | RENDAH |
| | | Rasio posyandu per satuan balita | Poin | 17,34 | | 14,83 | | 85,52 | | Dinas Kesehatan | TINGGI |
| | | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | Persen | 100,00 | | 40,66 | | 40,66 | | Dinas Kesehatan | SANGAT RENDAH |
| | | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | Persen | 100,00 | | 37,01 | | 37,01 | | Dinas Kesehatan | SANGAT RENDAH |
| | | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | Persen | 100,00 | | 15,62 | | 15,62 | | Dinas Kesehatan | SANGAT RENDAH |
| | | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | Persen | 100,00 | | 88,89 | | 88,89 | | Dinas Kesehatan | TINGGI |
| | | Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak | Persen | 100,00 | | 35,12 | | 35,12 | | Dinas Kesehatan | SANGAT RENDAH |
| | | Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kesehatan | SANGAT RENDAH |
| | | Cakupan balita pneumonia yang ditangani | Persen | 70,00 | | 37,57 | | 53,67 | | Dinas Kesehatan | RENDAH |
| | | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | Persen | 90,00 | | 56,52 | | 62,80 | | Dinas Kesehatan | RENDAH |
| | | Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | Poin | 245,65 | | 58,74 | | 23,91 | | Dinas Kesehatan | SANGAT RENDAH |
| | | Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | Poin | 2,58 | | 2,47 | | 104,45 | | Dinas Kesehatan | MELAMPAUI |
| | | Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS | Persen | 90,00 | | 69,83 | | 77,59 | | Dinas Kesehatan | TINGGI |
| | | Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS | Persen | 90,00 | | 75,45 | | 83,83 | | Dinas Kesehatan | TINGGI |
| | | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | Persen | 100,00 | | 83,86 | | 83,86 | | Dinas Kesehatan | TINGGI |
| | | Penderita diare yang ditangani | Persen | 85,00 | | 36,49 | | 42,93 | | Dinas Kesehatan | SANGAT RENDAH |
| | | Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir | Rasio | 100,00 | | 25,00 | | 25,00 | | Dinas Kesehatan | SANGAT RENDAH |
| | | Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki | Persen | 80,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kesehatan | SANGAT |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|------------------------------------|--|--|--------|---|------------------------|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS | | | | | | | | | RENDAH |
| | | Cakupan kunjungan bayi | Persen | 100,00 | | 43,56 | | 43,56 | | Dinas Kesehatan | SANGAT RENDAH |
| | | Cakupan puskesmas | Persen | 100,00 | | 117,65 | | 117,65 | | Dinas Kesehatan | MELAMPAUI |
| | | Cakupan pelayanan nifas | Persen | 100,00 | | 36,53 | | 36,53 | | Dinas Kesehatan | SANGAT RENDAH |
| | | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani | Persen | 100,00 | | 30,10 | | 30,10 | | Dinas Kesehatan | SANGAT RENDAH |
| | | Cakupan pelayanan anak balita | Persen | 100,00 | | 32,95 | | 32,95 | | Dinas Kesehatan | SANGAT RENDAH |
| | | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) | Persen | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | Dinas Kesehatan | SANGAT TINGGI |
| 1.02.03 | Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | 13.064.577.000 | | 6.009.524.380 | | 46,00 | Dinas Kesehatan | |
| | | Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan | Persen | 30,00 | | 75,00 | | 250,00 | | Dinas Kesehatan | MELAMPAUI |
| | | Persentase Ijin Praktik Tenaga Kesehatan yang diterbitkan | Persen | 30,00 | | 65,40 | | 218,00 | | Dinas Kesehatan | MELAMPAUI |
| | | Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar | Persen | 30,00 | | 48,78 | | 162,60 | | Dinas Kesehatan | MELAMPAUI |
| | | Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan | Persen | 30,00 | | 71,86 | | 239,53 | | Dinas Kesehatan | MELAMPAUI |
| | | Rasio dokter per satuan penduduk | Poin | 30,00 | | 45,00 | | 150,00 | | Dinas Kesehatan | MELAMPAUI |
| | | Rasio tenaga medis per satuan penduduk | Poin | 30,00 | | 34,90 | | 116,33 | | Dinas Kesehatan | MELAMPAUI |
| 1.02.04 | Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | | | | 590.444.000 | | 125.395.000 | | 21,24 | Dinas Kesehatan | |
| | | Persentase Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan | Persen | 100,00 | | 78,53 | | 78,53 | | Dinas Kesehatan | TINGGI |
| | | Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina | Persen | 80,00 | | 78,53 | | 98,16 | | Dinas Kesehatan | SANGAT TINGGI |
| 1.02.05 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | | | | 461.260.000 | | 16.480.000 | | 3,57 | Dinas Kesehatan | |
| | | Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang kesehatan | Persen | 6,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kesehatan | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase pembinaan kader/lembaga kesehatan masyarakat yang dibina | Persen | 89,00 | | 33,33 | | 37,45 | | Dinas Kesehatan | SANGAT RENDAH |
| 1.02.0.00.0.0 0.02.0000 | RSUD BAYU ASIH | | | | 204.061.620.297 | | 100.011.539.441 | | 96,21 12,61 | RSUD Bayu Asih | SANGAT TINGGI |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|----------------------------|--|---|----------|---|-----------------|--|-----------------|--|-------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | 204.061.620.297 | | 100.011.539.441 | 96,21 | 12,61 | RSUD Bayu Asih | |
| 1.02.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 198.223.608.453 | | 100.011.539.441 | | 50,45 | RSUD Bayu Asih | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | | A | | 100,00 | | RSUD Bayu Asih | SANGAT TINGGI |
| | | Rasio Keuangan BLUD | Skor | 80,00 | | 236,30 | | 295,38 | | RSUD Bayu Asih | MELAMPAUI |
| | | Rasio Pendapatan PNPB terhadap biaya operasional BLUD | Persen | 100,00 | | 94,00 | | 94,00 | | RSUD Bayu Asih | SANGAT TINGGI |
| | | Nilai Kepatuhan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD | Skor | 80,00 | | 100,00 | | 125,00 | | RSUD Bayu Asih | MELAMPAUI |
| 1.02.02 | Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | 5.838.011.844 | | 0 | | 0,00 | RSUD Bayu Asih | |
| | | Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan | Persen | 80,00 | | 80,00 | | 100,00 | | RSUD Bayu Asih | SANGAT TINGGI |
| | | Tingkat Pengendalian Infeksi di RS | Persen | 80,00 | | 80,00 | | 100,00 | | RSUD Bayu Asih | SANGAT TINGGI |
| | | Capaian Indikator Medik | Persen | 80,00 | | 80,00 | | 100,00 | | RSUD Bayu Asih | SANGAT TINGGI |
| | | Prosedur Penanganan Sampel Uji | Persen | 80,00 | | 80,00 | | 100,00 | | RSUD Bayu Asih | SANGAT TINGGI |
| | | Pengendalian Mutu | Persen | 80,00 | | 80,00 | | 100,00 | | RSUD Bayu Asih | SANGAT TINGGI |
| | | Bed Occupancy Rate (BOR) | Persen | 80,00 | | 80,00 | | 100,00 | | RSUD Bayu Asih | SANGAT TINGGI |
| | | Ketepatan Waktu Pelayanan | Persen | 80,00 | | 80,00 | | 100,00 | | RSUD Bayu Asih | SANGAT TINGGI |
| | | Temuan Yang di Tindaklanjuti | Persen | 80,00 | | 100,00 | | 125,00 | | RSUD Bayu Asih | MELAMPAUI |
| | | Tingkat Keandalan Sumber Daya | Persen | 80,00 | | 80,00 | | 100,00 | | RSUD Bayu Asih | SANGAT TINGGI |
| 1.02.03 | Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | 0 | | 0 | | 0,00 | RSUD Bayu Asih | |
| | | Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar | Persen | 75,00 | | 0,00 | | 0,00 | | RSUD Bayu Asih | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan | Persen | 75,00 | | 0,00 | | 0,00 | | RSUD Bayu Asih | SANGAT RENDAH |
| 1.02.05 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | | | | 0 | | 0 | | 0,00 | RSUD Bayu Asih | |
| | | Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang kesehatan | Persen | 75,00 | | 0,00 | | 0,00 | | RSUD Bayu Asih | SANGAT RENDAH |
| 1.03.2.10.0.0 0.02.0000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | | | | 175.965.176.236 | | 58.895.509.491 | 28,86 | 23,37 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | SANGAT RENDAH |
| 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | 175.965.176.236 | | 58.895.509.491 | 28,86 | 23,37 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |
| 1.03.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 32.177.069.737 | | 10.819.518.368 | | 33,62 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|----------------|---|---|----------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|--------------|--|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | | BB | | 100,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | SANGAT TINGGI |
| 1.03.02 | Program : Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | | | | 24.747.103.300 | | 5.556.810.075 | | 22,45 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |
| | | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | Persen | 37,60 | | 8,44 | | 22,45 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | Persen | 84,71 | | 19,02 | | 22,45 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | SANGAT RENDAH |
| 1.03.06 | Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | | | | 2.657.896.700 | | 369.531.000 | | 13,90 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |
| | | Tingkat Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki | Persen | 25,00 | | 3,48 | | 13,90 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | SANGAT RENDAH |
| 1.03.08 | Program : Penataan Bangunan Gedung | | | | 23.003.149.302 | | 9.181.358.480 | | 39,91 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |
| | | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota | Persen | 100,00 | | 39,91 | | 39,91 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | SANGAT RENDAH |
| | | Tingkat bangunan gedung daerah yang dipelihara/dirawat | Persen | 10,00 | | 3,99 | | 39,91 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase bangunan gedung daerah yang terawat/ terpelihara | Persen | 90,00 | | 35,92 | | 39,91 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | SANGAT RENDAH |
| 1.03.09 | Program : Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | | | | 1.141.630.400 | | 197.169.400 | | 17,27 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |
| | | Persentase penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | Persen | 1,00 | | 0,17 | | 17,30 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | SANGAT RENDAH |
| 1.03.10 | Program : Penyelenggaraan Jalan | | | | 86.997.106.499 | | 31.781.796.778 | | 36,53 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |
| | | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota | Persen | 84,00 | | 30,69 | | 36,54 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | SANGAT RENDAH |
| | | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | Persen | 68,00 | | 24,84 | | 36,53 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | SANGAT RENDAH |
| | | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk | Persen | 72,00 | | 26,30 | | 36,53 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase pemeliharaan jalan (km) yang dilaksanakan | Persen | 7,00 | | 2,56 | | 36,53 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | SANGAT RENDAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|------------------------------------|---|--|--------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|---------------|--|---|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Persentase jembatan yang di tingkatkan/direhabilitasi | Persen | 5,00 | | 1,83 | | 36,52 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | SANGAT RENDAH |
| 1.03.11 | Program : Pengembangan Jasa Konstruksi | | | | 790.121.298 | | 9.951.000 | | 1,26 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |
| | | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | Persen | 25,00 | | 0,32 | | 1,26 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | SANGAT RENDAH |
| | | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | Persen | 0,10 | | 0,00 | | 1,26 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | SANGAT RENDAH |
| | | Tingkat peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Persen | 50,00 | | 0,63 | | 1,26 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | SANGAT RENDAH |
| 1.03.12 | Program : Penyelenggaraan Penataan Ruang | | | | 4.451.099.000 | | 979.374.390 | | 22,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |
| | | Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan | Persen | 20,00 | | 4,40 | | 22,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | SANGAT RENDAH |
| | | Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan | Persen | 55,00 | | 12,10 | | 22,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | SANGAT RENDAH |
| | | Ketaatan terhadap RTRW | Persen | 50,00 | | 11,00 | | 22,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | SANGAT RENDAH |
| 2.10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | 0 | | 0 | | 0,00 | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 2.10.04 | Program : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | | | | 0 | | 0 | | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |
| | | Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi | Persen | 10,00 | | 0 | | 0,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | SANGAT RENDAH |
| 2.10.05 | Program : Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | | | | 0 | | 0 | | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |
| | | Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan | Persen | 100,00 | | 0 | | 0,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | SANGAT RENDAH |
| 2.10.08 | Program : Pengelolaan Tanah Kosong | | | | 0 | | 0 | | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |
| | | Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan | Persen | 25,00 | | 0 | | 0,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | SANGAT RENDAH |
| 1.04.1.03.0.0 0.01.0000 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | 99.532.728.892 | | 27.594.227.594 | | 128,19 | 36,93 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|---------|---|---|--------|---|----------------|--|---------------|--|-------|--|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | 36.375.849.657 | | 5.943.534.910 | 55,81 | 15,42 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| 1.03.03 | Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | | | | 20.789.935.039 | | 4.482.470.292 | | 21,56 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | Persen | 61,00 | | 31,00 | | 50,82 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | RENDAH |
| | | Persentase penduduk berakses air minum | Persen | 95,00 | | 26,00 | | 27,37 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | SANGAT RENDAH |
| | | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan | Persen | 80,00 | | 33,00 | | 41,25 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | SANGAT RENDAH |
| | | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari | Persen | 1,00 | | 1,00 | | 100,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | SANGAT TINGGI |
| | | Tingkat jaringan SPAM yang dibangun | Persen | 97,00 | | 36,00 | | 37,11 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | SANGAT RENDAH |
| 1.03.05 | Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | | | | 12.735.569.071 | | 409.769.071 | | 3,22 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | Persen | 69,00 | | 26,00 | | 37,68 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase rumah tinggal bersanitasi | Persen | 82,00 | | 26,00 | | 31,71 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | SANGAT RENDAH |
| | | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | Persen | 1,00 | | 1,00 | | 100,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | SANGAT TINGGI |
| | | Tingkat sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun / diperbaiki | Persen | 81,00 | | 26,00 | | 32,10 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | SANGAT RENDAH |
| 1.03.06 | Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | | | | 2.850.345.547 | | 1.051.295.547 | | 36,88 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | | Tingkat Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki | Persen | 2,00 | | 1,00 | | 50,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | SANGAT RENDAH |
| 1.03.07 | Program : Pengembangan Permukiman | | | | 0 | | 0 | | 0,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | | Persentase areal kawasan kumuh | Persen | 8,00 | | 6,00 | | 75,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | SEDANG |
| | | Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk | Poin | 30,00 | | 26,00 | | 86,67 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | TINGGI |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|----------------------------|---|--|----------|---|----------------|--|----------------|--|-------|--|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | 63.156.879.235 | | 21.650.692.684 | 72,38 | 21,51 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| 1.04.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 17.315.370.175 | | 7.144.166.814 | | 41,26 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | | A | | 100,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | SANGAT TINGGI |
| 1.04.02 | Program : Pengembangan Perumahan | | | | 392.500.000 | | 2.385.000 | | 0,61 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | Persen | 38,00 | | 29,00 | | 76,32 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | TINGGI |
| | | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | Persen | 9,00 | | 11,00 | | 122,22 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | MELAMPAUI |
| | | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | Persen | 48,00 | | 26,00 | | 54,17 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | RENDAH |
| 1.04.03 | Program : Kawasan Permukiman | | | | 37.941.594.060 | | 13.947.318.870 | | 36,76 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | | Rasio rumah layak huni | Persen | 8,00 | | 6,00 | | 75,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | SEDANG |
| | | Rasio permukiman layak huni | Persen | 30,00 | | 26,00 | | 86,67 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | TINGGI |
| | | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | Persen | 96,00 | | 29,00 | | 30,21 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | SANGAT RENDAH |
| | | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau | Persen | 92,00 | | 27,00 | | 29,35 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase permukiman yang tertata | Persen | 18,00 | | 16,00 | | 88,89 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | TINGGI |
| 1.04.05 | Program : Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | | | | 7.507.415.000 | | 556.822.000 | | 7,42 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | Persen | 3,00 | | 2,00 | | 66,67 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | SEDANG |
| | | Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU | Persen | 3,00 | | 2,00 | | 66,67 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | SEDANG |
| 1.05.0.00.0.0 0.02.0000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | | 22.946.468.066 | | 10.951.771.053 | 52,00 | 41,28 | Satuan Polisi Pamong Praja | RENDAH |
| 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA | | | | 22.946.468.066 | | 10.951.771.053 | 52,00 | 41,28 | Satuan Polisi Pamong Praja | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 | |
|--------------------------------|--|--|----------|---|----------------|--|---------------|--|-------|-------------------------------------|--|--------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 20.017.633.066 | | 9.996.641.031 | | 49,94 | Satuan Polisi Pamong Praja | | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | | BB | | 100,00 | | Satuan Polisi Pamong Praja | SANGAT TINGGI | |
| 1.05.02 | Program : Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | | | | 2.928.835.000 | | 955.130.022 | | 32,61 | Satuan Polisi Pamong Praja | | |
| | | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | Persen | 100,00 | | 61,00 | | 61,00 | | Satuan Polisi Pamong Praja | RENDAH | |
| | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Persen | 100,00 | | 42,00 | | 42,00 | | Satuan Polisi Pamong Praja | SANGAT RENDAH | |
| | | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota | Persen | 100,00 | | 25,00 | | 25,00 | | Satuan Polisi Pamong Praja | SANGAT RENDAH | |
| | | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | Persen | 100,00 | | 50,00 | | 50,00 | | Satuan Polisi Pamong Praja | SANGAT RENDAH | |
| | | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) | Persen | 100,00 | | 61,00 | | 61,00 | | Satuan Polisi Pamong Praja | RENDAH | |
| | | Persentase Penegakan PERDA | Persen | 100,00 | | 25,00 | | 25,00 | | Satuan Polisi Pamong Praja | SANGAT RENDAH | |
| 1.05.0.00.0.0 0.03.0000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | 6.640.356.796 | | 2.078.682.833 | | 58,40 | 26,63 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | RENDAH |
| 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | 6.640.356.796 | | 2.078.682.833 | | 58,40 | 26,63 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 1.05.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 5.126.283.980 | | 1.805.761.833 | | 35,23 | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | | B | | 100,00 | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | SANGAT TINGGI | |
| 1.05.03 | Program : Penanggulangan Bencana | | | | 1.514.072.816 | | 272.921.000 | | 18,03 | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Persen | 100,00 | | 15,30 | | 15,30 | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | SANGAT RENDAH | |
| | | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Persen | 100,00 | | 22,29 | | 22,29 | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | SANGAT RENDAH | |
| | | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Persen | 100,00 | | 96,00 | | 96,00 | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | SANGAT TINGGI | |
| 1.05.0.00.0.0 0.04.0000 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | | | | 16.890.749.232 | | 6.969.923.366 | | 83,78 | 34,62 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | TINGGI |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|-----------------------|---|---|----------|---|----------------|--|---------------|--|-------|---|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | 16.890.749.232 | | 6.969.923.366 | 83,78 | 34,62 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | |
| 1.05.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 14.309.270.452 | | 6.323.090.166 | | 44,19 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | | B | | 100,00 | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | SANGAT TINGGI |
| 1.05.04 | Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | | | | 2.581.478.780 | | 646.833.200 | | 25,06 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | |
| | | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Persen | 100,00 | | 92,99 | | 92,99 | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | SANGAT TINGGI |
| | | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Persen | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | SANGAT TINGGI |
| | | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | Persen | 18,14 | | 5,5 | | 30,32 | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | SANGAT RENDAH |
| | | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Persen | 100,00 | | 89,83 | | 89,83 | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | TINGGI |
| | | Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Persen | 100,00 | | 89,83 | | 89,83 | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | TINGGI |
| | | Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah | Persen | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | SANGAT TINGGI |
| | | Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah | Layanan | 800,00 | | 538,00 | | 67,25 | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | SEDANG |
| 1.06.2.08.0.0.01.0000 | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | 11.631.774.351 | | 3.875.811.044 | 49,01 | 28,46 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SANGAT RENDAH |
| 1.06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | 10.814.055.851 | | 3.736.432.044 | 26,35 | 19,84 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 1.06.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 8.016.379.432 | | 2.913.398.244 | | 36,34 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | | A | | 128,57 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan | MELAMPAUI |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|---------|--|---|--------|---|-------------|--|-------------|--|-------|---|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | Perlindungan Anak | |
| 1.06.02 | Program : Pemberdayaan Sosial | | | | 245.880.800 | | 28.060.800 | | 11,41 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina | Persen | 100,00 | | 25,00 | | 25,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina | Persen | 100,00 | | 30,00 | | 30,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SANGAT RENDAH |
| 1.06.03 | Program : Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | | | | 0 | | 0 | | 0,00 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | Persentase pemulangan warga migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi | Persen | 100,00 | | 10,00 | | 10,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SANGAT RENDAH |
| 1.06.04 | Program : Rehabilitasi Sosial | | | | 615.283.000 | | 204.300.000 | | 33,20 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | Persen | 100,00 | | 20,00 | | 20,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SANGAT RENDAH |
| | | Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | Persen | 100,00 | | 30,00 | | 30,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SANGAT RENDAH |
| | | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | Persen | 100,00 | | 30,00 | | 30,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SANGAT RENDAH |
| | | Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | Persen | 100,00 | | 30,00 | | 30,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SANGAT RENDAH |
| | | Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti | Persen | 100,00 | | 5,00 | | 5,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | Persen | 100,00 | | 10,00 | | 10,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SANGAT RENDAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|----------------|--|--|--------|---|----------------------|--|--------------------|--|--------------|--|--|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Persentase PMKS yang tertangani | Persen | 100,00 | | 10,00 | | 10,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SANGAT RENDAH |
| 1.06.05 | Program : Perlindungan Dan Jaminan Sosial | | | | 1.539.304.500 | | 545.608.000 | | 35,45 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | Persentase anak terlantar yang dibina | Persen | 100,00 | | 20,00 | | 20,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial | Persen | 100,00 | | 30,00 | | 30,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SANGAT RENDAH |
| 1.06.06 | Program : Penanganan Bencana | | | | 203.981.500 | | 31.171.000 | | 15,28 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | Persen | 100,00 | | 11,22 | | 11,22 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SANGAT RENDAH |
| | | Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota | Persen | 100,00 | | 24,54 | | 24,54 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SANGAT RENDAH |
| 1.06.07 | Program : Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | | | | 193.226.619 | | 13.894.000 | | 7,19 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara | Persen | 100,00 | | 7,19 | | 7,19 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SANGAT RENDAH |
| 2.08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | 817.718.500 | | 139.379.000 | | 22,66 | 8,63 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.02 | Program : Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | | | | 260.000.500 | | 60.629.000 | | 23,32 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | Persen | 100,00 | | 10,00 | | 10,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | Persen | 100,00 | | 10,00 | | 10,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan | SANGAT RENDAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|----------------|--|--|--------|---|--------------------|--|-------------------|--|----|--|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | Perlindungan Anak | |
| | | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | Persen | 100,00 | | 33,30 | | 33,30 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SANGAT RENDAH |
| | | Partisipasi perempuan di lembaga swasta | Persen | 100,00 | | 35,30 | | 35,30 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SANGAT RENDAH |
| | | Partisipasi angkatan kerja perempuan | Persen | 100,00 | | 66,37 | | 66,37 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SEDANG |
| | | Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian | Persen | 100,00 | | 64,00 | | 64,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | RENDAH |
| | | Persentase lembaga pemberdayaan perempuan yang dibina | Persen | 100,00 | | 51,00 | | 51,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | RENDAH |
| 2.08.03 | Program : Perlindungan Perempuan | | | | 276.968.000 | | 78.750.000 | 28,43 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Poin | 30,00 | | 0,28 | | 0,95 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SANGAT RENDAH |
| | | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | Persen | 100,00 | | 30,00 | | 30,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SANGAT RENDAH |
| | | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Persen | 100,00 | | 3,00 | | 3,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SANGAT RENDAH |
| | | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | Persen | 100,00 | | 1,00 | | 1,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SANGAT RENDAH |
| 2.08.04 | Program : Peningkatan Kualitas Keluarga | | | | 120.000.000 | | 0 | 0,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | Persentase pembinaan lembaga yang bergerak dalam peningkatan kualitas keluarga | Persen | 100,00 | | 20,00 | | 20,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SANGAT RENDAH |
| 2.08.05 | Program : Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | | | | 40.000.000 | | 0 | 0,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|------------------------------|--|--|----------|---|-----------------------|--|----------------------|--|--------------|--|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | Data Gender Anak | Dokumen | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SANGAT RENDAH |
| 2.08.06 | Program : Pemenuhan Hak Anak (PHA) | | | | 120.750.000 | | 0 | 0,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | Persentase Pemenuhan Hak Anak | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SANGAT RENDAH |
| 2.08.07 | Program : Perlindungan Khusus Anak | | | | 0 | | 0 | 0,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | Persen | 100,00 | | 15,00 | | 15,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SANGAT RENDAH |
| 2.07.3.32.0.0.01.0000 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI | | | | 13.694.756.576 | | 4.751.361.416 | 38,57 | 71,83 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | SANGAT RENDAH |
| 2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | 13.269.756.576 | | 4.710.837.416 | 18,57 | 35,75 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | |
| 2.07.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 10.798.506.576 | | 4.028.908.916 | 37,31 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | | BB | | 100,00 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | SANGAT TINGGI |
| 2.07.03 | Program : Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | | 1.645.000.000 | | 312.420.000 | 18,99 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | |
| | | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Persen | 69,06 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | Persen | 0,40 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan | Persen | 3,40 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | SANGAT RENDAH |
| | | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | Persen | 0,57 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | SANGAT RENDAH |
| | | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | Persen | 0,11 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | SANGAT RENDAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|----------------|--|---|--------|---|--------------------|--|--------------------|--|---------------|---|---|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | Persen | 0,07 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | SANGAT RENDAH |
| 2.07.04 | Program : Penempatan Tenaga Kerja | | | | 456.250.000 | | 257.370.000 | | 56,41 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | |
| | | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota | Persen | 5,81 | | 0,55 | | 9,47 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | SANGAT RENDAH |
| 2.07.05 | Program : Hubungan Industrial | | | | 370.000.000 | | 112.138.500 | | 30,31 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | |
| | | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | Persen | 50,00 | | 66,00 | | 132,00 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | MELAMPAUI |
| | | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | Persen | 0,64 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | SANGAT RENDAH |
| | | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | Persen | 38,88 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | SANGAT RENDAH |
| | | Keselamatan dan perlindungan | Persen | 50,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | SANGAT RENDAH |
| | | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | SANGAT RENDAH |
| 3.32 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | | 425.000.000 | | 40.524.000 | | 20,00 | 36,07 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 3.32.02 | Program : Perencanaan Kawasan Transmigrasi | | | | 0 | | 0 | | 0,00 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | |
| | | Persentase kawasan transmigrasi yang di tetapkan | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | SANGAT RENDAH |
| 3.32.03 | Program : Pembangunan Kawasan Transmigrasi | | | | 418.880.000 | | 34.404.000 | | 8,21 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | |
| | | Persentase transmigran swakarsa | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase transmigran yang diberangkatkan | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | SANGAT RENDAH |
| 3.32.04 | Program : Pengembangan Kawasan Transmigrasi | | | | 6.120.000 | | 6.120.000 | | 100,00 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|------------------------------------|--|--|----------|---|-----------------------|--|----------------------|--|--------------|--|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman | Persen | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | SANGAT TINGGI |
| 2.09.3.27.0.0 0.01.0000 | DINAS PANGAN DAN PERTANIAN | | | | 29.012.193.717 | | 8.051.917.330 | 55,49 | 45,08 | Dinas Pangan dan Pertanian | RENDAH |
| 2.09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | 19.672.193.717 | | 7.355.233.330 | 30,50 | 20,35 | Dinas Pangan dan Pertanian | |
| 2.09.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 18.249.693.717 | | 7.211.845.830 | | 39,52 | Dinas Pangan dan Pertanian | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | | A | | 112,50 | | Dinas Pangan dan Pertanian | MELAMPAUI |
| 2.09.02 | Program : Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | | | | 130.000.000 | | 4.600.000 | | 3,54 | Dinas Pangan dan Pertanian | |
| | | Persentase Pengisian Gudang Cadangan Pangan | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian | SANGAT RENDAH |
| 2.09.03 | Program : Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | | | | 1.057.500.000 | | 45.698.500 | | 4,32 | Dinas Pangan dan Pertanian | |
| | | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) | Persen | 100,00 | | 40,00 | | 40,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian | SANGAT RENDAH |
| 2.09.04 | Program : Penanganan Kerawanan Pangan | | | | 60.000.000 | | 1.090.000 | | 1,82 | Dinas Pangan dan Pertanian | |
| | | Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun | Dokumen | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian | SANGAT RENDAH |
| 2.09.05 | Program : Pengawasan Keamanan Pangan | | | | 175.000.000 | | 91.999.000 | | 52,57 | Dinas Pangan dan Pertanian | |
| | | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian | SANGAT RENDAH |
| 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | 9.340.000.000 | | 696.684.000 | 24,99 | 24,72 | Dinas Pangan dan Pertanian | |
| 3.27.02 | Program : Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | | | | 2.325.000.000 | | 364.124.000 | | 15,66 | Dinas Pangan dan Pertanian | |
| | | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Persen | 6,25 | | 5,70 | | 91,20 | | Dinas Pangan dan Pertanian | SANGAT TINGGI |
| | | Pertumbuhan Produksi Pertanian | Persen | 2,00 | | 0,50 | | 25,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian | Persen | 73,00 | | 30,00 | | 41,10 | | Dinas Pangan dan Pertanian | SANGAT RENDAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|------------------------------------|--|--|----------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Produksi Padi | Ton | 270.808,00 | | 133.320,00 | | 49,23 | | Dinas Pangan dan Pertanian | SANGAT RENDAH |
| | | Tingkat Luas Tanam Aneka Kacang dan Umbi | Persen | 3,00 | | 1,00 | | 33,33 | | Dinas Pangan dan Pertanian | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat | Persen | 77,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian | SANGAT RENDAH |
| | | Pengembangan Tanaman Manggis | Persen | 5,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian | SANGAT RENDAH |
| 3.27.03 | Program : Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | 6.160.000.000 | | 0 | 0,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian | |
| | | Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | Persen | 48,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian | SANGAT RENDAH |
| 3.27.05 | Program : Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | | | | 250.000.000 | | 220.140.000 | 88,06 | | Dinas Pangan dan Pertanian | |
| | | Persentase Pengendalian Serangan OPT | Persen | 50,00 | | 30,00 | | 60,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian | RENDAH |
| | | Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim | Persen | 50,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian | SANGAT RENDAH |
| 3.27.06 | Program : Perizinan Usaha Pertanian | | | | 40.000.000 | | 0 | 0,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian | |
| | | Persentase usaha pertanian yang memiliki ijin | Persen | 75,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian | SANGAT RENDAH |
| 3.27.07 | Program : Penyuluhan Pertanian | | | | 565.000.000 | | 112.420.000 | 19,90 | | Dinas Pangan dan Pertanian | |
| | | Cakupan bina kelompok petani | Persen | 73,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian | SANGAT RENDAH |
| 2.11.0.00.0.0 0.01.0000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | 44.771.469.821 | | 18.745.808.896 | 55,40 | 21,43 | Dinas Lingkungan Hidup | RENDAH |
| 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | 44.771.469.821 | | 18.745.808.896 | 55,40 | 21,43 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 2.11.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 38.012.283.527 | | 17.665.506.354 | 46,47 | | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | | A | | 112,50 | | Dinas Lingkungan Hidup | MELAMPAUI |
| 2.11.02 | Program : Perencanaan Lingkungan Hidup | | | | 425.000.000 | | 256.500.000 | 60,35 | | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota | Dokumen | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Lingkungan Hidup | SANGAT RENDAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|----------------|--|---|-------------------|---|----------------------|--|--------------------|--|--------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota | Dokumen | 1,00 | | 1,00 | | 100,00 | | Dinas Lingkungan Hidup | SANGAT TINGGI |
| | | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten | Dokumen | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Lingkungan Hidup | SANGAT RENDAH |
| 2.11.03 | Program : Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | | 2.495.000.000 | | 312.323.000 | | 12,52 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim | Persen | 70,00 | | 60,00 | | 85,71 | | Dinas Lingkungan Hidup | TINGGI |
| | | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air | Skor/ Kategori | 60,00 | | 60,00 | | 100,00 | | Dinas Lingkungan Hidup | SANGAT TINGGI |
| | | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara | Skor/ Kategori | 70,00 | | 75,00 | | 107,14 | | Dinas Lingkungan Hidup | MELAMPAUI |
| | | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Skor/ Kategori | 37,18 | | 50,00 | | 134,48 | | Dinas Lingkungan Hidup | MELAMPAUI |
| 2.11.04 | Program : Pengelolaan Keekaragaman Hayati (Kehati) | | | | 42.500.000 | | 19.349.000 | | 45,53 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati yang disusun | Dokumen | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Lingkungan Hidup | SANGAT RENDAH |
| 2.11.05 | Program : Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | | | | 0 | | 0 | | 0,00 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | Jumlah limbah B3 yang dikelola | Kg | 15.000.000.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Lingkungan Hidup | SANGAT RENDAH |
| 2.11.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | | | | 242.500.000 | | 12.605.600 | | 5,20 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | Persen | 100,00 | | 50,00 | | 50,00 | | Dinas Lingkungan Hidup | SANGAT RENDAH |
| | | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota | Persen | 100,00 | | 50,00 | | 50,00 | | Dinas Lingkungan Hidup | SANGAT RENDAH |
| | | Peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota | Persen | 25,00 | | 25,00 | | 100,00 | | Dinas Lingkungan Hidup | SANGAT TINGGI |
| | | Peningkatan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota | Persen | 50,00 | | 25,00 | | 50,00 | | Dinas Lingkungan Hidup | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase pembinaan/sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan | Persen | 10,00 | | 5,00 | | 50,00 | | Dinas Lingkungan Hidup | SANGAT RENDAH |
| 2.11.07 | Program : Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan | | | | 87.500.000 | | 5.686.000 | | 6,50 | Dinas Lingkungan Hidup | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|---|---|--|----------|---|----------------------|--|--------------------|--|--------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH | | | | | | | | | | | |
| | | Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA | MHA | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Lingkungan Hidup | SANGAT RENDAH |
| | | Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional | MHA | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Lingkungan Hidup | SANGAT RENDAH |
| | | Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional | MHA | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Lingkungan Hidup | SANGAT RENDAH |
| | | Penetapan hak MHA | MHA | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Lingkungan Hidup | SANGAT RENDAH |
| | | Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana | Persen | 100,00 | | 50,00 | | 50,00 | | Dinas Lingkungan Hidup | SANGAT RENDAH |
| 2.11.08 | Program : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | | | | 275.000.000 | | 42.214.000 | | 15,35 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan | Persen | 100,00 | | 25,00 | | 25,00 | | Dinas Lingkungan Hidup | SANGAT RENDAH |
| | | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat | Kegiatan | 1,00 | | 1,00 | | 100,00 | | Dinas Lingkungan Hidup | SANGAT TINGGI |
| 2.11.09 | Program : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | | | | 62.500.000 | | 0 | | 0,00 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup | Kali | 1,00 | | 1,00 | | 100,00 | | Dinas Lingkungan Hidup | SANGAT TINGGI |
| | | Persentase peraih PROPER kategori Taat/Biru | Persen | 100,00 | | 50,00 | | 50,00 | | Dinas Lingkungan Hidup | SANGAT RENDAH |
| 2.11.10 | Program : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | | | | 100.000.000 | | 30.570.000 | | 30,57 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota. | Persen | 100,00 | | 50,00 | | 50,00 | | Dinas Lingkungan Hidup | SANGAT RENDAH |
| 2.11.11 | Program : Pengelolaan Persampahan | | | | 3.029.186.294 | | 401.054.942 | | 13,24 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | Timbulan sampah yang ditangani | Persen | 75,00 | | 50,00 | | 66,67 | | Dinas Lingkungan Hidup | SEDANG |
| | | Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R | Persen | 31,00 | | 20,00 | | 64,52 | | Dinas Lingkungan Hidup | RENDAH |
| | | Persentase cakupan area pelayanan | Persen | 75,00 | | 60,00 | | 80,00 | | Dinas Lingkungan Hidup | TINGGI |
| | | Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota | Skor | 72,00 | | 50,00 | | 69,44 | | Dinas Lingkungan Hidup | SEDANG |
| | | Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan | Persen | 75,00 | | 50,00 | | 66,67 | | Dinas Lingkungan Hidup | SEDANG |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|----------------------------|---|--|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------|---|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.12.0.00.0.0 0.01.0000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | 19.247.960.689 | | 9.283.898.059 | 93,95 | 47,03 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | SANGAT TINGGI |
| 2.12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | 19.247.960.689 | | 9.283.898.059 | 93,95 | 47,03 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 2.12.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 17.928.299.689 | | 8.586.682.559 | | 47,89 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | | A | | 100,00 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | SANGAT TINGGI |
| 2.12.02 | Program : Pendaftaran Penduduk | | | | 209.501.000 | | 17.014.400 | | 8,12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | Perekaman KTP elektronik | Persen | 100,00 | | 100,91 | | 100,91 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | MELAMPAUI |
| | | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk | Persen | 100,00 | | 99,88 | | 99,88 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | SANGAT TINGGI |
| | | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Kategori | Sudah | | Sudah | | 100,00 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | SANGAT TINGGI |
| | | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | Persen | 100,00 | | 99,88 | | 99,88 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | SANGAT TINGGI |
| | | Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | Persen | 50,00 | | 53,06 | | 106,12 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | MELAMPAUI |
| 2.12.03 | Program : Pencatatan Sipil | | | | 50.160.000 | | 8.350.000 | | 16,65 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | Kepemilikan akta kelahiran | Persen | 100,00 | | 89,59 | | 89,59 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | TINGGI |
| | | Rasio bayi berakte kelahiran | Persen | 100,00 | | 89,59 | | 89,59 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | TINGGI |
| | | Rasio pasangan berakte nikah | Persen | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | SANGAT TINGGI |
| | | Cakupan penerbitan akta kelahiran | Persen | 100,00 | | 89,59 | | 89,59 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | TINGGI |
| 2.12.04 | Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | 1.035.000.000 | | 646.851.100 | | 62,50 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | Persen | 55,00 | | 28,50 | | 51,82 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | RENDAH |
| 2.12.05 | Program : Pengelolaan Profil Kependudukan | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 100,00 | Dinas Kependudukan dan | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|------------------------------------|--|--|----------|---|-----------------------|--|----------------------|--|--------------|---|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | Pencatatan Sipil | |
| | | Profil data kependudukan | Dokumen | 1,00 | | 1,00 | | 100,00 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | SANGAT TINGGI |
| 2.13.0.00.0.0 0.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | 22.283.734.005 | | 7.372.804.965 | 86,04 | 28,01 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | TINGGI |
| 2.13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | 22.283.734.005 | | 7.372.804.965 | 86,04 | 28,01 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 2.13.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 11.353.189.271 | | 4.702.593.874 | | 41,42 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | | A | | 112,50 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | MELAMPAUI |
| 2.13.02 | Program : Penataan Desa | | | | 125.000.000 | | 30.244.500 | | 24,20 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | Persen | 30,00 | | 24,02 | | 80,07 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | TINGGI |
| 2.13.03 | Program : Peningkatan Kerja Sama Desa | | | | 4.341.453.315 | | 1.946.388.991 | | 44,83 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | | Persentase kerjasama desa yang difasilitasi | Persen | 5,00 | | 2,78 | | 55,60 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | RENDAH |
| | | Persentase pembangunan kawasan perdesaan | Persen | 2,00 | | 2,00 | | 100,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | SANGAT TINGGI |
| 2.13.04 | Program : Administrasi Pemerintahan Desa | | | | 1.965.520.600 | | 494.441.000 | | 25,16 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | | Persentase peningkatan status desa mandiri | Persen | 5,00 | | 41,67 | | 833,40 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | MELAMPAUI |
| | | Persentase desa tertib administrasi | Persen | 40,00 | | 10,00 | | 25,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase pembinaan BUM Desa | Persen | 40,00 | | 10,00 | | 25,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase penertiban aset desa | Persen | 50,00 | | 10,00 | | 20,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase kepala desa yang dibina | Persen | 40,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase aparaturnya desa yang dibina | Persen | 45,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | SANGAT RENDAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|----------------------------|---|--|----------|---|----------------|--|---------------|--|-------|--|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.13.05 | Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | | | | 4.498.570.819 | | 199.136.600 | | 4,43 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | SANGAT RENDAH |
| | | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | Persen | 100,00 | | 25,00 | | 25,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase LSM aktif | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase PKK aktif | Persen | 100,00 | | 50,00 | | 50,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Posyandu aktif | Persen | 100,00 | | 50,00 | | 50,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | SANGAT RENDAH |
| | | Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat | Persen | 5,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | SANGAT RENDAH |
| 2.14.0.00.0.0 0.01.0000 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | 23.266.501.469 | | 3.573.133.760 | 32,77 | 12,20 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SANGAT RENDAH |
| 2.14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | 23.266.501.469 | | 3.573.133.760 | 32,77 | 12,20 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 2.14.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 8.303.441.469 | | 3.119.481.760 | | 37,57 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | | A | | 100,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SANGAT TINGGI |
| 2.14.02 | Program : Pengendalian Penduduk | | | | 356.000.000 | | 19.500.000 | | 5,48 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | TFR (Angka Kelahiran Total) | Persen | 2,50 | | 2,33 | | 93,20 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SANGAT TINGGI |
| | | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | Persen | 100,00 | | 25,00 | | 25,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SANGAT RENDAH |
| | | Rata-rata jumlah anak per keluarga | Persen | 36,00 | | 2,33 | | 6,47 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SANGAT RENDAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|----------------|--|--|--------|---|----------------------|--|--------------------|--|-------------|---|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | Berencana | |
| | | Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE | Persen | 30,00 | | 2,50 | | 8,33 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SANGAT RENDAH |
| 2.14.03 | Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | | | | 8.843.660.000 | | 296.726.000 | | 3,36 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Persen | 99,00 | | 17,50 | | 17,68 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | Persen | 35,22 | | 8,00 | | 22,71 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB | Persen | 94,00 | | 25,00 | | 26,60 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SANGAT RENDAH |
| | | Ratio Akseptor KB | Persen | 25.521,00 | | 18,87 | | 0,07 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SANGAT RENDAH |
| | | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 | Persen | 83,28 | | 17,50 | | 21,01 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SANGAT RENDAH |
| | | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19) per 1.000 perempuan usia 15 - 19 tahun (ASFR 15 - 19) | Poin | 25,71 | | 6,01 | | 23,38 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SANGAT RENDAH |
| | | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) | Persen | 534,83 | | 8,01 | | 1,50 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Persen | 46,24 | | 6,27 | | 13,56 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | Persen | 17,78 | | 2,60 | | 14,62 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SANGAT RENDAH |
| | | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | Persen | 691.167,00 | | 23,75 | | 0,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SANGAT RENDAH |
| | | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | Persen | 161.153,00 | | 16,25 | | 0,01 | | Dinas Pengendalian | SANGAT |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|----------------|---|---|--------|---|----------------------|--|--------------------|--|----|---|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | Penduduk dan Keluarga Berencana | RENDAH |
| | | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | Persen | 624.471,00 | | 2,82 | | 0,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SANGAT RENDAH |
| | | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | Persen | 100,00 | | 7,50 | | 7,50 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SANGAT RENDAH |
| | | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa | Persen | 100,00 | | 133,83 | | 133,83 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | MELAMPAUI |
| | | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk | Persen | 126,00 | | 25,00 | | 19,84 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SANGAT RENDAH |
| | | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri | Persen | 23,90 | | 12,05 | | 50,42 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | RENDAH |
| | | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan | Persen | 100,00 | | 1:1,6 | | 0,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SANGAT RENDAH |
| | | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | Persen | 272.476,00 | | 25,00 | | 0,01 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan | Persen | 135,00 | | 43,25 | | 32,04 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SANGAT RENDAH |
| 2.14.04 | Program : Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | | | | 5.763.400.000 | | 137.426.000 | 2,38 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | Persentase pembinaan Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Persen | 15,65 | | 12,05 | | 77,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | TINGGI |
| | | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa | Persen | 3.314,00 | | 25,00 | | 0,75 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) | Persen | 674,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SANGAT RENDAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|------------------------------------|--|---|----------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|--------------|--|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | Persen | 15,65 | | 25,00 | | 159,74 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | MELAMPAUI |
| | | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | Persen | 53,71 | | 15,00 | | 27,93 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SANGAT RENDAH |
| | | Rata-rata usia kawin pertama wanita | Persen | 19,00 | | 19,00 | | 100,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SANGAT TINGGI |
| 2.15.0.00.0.0 0.01.0000 | DINAS PERHUBUNGAN | | | | 43.862.873.684 | | 19.157.079.165 | 123,27 | 30,68 | Dinas Perhubungan | MELAMPAUI |
| 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | 43.862.873.684 | | 19.157.079.165 | 123,27 | 30,68 | Dinas Perhubungan | |
| 2.15.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 35.371.564.844 | | 17.023.145.291 | | 48,13 | Dinas Perhubungan | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | | BB | | 100,00 | | Dinas Perhubungan | SANGAT TINGGI |
| 2.15.02 | Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | | | | 8.223.563.840 | | 2.084.205.874 | | 25,34 | Dinas Perhubungan | |
| | | Rasio konektivitas kabupaten/kota | Persen | 98,00 | | 0,96 | | 0,98 | | Dinas Perhubungan | SANGAT RENDAH |
| | | Kinerja lalu lintas kabupaten/ kota | Poin | 80,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Perhubungan | SANGAT RENDAH |
| | | Jumlah arus penumpang angkutan umum (kendaraan) | Unit | 311.378,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Perhubungan | SANGAT RENDAH |
| | | Rasio ijin trayek | Persen | 50,00 | | 0,03 | | 0,05 | | Dinas Perhubungan | SANGAT RENDAH |
| | | Jumlah uji kir angkutan umum (kendaraan) | Unit | 307,00 | | 2.049,00 | | 667,43 | | Dinas Perhubungan | MELAMPAUI |
| | | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | Unit | 1,00 | | 1,00 | | 100,00 | | Dinas Perhubungan | SANGAT TINGGI |
| | | Persentase layanan angkutan darat | Persen | 1.397,00 | | 3,00 | | 0,21 | | Dinas Perhubungan | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | Persen | 881,00 | | 98,29 | | 11,16 | | Dinas Perhubungan | SANGAT RENDAH |
| | | Pemasangan Rambu- rambu | Persen | 70,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Perhubungan | SANGAT RENDAH |
| | | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | Rasio | 0,002 | | 0,002 | | 100,00 | | Dinas Perhubungan | SANGAT TINGGI |
| | | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum | Orang | 576.262,00 | | 4.227.552,00 | | 733,62 | | Dinas Perhubungan | MELAMPAUI |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|------------------------------------|--|--|----------|---|-----------------------|--|----------------------|--|--------------|---|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun | Orang | 539.548,00 | | 66.343,00 | | 12,30 | | Dinas Perhubungan | SANGAT RENDAH |
| 2.15.03 | Program : Pengelolaan Pelayaran | | | | 267.745.000 | | 49.728.000 | | 18,57 | Dinas Perhubungan | |
| | | Persentase usaha angkutan laut/sungai yang berijin | Persen | 30,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Perhubungan | SANGAT RENDAH |
| 2.16.2.20.2.2 1.01.0000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | 26.849.232.106 | | 5.506.910.390 | 73,28 | 53,48 | Dinas Komunikasi dan Informatika | SEDANG |
| 2.16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | 24.733.120.106 | | 5.138.052.890 | 28,98 | 19,38 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| 2.16.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 13.042.665.506 | | 2.917.689.442 | | 22,37 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | | A | | 112,50 | | Dinas Komunikasi dan Informatika | MELAMPAUI |
| 2.16.02 | Program : Informasi Dan Komunikasi Publik | | | | 4.653.233.500 | | 578.041.650 | | 12,42 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Persen | 95,00 | | 25,53 | | 26,87 | | Dinas Komunikasi dan Informatika | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | Persen | 95,00 | | 13,08 | | 13,77 | | Dinas Komunikasi dan Informatika | SANGAT RENDAH |
| | | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan | Persen | 95,00 | | 19,53 | | 20,56 | | Dinas Komunikasi dan Informatika | SANGAT RENDAH |
| | | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah | Persen | 100,00 | | 9,39 | | 9,39 | | Dinas Komunikasi dan Informatika | SANGAT RENDAH |
| | | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika | SANGAT RENDAH |
| | | Tingkat akses layanan informasi publik oleh masyarakat | Persen | 95,00 | | 14,12 | | 14,86 | | Dinas Komunikasi dan Informatika | SANGAT RENDAH |
| 2.16.03 | Program : Aplikasi Informatika | | | | 7.037.221.100 | | 1.642.321.798 | | 23,34 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Persen | 100,00 | | 23,77 | | 23,77 | | Dinas Komunikasi dan Informatika | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase aplikasi/sistem pemerintah daerah yang aktif | Persen | 90,00 | | 35,22 | | 39,13 | | Dinas Komunikasi dan Informatika | SANGAT RENDAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|----------------------------|---|--|--------|---|----------------|--|---------------|--|-------|---|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | 912.250.000 | | 130.325.000 | 17,94 | 14,29 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| 2.20.02 | Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral | | | | 912.250.000 | | 130.325.000 | | 14,29 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Persen | 85,00 | | 19,78 | | 23,27 | | Dinas Komunikasi dan Informatika | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | Persen | 85,00 | | 49,92 | | 58,73 | | Dinas Komunikasi dan Informatika | RENDAH |
| | | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | Data | Ada | | Tidak Ada | | 0,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika | SANGAT RENDAH |
| | | Buku kabupaten dalam angka (ada/tidak ada) | Buku | Ada | | Tidak Ada | | 0,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase ketersediaan data statistik sektoral tiap bidang urusan pemerintahan | Persen | 85,00 | | 6,56 | | 7,72 | | Dinas Komunikasi dan Informatika | SANGAT RENDAH |
| 2.21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | 1.203.862.000 | | 238.532.500 | 26,35 | 19,81 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| 2.21.02 | Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | | | | 1.203.862.000 | | 238.532.500 | | 19,81 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | Tingkat keamanan informasi pemerintah | Persen | 30,00 | | 12,12 | | 40,40 | | Dinas Komunikasi dan Informatika | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | Persen | 100,00 | | 38,66 | | 38,66 | | Dinas Komunikasi dan Informatika | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase pengamanan data aplikasi/sistem pemerintah daerah | Persen | 10,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika | SANGAT RENDAH |
| 2.17.3.30.3.3 1.01.0000 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | | | | 19.126.886.478 | | 7.769.357.549 | 103,32 | 70,77 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | MELAMPAUI |
| 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | 17.124.200.678 | | 7.044.574.749 | 21,63 | 14,33 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | |
| 2.17.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 15.010.452.572 | | 6.953.384.649 | | 46,32 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|---------|--|---|----------|---|---------------|--|------------|--|-------|---|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | | A | | 100,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | SANGAT TINGGI |
| 2.17.02 | Program : Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | | | | 50.000.000 | | 16.811.500 | | 33,62 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | |
| | | Persentase ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi yang diterbitkan | Persen | 87,50 | | 2,86 | | 3,27 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | SANGAT RENDAH |
| 2.17.03 | Program : Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | | | | 125.000.000 | | 660.000 | | 0,53 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | |
| | | Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang dilaksanakan | Persen | 89,70 | | 49,90 | | 55,63 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | RENDAH |
| 2.17.04 | Program : Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | | | | 200.000.000 | | 0 | | 0,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | |
| | | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | Persen | 89,70 | | 15,45 | | 17,22 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Koperasi yang mendapatkan penghargaan hasil penilaian | Persen | 12,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | SANGAT RENDAH |
| 2.17.05 | Program : Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | | | | 189.707.600 | | 17.869.500 | | 9,42 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | |
| | | Persentase SDM yang memiliki sertifikat kompetensi perkoperasian | Persen | 72,82 | | 11,24 | | 15,44 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | SANGAT RENDAH |
| 2.17.07 | Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | | | | 1.060.882.816 | | 9.270.500 | | 0,87 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | |
| | | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha | Persen | 85,23 | | 9,21 | | 10,81 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | SANGAT RENDAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|----------------|--|--|--------|---|----|--|----|--|--------------|--|--|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | dan Perindustrian | |
| | | Persentase UMKM yang melakukan kemitraan usaha | Persen | 56,46 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase UMKM yang sudah memiliki ijin usaha | Persen | 75,23 | | 8,41 | | 11,18 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | SANGAT RENDAH |
| | | Tingkat Wirausaha Baru (WUB) | Persen | 2,53 | | 1,71 | | 67,59 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | SEDANG |
| | | Persentase pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan/sosialisasi kewirausahaan | Persen | 57,90 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | SANGAT RENDAH |
| 2.17.08 | Program : Pengembangan UMKM | | | | | 488.157.690 | | 46.578.600 | 9,54 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | |
| | | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | Persen | 20,56 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase UMKM yang terfasilitasi dalam pengembangan usahanya | Persen | 9,63 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | SANGAT RENDAH |
| 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | 952.772.800 | | 273.118.800 | 35,20 | 22,02 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.30.02 | Program : Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan | | | | | 129.437.400 | | 52.819.400 | 40,81 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | |
| | | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | Persen | 95,32 | | 31,89 | | 33,46 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase penerbitan surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan | Persen | 100,00 | | 40,00 | | 40,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | SANGAT RENDAH |
| 3.30.03 | Program : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | 20.000.000 | | 0 | 0,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|----------------|--|--|--------|---|--------------------|--|--------------------|--|--------------|--|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | Perdagangan dan Perindustrian | |
| | | Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang tersedia | Persen | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | SANGAT TINGGI |
| 3.30.04 | Program : Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | | | | 259.545.400 | | 65.380.500 | | 25,19 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | |
| | | Persentase komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil harga dan stoknya | Persen | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | SANGAT TINGGI |
| | | Persentase kinerja realisasi pupuk | Persen | 37,00 | | 21,50 | | 58,11 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | RENDAH |
| 3.30.05 | Program : Pengembangan Ekspor | | | | 178.790.000 | | 49.900.000 | | 27,91 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | |
| | | Tingkat Nilai Export bersih | Persen | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi dalam Pameran Dagang | Persen | 2,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | SANGAT RENDAH |
| 3.30.06 | Program : Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | | | | 275.000.000 | | 105.018.900 | | 38,19 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | |
| | | Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | Persen | 64,62 | | 13,20 | | 20,43 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | SANGAT RENDAH |
| 3.30.07 | Program : Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | | | | 90.000.000 | | 0 | | 0,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | |
| | | Persentase UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi | Persen | 50,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | SANGAT RENDAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|----------------|--|---|---------|---|----------------------|--|--------------------|--|--------------|--|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Persentase Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta | Persen | 50,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | SANGAT RENDAH |
| 3.31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | 1.049.913.000 | | 451.664.000 | 46,50 | 34,42 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | |
| 3.31.02 | Program : Perencanaan Dan Pembangunan Industri | | | | 849.953.000 | | 425.050.000 | | 50,01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | |
| | | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | Persen | 60,00 | | 40,00 | | 66,67 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | SEDANG |
| | | Cakupan bina kelompok pengrajin | Persen | 83,33 | | 47,46 | | 56,95 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | RENDAH |
| 3.31.03 | Program : Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota | | | | 49.974.000 | | 26.614.000 | | 53,26 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | |
| | | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi | Persen | 20,71 | | 4,84 | | 23,37 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Persen | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | SANGAT TINGGI |
| | | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota | Persen | 100,00 | | 25,00 | | 25,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | SANGAT RENDAH |
| 3.31.04 | Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | | | | 149.986.000 | | 0 | | 0,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | |
| | | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | Dokumen | 1,00 | | 1,00 | | 100,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | SANGAT TINGGI |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|------------------------------------|--|---|----------|---|-----------------------|--|----------------------|--|--------------|---|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | dan Perindustrian | |
| | | Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri yang dilaksanakan | Kegiatan | 10,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | SANGAT RENDAH |
| 2.18.0.00.0.0 0.01.0000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | 14.699.308.112 | | 6.350.358.801 | 77,13 | 23,31 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | TINGGI |
| 2.18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | 14.699.308.112 | | 6.350.358.801 | 77,13 | 23,31 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| 2.18.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 13.422.110.853 | | 6.165.568.171 | | 45,94 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | | AA | | 111,11 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | MELAMPAUI |
| 2.18.02 | Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal | | | | 209.933.259 | | 102.911.250 | | 49,02 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota | Persen | 5,60 | | 3,00 | | 53,57 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | RENDAH |
| | | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | Rp. | 6,73 | | 3,56 | | 52,90 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | RENDAH |
| | | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | Investor | 730,00 | | 425,00 | | 58,22 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | RENDAH |
| | | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) | Persen | 28,50 | | 20,00 | | 70,18 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | SEDANG |
| 2.18.03 | Program : Promosi Penanaman Modal | | | | 177.500.000 | | 1.452.000 | | 0,82 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | | Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan | Kegiatan | 2,00 | | 2,00 | | 100,00 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | SANGAT TINGGI |
| | | Nilai Minat Investasi Berdasarkan Lokasi dan Sektor (Trilyun) | Rp. | 7,40 | | 6,30 | | 85,14 | | Dinas Penanaman Modal | TINGGI |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 | |
|----------------------------|---|--|----------|---|----------------|--|----------------|--|-------|--|---|--------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | | | | dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | |
| 2.18.04 | Program : Pelayanan Penanaman Modal | | | | 135.000.000 | | 15.177.380 | | 11,24 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | |
| | | Rasio daya serap tenaga kerja | Persen | 18,50 | | 12,00 | | 64,86 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | RENDAH | |
| | | Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan | Persen | 94,58 | | 100,00 | | 105,73 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | MELAMPAUI | |
| | | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 92,50 | | 96,05 | | 103,84 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | MELAMPAUI | |
| 2.18.05 | Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | | | | 585.147.000 | | 13.443.000 | | 2,30 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | |
| | | Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala | Persen | 7,14 | | 5,00 | | 70,03 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | SEDANG | |
| 2.18.06 | Program : Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | | | | 169.617.000 | | 51.807.000 | | 30,54 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | |
| | | Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan | Persen | 100,00 | | 50,00 | | 50,00 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | SANGAT RENDAH | |
| 2.19.2.22.3.2 6.01.0000 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | | | | 28.630.705.312 | | 12.014.677.701 | | 89,37 | 78,79 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan | TINGGI |
| 2.19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | 25.076.955.312 | | 10.898.246.701 | | 46,25 | 33,06 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan | |
| 2.19.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 16.946.955.312 | | 7.114.186.701 | | 41,98 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | | BB | | 100,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT TINGGI | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|---------|---|---|--------|---|----------------------|--|----------------------|--|--------------|--|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.19.02 | Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | | | | 1.112.500.000 | | 450.110.000 | | 40,46 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Persen | 0,0001 | | 0,00 | | 40,46 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| | | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | Persen | 0,01 | | 0,00 | | 40,46 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif | Persen | 0,41 | | 0,17 | | 40,46 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Wirausaha Muda | Persen | 0,74 | | 0,30 | | 40,46 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Pembinaan Kepemudaan | Persen | 0,41 | | 0,17 | | 40,46 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| 2.19.03 | Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | | | | 6.692.500.000 | | 3.333.950.000 | | 49,82 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | Tingkat prestasi olahraga | Persen | 70,00 | | 34,87 | | 49,82 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| | | Cakupan Pembinaan Olahraga | Persen | 50,00 | | 24,91 | | 49,82 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| | | Cakupan Pembinaan Atlet Muda | Persen | 40,00 | | 19,93 | | 49,82 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| | | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi | Persen | 40,00 | | 19,93 | | 49,82 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| | | Tingkat atlet berprestasi | Persen | 50,00 | | 24,91 | | 49,82 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| | | Tingkat penyediaan Sarana Prasarana Olahraga | Persen | 16,00 | | 7,97 | | 49,82 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|---------|--|---|--------------|---|---------------|--|-------------|--|-------|---|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.19.04 | Program : Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | | | | 325.000.000 | | 0 | | 0,00 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | Persentase organisasi kepramukaan yang dibina | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| 2.22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | 1.551.250.000 | | 414.740.000 | 10,41 | 6,76 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| 2.22.02 | Program : Pengembangan Kebudayaan | | | | 1.226.250.000 | | 414.740.000 | | 33,82 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | Karya Budaya | 70,00 | | 23,68 | | 33,82 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Kelompok/Komunitas Kebudayaan yang dibina | Persen | 55,00 | | 18,60 | | 33,82 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Festival Kebudayaan Tradisional yang diselenggarakan | Persen | 30,00 | | 10,15 | | 33,82 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Event Pagelaran Seni Budaya Yang Diikuti | Persen | 30,00 | | 10,15 | | 33,82 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| 2.22.03 | Program : Pengembangan Kesenian Tradisional | | | | 50.000.000 | | 0 | | 0,00 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Event | 12,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Kelompok/ Komunitas Seni/Kesenian yang dibina | Persen | 3,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Festival Kesenian Tradisional yang diselenggarakan | Persen | 30,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| 2.22.04 | Program : Pembinaan Sejarah | | | | 50.000.000 | | 0 | | 0,00 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|----------------|--|---|--------|---|----------------------|--|--------------------|--|--------------|--|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Persentase Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah yang disediakan | Persen | 50,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| 2.22.05 | Program : Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | | | | 100.000.000 | | 0 | 0,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | Terlestarikannya Cagar Budaya | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu | Persen | 60,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| | | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| | | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | Buah | 12,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| 2.22.06 | Program : Pengelolaan Permuseuman | | | | 125.000.000 | | 0 | 0,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | Persentase pertumbuhan pemanfaatan museum oleh masyarakat | Persen | 20,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| 3.26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | 2.002.500.000 | | 701.691.000 | 32,71 | 38,96 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| 3.26.02 | Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | | | 908.250.000 | | 287.153.000 | 31,62 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | Persen | 6,53 | | 2,06 | | 31,62 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota | Persen | 0,42 | | 0,13 | | 31,62 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| | | Tingkat hunian akomodasi | Persen | 19,87 | | 6,28 | | 31,62 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|------------------------------------|---|--|--------|---|----|--|----|--|--------------|--|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Kunjungan wisata | Persen | 80,00 | | 25,29 | | 31,62 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| | | Lama kunjungan Wisata | Hari | 1,50 | | 0,47 | | 31,62 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Jasa Usaha Pariwisata Berstandar Baik/ Tersertifikasi | Persen | 0,31 | | 0,10 | | 31,62 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata yang bersertifikat | Persen | 0,43 | | 0,14 | | 31,62 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Destinasi Wisata yang Menarik dan Diminati Dikembangkan | Persen | 0,31 | | 0,10 | | 31,62 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| 3.26.03 | Program : Pemasaran Pariwisata | | | | | 453.750.000 | | 69.970.000 | 15,42 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | Jumlah Event Promosi pariwisata yang diselenggarakan | Event | 2,00 | | 0,31 | | 15,42 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase destinasi wisata yang diminati | Persen | 0,32 | | 0,05 | | 15,42 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| 3.26.04 | Program : Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | | | | | 311.250.000 | | 235.658.000 | 75,71 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | Cakupan sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang disediakan | Persen | 1,00 | | 0,76 | | 75,71 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | TINGGI |
| 3.26.05 | Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | | | | | 329.250.000 | | 108.910.000 | 33,08 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | Persentasi Komunitas Ekonomi Kreatif Yang Dibina | Persen | 1,00 | | 0,33 | | 33,08 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| 2.23.2.24.0.0 0.01.0000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | | | | | 12.426.192.976 | | 5.002.313.935 | 32,17 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | SANGAT RENDAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|---------|--|---|----------|---|----------------|--|---------------|--|-------|----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | 11.964.565.976 | | 4.802.649.191 | 9,38 | 24,11 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| 2.23.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 11.385.239.976 | | 4.734.123.191 | | 41,58 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | | A | | 112,50 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | MELAMPAUI |
| 2.23.02 | Program : Pembinaan Perpustakaan | | | | 549.326.000 | | 62.731.000 | | 11,42 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | Persen | 70,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | SANGAT RENDAH |
| | | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Poin | 70,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | SANGAT RENDAH |
| | | Tingkat koleksi buku perpustakaan daerah | Persen | 10,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | SANGAT RENDAH |
| | | Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital | Persen | 1,07 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | SANGAT RENDAH |
| | | Laju pengunjung perpustakaan | Persen | 50,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | SANGAT RENDAH |
| | | Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun | Orang | 75.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Perpustakaan Umum Dan Sekolah yang dibina | Persen | 0,80 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Ketersediaan Ruang Baca/ Pojok Baca / Sudut Baca Di Ruang Publik | Persen | 0,16 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | SANGAT RENDAH |
| | | Laju Anggota Perpustakaan | Persen | 51,52 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | SANGAT RENDAH |
| | | Tingkat Layanan Perpustakaan Keliling | Persen | 0,09 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | SANGAT RENDAH |
| 2.23.03 | Program : Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | | | | 30.000.000 | | 5.795.000 | | 19,32 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | | Persentase naskah kuno yang dilestarikan | Persen | 50,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | SANGAT RENDAH |
| 2.24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | 461.627.000 | | 199.664.744 | 22,80 | 21,63 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| 2.24.02 | Program : Pengelolaan Arsip | | | | 461.627.000 | | 199.664.744 | | 43,25 | Dinas Kearsipan dan | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|------------------------------------|--|--|----------|---|-----------------------|--|----------------------|--|--------------|---|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | Perpustakaan | |
| | | Persentase Pembinaan Kearsipan OPD | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Tertib | Persen | 39,10 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | SANGAT RENDAH |
| | | Tingkat Pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan | Persen | 27,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Penyusutan Arsip | Persen | 20,00 | | 12,07 | | 60,35 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | RENDAH |
| | | Arsip Aktif | Persen | 20,00 | | 12,00 | | 60,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | RENDAH |
| | | Arsip Inaktif | Persen | 20,00 | | 20,00 | | 100,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | SANGAT TINGGI |
| | | Arsip Vital | Persen | 20,00 | | 10,64 | | 53,20 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | RENDAH |
| | | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi Kearsipan | Persen | 75,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | SANGAT RENDAH |
| | | Laju Pengunjung Diorama/Museum Kearsipan | Persen | 4,70 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | SANGAT RENDAH |
| 2.24.03 | Program : Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip | | | | 0 | | 0 | | 0,00 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | | Tingkat Penyelamatan Arsip Statis | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | SANGAT RENDAH |
| | | Tingkat Pemeliharaan Arsip Statis | Persen | 19,99 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | SANGAT RENDAH |
| | | Tingkat Pelestarian Arsip Statis | Persen | 1,75 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | SANGAT RENDAH |
| 3.25.3.27.0.0 0.01.0000 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | | | | 16.771.289.263 | | 7.788.524.968 | 161,96 | 56,28 | Dinas Perikanan dan Peternakan | MELAMPAUI |
| 3.25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | 14.482.869.614 | | 7.116.672.768 | 98,61 | 23,24 | Dinas Perikanan dan Peternakan | |
| 3.25.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 13.136.252.914 | | 7.040.242.768 | | 53,59 | Dinas Perikanan dan Peternakan | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | | BB | | 100,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | SANGAT TINGGI |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|---------|---|--|---------|---|-------------|--|------------|--|-------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.25.03 | Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap | | | | 297.145.500 | | 27.714.000 | | 9,33 | Dinas Perikanan dan Peternakan | |
| | | Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap | Ton | 1.635,30 | | 723,00 | | 44,21 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | SANGAT RENDAH |
| | | Produksi perikanan | Persen | 5,25 | | 5,32 | | 101,33 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | MELAMPAUI |
| | | Konsumsi ikan | Persen | 30,00 | | 30,00 | | 100,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | SANGAT TINGGI |
| | | Cakupan bina kelompok nelayan | Persen | 18,97 | | 12,00 | | 63,26 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | RENDAH |
| | | Laju Produksi perikanan kelompok nelayan | Persen | 3,32 | | 3,00 | | 90,36 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | SANGAT TINGGI |
| | | Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman | Persen | 76,85 | | 60,00 | | 78,07 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | TINGGI |
| | | Produksi Perikanan Tangkap | Persen | 3,50 | | 24,78 | | 708,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | MELAMPAUI |
| 3.25.04 | Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya | | | | 777.196.000 | | 31.490.000 | | 4,05 | Dinas Perikanan dan Peternakan | |
| | | Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya | Ton | 16.351,74 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | SANGAT RENDAH |
| | | Poduksi Ikan Konsumsi | Ton | 17.987,00 | | 54.115,00 | | 300,86 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | MELAMPAUI |
| | | Produksi Benih Ikan UPR | Ekor | 1.078.038.512,00 | | 572.800.000,00 | | 53,13 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | RENDAH |
| | | Produksi Benih Ikan BBI | Ekor | 8.100.000,00 | | 3.730.000,00 | | 46,05 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | SANGAT RENDAH |
| | | Produksi Ikan Hias | Ekor | 608.990,00 | | 271.690,00 | | 44,61 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | SANGAT RENDAH |
| | | Produksi Perikanan budidaya | Ton | 36,00 | | 25,42 | | 70,61 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | SEDANG |
| | | Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina | Persen | 100,00 | | 55,00 | | 55,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | RENDAH |
| 3.25.05 | Program : Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan | | | | 26.652.000 | | 12.626.000 | | 47,37 | Dinas Perikanan dan Peternakan | |
| | | Persentase Wilayah Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha | Dokumen | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Perikanan dan | SANGAT |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|----------------|--|---|----------|---|----|--|----|--|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Perikanan Budidaya yang diawasi | | | | | | | | Peternakan | RENDAH |
| | | Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 40,00 | | 40,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | SANGAT RENDAH |
| 3.25.06 | Program : Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | | | | | 245.623.200 | | 4.600.000 | 1,87 | Dinas Perikanan dan Peternakan | |
| | | Produksi Olahan Produk Perikanan | Ton | 400,00 | | 100,00 | | 25,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | SANGAT RENDAH |
| | | Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan | Kelompok | 14,00 | | 4,00 | | 28,57 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | SANGAT RENDAH |
| | | Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Unit | 130,00 | | 30,00 | | 23,08 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | SANGAT RENDAH |
| 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | 2.288.419.649 | | 671.852.200 | 63,35 | 33,03 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.27.02 | Program : Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | | | | | 1.113.688.149 | | 432.085.000 | 38,80 | Dinas Perikanan dan Peternakan | |
| | | Pertumbuhan Produksi Peternakan | Persen | 1,50 | | 0,90 | | 60,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | RENDAH |
| | | Cakupan Akseptor IB | Persen | 75,00 | | 45,00 | | 60,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | RENDAH |
| | | Persentase bibit ternak bersertifikat | Persen | 10,00 | | 6,00 | | 60,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | RENDAH |
| | | Persentase Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia | Persen | 2,00 | | 1,00 | | 50,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | SANGAT RENDAH |
| 3.27.03 | Program : Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | | 165.000.000 | | 86.128.000 | 52,20 | Dinas Perikanan dan Peternakan | |
| | | Persentase RPH sesuai standar | Persen | 100,00 | | 45,00 | | 45,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | SANGAT RENDAH |
| 3.27.04 | Program : Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | | 859.731.500 | | 111.371.200 | 12,95 | Dinas Perikanan dan Peternakan | |
| | | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | Persen | 0,00 | | <u>0,00</u> | | 100,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | SANGAT TINGGI |
| | | Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik | Persen | 70,00 | | 64,00 | | 91,43 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | SANGAT TINGGI |
| | | Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan | Kasus | 0,00 | | <u>0,00</u> | | 100,00 | | Dinas Perikanan dan | SANGAT TINGGI |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|------------------------------------|--|--|----------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Zoonosis (PHMSZ) | | | | | | | | Peternakan | |
| | | Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan | Lokasi | 17,00 | | 14,00 | | 82,35 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | TINGGI |
| | | Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak) | Ekor | 20.000,00 | | 12.280,00 | | 61,40 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | RENDAH |
| | | Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH) | Persen | 79,00 | | 42,85 | | 54,24 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | RENDAH |
| | | Produk Hasil Ternak Berupa Daging Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) | Ton | 828,00 | | 659,00 | | 79,59 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | TINGGI |
| | | Produk Hasil Ternak Berupa Telur Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) | Ton | 16,20 | | 8,10 | | 50,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | SANGAT RENDAH |
| | | Produk Hasil Ternak Berupa Susu Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) | Liter | 38,80 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | SANGAT RENDAH |
| 3.27.07 | Program : Penyuluhan Pertanian | | | | 150.000.000 | | 42.268.000 | 28,18 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | |
| | | Cakupan bina kelompok petani (peternakan) | Persen | 16,00 | | 9,00 | | 56,25 | | Dinas Perikanan dan Peternakan | RENDAH |
| 4.01.5.06.0.0 0.01.0000 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | 81.509.043.594 | | 28.257.265.098 | 39,11 | 28,16 | Sekretariat Daerah | SANGAT RENDAH |
| 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | 81.416.093.594 | | 28.257.265.098 | 39,11 | 28,16 | Sekretariat Daerah | |
| 4.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota / Program : Administrasi Umum | | | | 59.474.453.375 | | 24.254.573.630 | 40,78 | | Sekretariat Daerah | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | | A | | 100,00 | | Sekretariat Daerah | SANGAT TINGGI |
| | | Persentase analisis jabatan yang sudah dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 3,64 | | 3,64 | | Sekretariat Daerah | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase PD/Unit pelayanan publik yang melaksanakan penilaian survey kepuasan masyarakat | Persen | 100,00 | | 27,65 | | 27,65 | | Sekretariat Daerah | SANGAT RENDAH |
| 4.01.02 | Program : Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | | | | 16.954.410.174 | | 2.583.637.262 | 15,24 | | Sekretariat Daerah | |
| | | Rata-rata pencapaian SPM Kabupaten | Persen | 100,00 | | 10,00 | | 10,00 | | Sekretariat Daerah | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 11,02 | | 11,02 | | Sekretariat Daerah | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase produk hukum daerah yang dapat diakses secara online | Persen | 100,00 | | 90,00 | | 90,00 | | Sekretariat Daerah | TINGGI |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|------------------------------------|---|--|----------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|--------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Persentase kerja sama daerah yang berjalan efektif | Persen | 15,00 | | 10,00 | | 66,67 | | Sekretariat Daerah | SEDANG |
| 4.01.03 | Program : Perekonomian Dan Pembangunan | | | | 4.987.230.045 | | 1.419.054.206 | | 28,45 | Sekretariat Daerah | |
| | | Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 1,00 | | 1,00 | | Sekretariat Daerah | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 1,00 | | 1,00 | | Sekretariat Daerah | SANGAT RENDAH |
| | | Dokumen administrasi pembangunan daerah yang disusun | Dokumen | 8,00 | | 4,00 | | 50,00 | | Sekretariat Daerah | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama | Persen | 100,00 | | 89,00 | | 89,00 | | Sekretariat Daerah | TINGGI |
| | | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif | Persen | 100,00 | | 53,00 | | 53,00 | | Sekretariat Daerah | RENDAH |
| | | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | Persen | 55,00 | | 3,00 | | 5,45 | | Sekretariat Daerah | SANGAT RENDAH |
| 5.06 | PENGELOLAAN PERBATASAN | | | | 92.950.000 | | 0 | 0,00 | 0,00 | Sekretariat Daerah | |
| 5.06.02 | Program : Pengelolaan Perbatasan | | | | 92.950.000 | | 0 | 0,00 | 0,00 | Sekretariat Daerah | |
| | | Persentase tanda batas wilayah yang terpelihara | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Sekretariat Daerah | SANGAT RENDAH |
| 4.02.0.00.0.0 0.01.0000 | SEKRETARIAT DPRD | | | | 84.203.465.484 | | 48.907.805.277 | 40,94 | 57,88 | Sekretariat DPRD | SANGAT RENDAH |
| 4.02 | SEKRETARIAT DPRD | | | | 84.203.465.484 | | 48.907.805.277 | 40,94 | 57,88 | Sekretariat DPRD | |
| 4.02.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/ Program : Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota | | | | 48.758.540.268 | | 28.857.026.939 | | 59,18 | Sekretariat DPRD | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | | BB | | 114,29 | | Sekretariat DPRD | MELAMPAUI |
| | | Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang difasilitasi | Persen | 100,00 | | 59,18 | | 59,18 | | Sekretariat DPRD | RENDAH |
| 4.02.02 | Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | | | | 35.444.925.216 | | 20.050.778.338 | | 56,57 | Sekretariat DPRD | |
| | | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota (ada/tidak ada) | Dokumen | Ada | | 56,57 | | 0,00 | | Sekretariat DPRD | SANGAT RENDAH |
| | | Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (ada/tidak ada) | Dokumen | Ada | | 56,57 | | 0,00 | | Sekretariat DPRD | SANGAT RENDAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|------------------------------------|--|---|----------|---|-----------------------|--|----------------------|--|--------------|---|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD (ada/tidak ada) | Dokumen | Ada | | 56,57 | | 0,00 | | Sekretariat DPRD | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan | Persen | 100,00 | | 56,57 | | 56,57 | | Sekretariat DPRD | RENDAH |
| | | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 56,57 | | 56,57 | | Sekretariat DPRD | RENDAH |
| 5.01.5.05.0.0 0.01.0000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | 15.893.593.427 | | 6.168.601.238 | 48,17 | 40,94 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | SANGAT RENDAH |
| 5.01 | PERENCANAAN | | | | 15.044.843.427 | | 6.151.949.178 | 48,17 | 38,98 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | |
| 5.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 12.023.737.786 | | 5.021.776.276 | | 41,77 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | AA | | AA | | 100,00 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | SANGAT TINGGI |
| 5.01.02 | Program : Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | | | 1.483.605.641 | | 702.433.250 | | 47,35 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | |
| | | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak ada) | Dokumen | Ada | | Ada | | 100,00 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | SANGAT TINGGI |
| | | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (ada/tidak ada) | Dokumen | Ada | | Ada | | 100,00 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | SANGAT TINGGI |
| | | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (ada/tidak ada) | Dokumen | Ada | | Tidak Ada | | 0,00 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase tahapan perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | SANGAT RENDAH |
| | | Tersedianya dokumen profil pembangunan daerah (ada/tidak ada) | Dokumen | Ada | | Ada | | 100,00 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | SANGAT TINGGI |
| | | Capaian Kinerja RKPD | Persen | 89,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Badan Perencanaan | SANGAT |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|----------------------------|--|---|--------|---|-----------------|--|-----------------|--|-------|--|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | RENDAH |
| 5.01.03 | Program : Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | 1.537.500.000 | | 427.739.652 | | 27,82 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | |
| | | Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | Persen | 100,00 | | 30,32 | | 30,32 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam | Persen | 100,00 | | 7,47 | | 7,47 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan | Persen | 100,00 | | 43,89 | | 43,89 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | SANGAT RENDAH |
| 5.05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 848.750.000 | | 16.652.060 | 0,00 | 1,96 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | |
| 5.05.02 | Program : Penelitian Dan Pengembangan Daerah | | | | 848.750.000 | | 16.652.060 | | 1,96 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | |
| | | Persentase implementasi rencana kelitbangan | Persen | 10,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. | Persen | 42,55 | | 0,00 | | 0,00 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | SANGAT RENDAH |
| 5.02.0.00.0.0 0.01.0000 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | | 481.132.722.341 | | 178.828.184.346 | 105,60 | 24,37 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | MELAMPAUI |
| 5.02 | KEUANGAN | | | | 481.132.722.341 | | 178.828.184.346 | 105,60 | 24,37 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| 5.02.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 94.236.919.785 | | 19.994.158.001 | | 21,22 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|----------------|--|---|-------------|---|------------------------|--|------------------------|--|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | | A | | 100,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah | SANGAT TINGGI |
| 5.02.02 | Program : Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | 384.869.795.556 | | 158.617.866.095 | | 41,21 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| | | Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan | Persen | 15,00 | | 18,71 | | 124,73 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah | MELAMPAUI |
| | | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) | Persen | 85,00 | | 72,00 | | 84,71 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah | TINGGI |
| | | Opini Laporan Keuangan | Opini | WTP | | WTP | | 100,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah | SANGAT TINGGI |
| | | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | Persen | 75,54 | | 36,60 | | 48,45 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah | SANGAT RENDAH |
| | | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya | Persen | 2,13 | | 5,12 | | 240,38 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah | MELAMPAUI |
| | | Persentase SILPA terhadap APBD | Persen | 1,74 | | 5,07 | | 291,38 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah | MELAMPAUI |
| | | Persentase belanja pendidikan (20%) | Persen | 32,00 | | 26,38 | | 82,44 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah | TINGGI |
| | | Persentase belanja kesehatan (10%) | Persen | 21,00 | | 16,30 | | 77,62 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah | TINGGI |
| | | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa | Persen | 1,80 | | 1,66 | | 92,22 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah | SANGAT TINGGI |
| | | Penetapan APBD | Tepat Waktu | Tepat Waktu | | Tepat Waktu | | 100,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah | SANGAT TINGGI |
| | | Kesesuaian Dokumen Penganggaran | Skor | 6,00 | | 39,10 | | 651,67 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah | MELAMPAUI |
| | | Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD | Skor | 20,00 | | 20,00 | | 100,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah | SANGAT TINGGI |
| | | Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah | Skor | 8,00 | | 7,49 | | 93,63 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah | SANGAT TINGGI |
| | | Penyerapan Anggaran | Skor | 20,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah | SANGAT RENDAH |
| | | Kondisi Keuangan Daerah | Skor | 4,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah | SANGAT RENDAH |
| 5.02.03 | Program : Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | 2.026.007.000 | | 216.160.250 | | 10,67 | Badan Keuangan dan Aset | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|------------------------------------|--|---|----------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|--------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | Daerah | |
| | | Manajemen Aset : 1. Tersedianya daftar asset tetap 2. Tersedianya manual untuk menyusun daftar asset tetap 3. Tersedianya proses inventarisasi asset tahunan 4. Tersedianya nilai asset tercantum dalam laporan anggaran (ya/tidak) | Dokumen | Ya | | Ya | | 100,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah | SANGAT TINGGI |
| | | Persentase BMD yang dimanfaatkan optimal | Persen | 100,00 | | 59,00 | | 59,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah | RENDAH |
| | | Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat | Persen | 25,00 | | 33,20 | | 132,80 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah | MELAMPAUI |
| | | Persentase kesesuaian RKA-SKPD dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Persen | 70,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase pengolah BMD yang dibina | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase penyusutan/ penghapusan BMD | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah | SANGAT RENDAH |
| | | Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif | Indeks | Baik | | Cukup | | 66,67 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah | SEDANG |
| | | Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan | Indeks | Baik | | Cukup | | 66,67 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah | SEDANG |
| | | Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif | Indeks | Baik | | Cukup | | 66,67 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah | SEDANG |
| | | Administrasi BMD yang Andal | Indeks | Baik | | Cukup | | 66,67 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah | SEDANG |
| 5.02.0.00.0.0 0.02.0000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | | | | 34.824.748.125 | | 16.022.824.013 | 132,29 | 40,26 | Badan Pendapatan Daerah | MELAMPAUI |
| 5.02 | KEUANGAN | | | | 34.824.748.125 | | 16.022.824.013 | 132,29 | 40,26 | Badan Pendapatan Daerah | |
| 5.02.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 29.591.005.025 | | 14.345.981.764 | | 48,48 | Badan Pendapatan Daerah | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | | A | | 100,00 | | Badan Pendapatan Daerah | SANGAT TINGGI |
| 5.02.04 | Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 5.233.743.100 | | 1.676.842.249 | | 32,04 | Badan Pendapatan Daerah | |
| | | Rasio PAD | Persen | 0,83 | | 0,27 | | 32,53 | | Badan Pendapatan Daerah | SANGAT RENDAH |
| | | Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | Persen | 12,65 | | 71,33 | | 17,73 | | Badan Pendapatan Daerah | SANGAT RENDAH |
| | | Rasio Pajak daerah | Persen | 49,84 | | 69,90 | | 140,25 | | Badan Pendapatan Daerah | MELAMPAUI |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|------------------------------------|--|---|----------|---|-----------------------|--|----------------------|--|--------------|---|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Rasio retribusi daerah | Persen | 4,53 | | 26,26 | | 579,69 | | Badan Pendapatan Daerah | MELAMPAUI |
| | | Persentase capaian PAD | Persen | 88,95 | | 28,67 | | 32,23 | | Badan Pendapatan Daerah | SANGAT RENDAH |
| | | Rasio Ketertagihan Piutang Pajak Daerah | Persen | 9,50 | | 2,24 | | 23,58 | | Badan Pendapatan Daerah | SANGAT RENDAH |
| 5.03.5.04.0.0 0.01.0000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | 38.617.529.518 | | 9.012.859.735 | 149,85 | 32,33 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | MELAMPAUI |
| 5.03 | KEPEGAWAIAN | | | | 34.514.841.218 | | 8.685.779.735 | 89,85 | 24,36 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| 5.03.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 29.128.325.618 | | 7.436.337.680 | | 25,53 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | | A | | 100,00 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | SANGAT TINGGI |
| 5.03.02 | Program : Kepegawaian Daerah | | | | 5.386.515.600 | | 1.249.442.055 | | 23,20 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| | | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Persen | 80,88 | | 85,77 | | 106,05 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | MELAMPAUI |
| | | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Persen | 16,99 | | 18,97 | | 111,65 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | MELAMPAUI |
| | | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Persen | 49,80 | | 62,12 | | 124,74 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | MELAMPAUI |
| | | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah | Orang | 34,00 | | 29,00 | | 85,29 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | TINGGI |
| | | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah | Orang | 172,00 | | 171,00 | | 99,42 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | SANGAT TINGGI |
| | | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah | Orang | 504,00 | | 520,00 | | 103,17 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | MELAMPAUI |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|----------------------------|--|---|----------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|--------------|---|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai | Persen | 0,29 | | 0,13 | | 223,08 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | MELAMPAUI |
| | | Persentase Pemberhentian ASN | Persen | 5,73 | | 2,00 | | 34,90 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa | Persen | 2,15 | | 0,00 | | 0,00 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | SANGAT RENDAH |
| 5.04 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | 4.102.688.300 | | 327.080.000 | 60,00 | 7,97 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| 5.04.02 | Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | | 4.102.688.300 | | 327.080.000 | 60,00 | 7,97 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| | | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | Jam | 25,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | Persen | 1,00 | | 2,40 | | 240,00 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | MELAMPAUI |
| | | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | Persen | 51,01 | | 0,00 | | 0,00 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase ASN Yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis | Persen | 2,86 | | 0,00 | | 0,00 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | SANGAT RENDAH |
| 6.01.0.00.0.0 0.01.0000 | INSPEKTORAT | | | | 31.335.945.006 | | 13.598.425.004 | 50,34 | 36,35 | Inspektorat | RENDAH |
| 6.01 | INSPEKTORAT DAERAH | | | | 31.335.945.006 | | 13.598.425.004 | 50,34 | 36,35 | Inspektorat | |
| 6.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 26.861.965.006 | | 12.152.740.004 | 50,34 | 45,24 | Inspektorat | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | | A | | 100,00 | | Inspektorat | SANGAT TINGGI |
| 6.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pengawasan | | | | 3.047.950.000 | | 1.006.589.000 | 50,34 | 33,03 | Inspektorat | |
| | | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern | Level | 3,00 | | 3,00 | | 100,00 | | Inspektorat | SANGAT TINGGI |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|------------------------------------|--|--|------------------|---|----------------------|--|----------------------|--|--------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Pemerintah (APIP) | | | | | | | | | |
| | | Persentase tindak lanjut temuan | Persen | 80,00 | | 21,48 | | 26,86 | | Inspektorat | SANGAT RENDAH |
| | | Jumlah temuan BPK | Laporan | 10,00 | | 4,00 | | 40,00 | | Inspektorat | SANGAT RENDAH |
| | | Persentase rivi laporan/dokumen yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 85,50 | | 85,50 | | Inspektorat | TINGGI |
| 6.01.03 | Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | | | | 1.426.030.000 | | 439.096.000 | | 30,79 | Inspektorat | |
| | | Capaian MCP KPK | Persen | 81,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Inspektorat | SANGAT RENDAH |
| | | Jumlah PD yang sudah menerapkan Zone Integritas | Perangkat Daerah | 2,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Inspektorat | SANGAT RENDAH |
| 7.01.0.00.0.0 0.01.0000 | KECAMATAN JATILUHUR | | | | 3.577.340.893 | | 1.387.329.700 | 47,53 | 18,75 | Kecamatan Jatiluhur | SANGAT RENDAH |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | 3.577.340.893 | | 1.387.329.700 | 47,53 | 18,75 | Kecamatan Jatiluhur | |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3.366.107.293 | | 1.365.240.100 | | 40,56 | Kecamatan Jatiluhur | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | | BB | | 100,00 | | Kecamatan Jatiluhur | SANGAT TINGGI |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | 111.771.000 | | 0 | | 0,00 | Kecamatan Jatiluhur | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | | Sangat Baik | | 113,25 | | Kecamatan Jatiluhur | MELAMPAUI |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | 30.704.600 | | 22.089.600 | | 71,94 | Kecamatan Jatiluhur | |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 71,94 | | 71,94 | | Kecamatan Jatiluhur | SEDANG |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | 5.213.000 | | 0 | | 0,00 | Kecamatan Jatiluhur | |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Jatiluhur | SANGAT RENDAH |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 50.300.000 | | 0 | | 0,00 | Kecamatan Jatiluhur | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Jatiluhur | SANGAT RENDAH |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 13.245.000 | | 0 | | 0,00 | Kecamatan Jatiluhur | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Jatiluhur | SANGAT RENDAH |
| 7.01.0.00.0.0 | KECAMATAN SUKASARI | | | | 3.441.332.071 | | 1.479.182.389 | 35,42 | 12,65 | Kecamatan Sukasari | SANGAT |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|----------------------------|---|--|----------|---|---------------|--|---------------|--|-------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.02.0000 | | | | | | | | | | | RENDAH |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | 3.441.332.071 | | 1.479.182.389 | 35,42 | 12,65 | Kecamatan Sukasari | |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3.229.146.471 | | 1.465.710.789 | | 45,39 | Kecamatan Sukasari | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | | B | | 100,00 | | Kecamatan Sukasari | SANGAT TINGGI |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | 100.000.000 | | 0 | | 0,00 | Kecamatan Sukasari | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | | Baik | | 100,00 | | Kecamatan Sukasari | SANGAT TINGGI |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | 5.851.000 | | 0 | | 0,00 | Kecamatan Sukasari | |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Sukasari | SANGAT RENDAH |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | 3.721.000 | | 0 | | 0,00 | Kecamatan Sukasari | |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Sukasari | SANGAT RENDAH |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 58.480.000 | | 0 | | 0,00 | Kecamatan Sukasari | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Sukasari | SANGAT RENDAH |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 44.133.600 | | 13.471.600 | | 30,52 | Kecamatan Sukasari | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 12,50 | | 12,50 | | Kecamatan Sukasari | SANGAT RENDAH |
| 7.01.0.00.0.0 0.03.0000 | KECAMATAN MANIIS | | | | 3.218.289.234 | | 1.466.382.861 | 53,71 | 16,31 | Kecamatan Maniis | RENDAH |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | 3.218.289.234 | | 1.466.382.861 | 53,71 | 16,31 | Kecamatan Maniis | |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 2.969.189.734 | | 1.445.975.861 | | 48,70 | Kecamatan Maniis | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | | BB | | 114,29 | | Kecamatan Maniis | MELAMPAUI |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | 123.655.000 | | 0 | | 0,00 | Kecamatan Maniis | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | | Baik | | 100,00 | | Kecamatan Maniis | SANGAT TINGGI |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | 31.030.000 | | 8.925.000 | | 28,76 | Kecamatan Maniis | |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Maniis | SANGAT RENDAH |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | 6.820.000 | | 0 | | 0,00 | Kecamatan Maniis | |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Maniis | SANGAT |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|----------------------------|---|--|----------|---|---------------|--|---------------|--|-------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | RENDAH |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 56.247.000 | | 11.482.000 | | 20,41 | Kecamatan Maniis | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 8,00 | | 8,00 | | Kecamatan Maniis | SANGAT RENDAH |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 31.347.500 | | 0 | | 0,00 | Kecamatan Maniis | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | Kecamatan Maniis | SANGAT TINGGI |
| 7.01.0.00.0.0 0.04.0000 | KECAMATAN TEGALWARU | | | | 3.565.987.728 | | 1.321.533.631 | 46,38 | 23,14 | Kecamatan Tegalwaru | SANGAT RENDAH |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | 3.565.987.728 | | 1.321.533.631 | 46,38 | 23,14 | Kecamatan Tegalwaru | |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3.258.001.828 | | 1.263.301.731 | | 38,78 | Kecamatan Tegalwaru | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | | BB | | 100,00 | | Kecamatan Tegalwaru | SANGAT TINGGI |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | 135.128.000 | | 13.811.000 | | 10,22 | Kecamatan Tegalwaru | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | | Sangat Baik | | 113,25 | | Kecamatan Tegalwaru | MELAMPAUI |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | 43.313.900 | | 23.767.900 | | 54,87 | Kecamatan Tegalwaru | |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 20,00 | | 20,00 | | Kecamatan Tegalwaru | SANGAT RENDAH |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | 12.161.000 | | 0 | | 0,00 | Kecamatan Tegalwaru | |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Tegalwaru | SANGAT RENDAH |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 68.459.000 | | 12.396.000 | | 18,11 | Kecamatan Tegalwaru | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 25,00 | | 25,00 | | Kecamatan Tegalwaru | SANGAT RENDAH |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 48.924.000 | | 8.257.000 | | 16,88 | Kecamatan Tegalwaru | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 20,00 | | 20,00 | | Kecamatan Tegalwaru | SANGAT RENDAH |
| 7.01.0.00.0.0 0.05.0000 | KECAMATAN PLERED | | | | 3.755.398.442 | | 1.631.351.666 | 40,48 | 18,83 | Kecamatan Plered | SANGAT RENDAH |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | 3.755.398.442 | | 1.631.351.666 | 40,48 | 18,83 | Kecamatan Plered | |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3.567.095.586 | | 1.608.723.766 | | 45,10 | Kecamatan Plered | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|------------------------------------|--|--|----------|---|----------------------|--|----------------------|--|--------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | | CC | | 75,00 | | Kecamatan Plered | SEDANG |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | 107.274.956 | | 0 | 0,00 | | Kecamatan Plered | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | | Baik | | 100,00 | | Kecamatan Plered | SANGAT TINGGI |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | 33.327.900 | | 22.627.900 | 67,89 | | Kecamatan Plered | |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 67,89 | | 67,89 | | Kecamatan Plered | SEDANG |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | 2.000.000 | | 0 | 0,00 | | Kecamatan Plered | |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Plered | SANGAT RENDAH |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 35.700.000 | | 0 | 0,00 | | Kecamatan Plered | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Plered | SANGAT RENDAH |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 10.000.000 | | 0 | 0,00 | | Kecamatan Plered | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Plered | SANGAT RENDAH |
| 7.01.0.00.0.0 0.06.0000 | KECAMATAN SUKATANI | | | | 4.128.546.775 | | 1.648.184.740 | 53,33 | 20,64 | Kecamatan Sukatani | RENDAH |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | 4.128.546.775 | | 1.648.184.740 | 53,33 | 20,64 | Kecamatan Sukatani | |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3.918.982.151 | | 1.625.913.740 | 41,49 | | Kecamatan Sukatani | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | | A | | 100,00 | | Kecamatan Sukatani | SANGAT TINGGI |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | 116.410.000 | | 6.390.000 | 5,49 | | Kecamatan Sukatani | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | | Baik | | 100,00 | | Kecamatan Sukatani | SANGAT TINGGI |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | 13.000.000 | | 0 | 0,00 | | Kecamatan Sukatani | |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Sukatani | SANGAT RENDAH |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | 5.500.000 | | 0 | 0,00 | | Kecamatan Sukatani | |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Sukatani | SANGAT RENDAH |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 54.000.000 | | 0 | 0,00 | | Kecamatan Sukatani | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan | Persen | 100,00 | | 40,00 | | 40,00 | | Kecamatan Sukatani | SANGAT |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|----------------------------|---|--|----------|---|---------------|--|---------------|--|-------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | | | | | | | | | RENDAH |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 20.654.624 | | 15.881.000 | | 76,89 | Kecamatan Sukatani | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 80,00 | | 80,00 | | Kecamatan Sukatani | TINGGI |
| 7.01.0.00.0.0 0.07.0000 | KECAMATAN DARANGDAN | | | | 4.354.038.999 | | 964.026.330 | 38,54 | 21,21 | Kecamatan Darangdan | SANGAT RENDAH |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | 4.354.038.999 | | 964.026.330 | 38,54 | 21,21 | Kecamatan Darangdan | |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3.621.703.099 | | 807.182.430 | | 22,29 | Kecamatan Darangdan | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | | BB | | 100,00 | | Kecamatan Darangdan | SANGAT TINGGI |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | 513.398.000 | | 133.334.000 | | 25,97 | Kecamatan Darangdan | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | | Sangat Baik | | 113,25 | | Kecamatan Darangdan | MELAMPAUI |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | 25.826.000 | | 3.115.000 | | 12,06 | Kecamatan Darangdan | |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Darangdan | SANGAT RENDAH |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | 19.843.000 | | 2.140.000 | | 10,78 | Kecamatan Darangdan | |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Darangdan | SANGAT RENDAH |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 140.758.000 | | 0 | | 0,00 | Kecamatan Darangdan | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Darangdan | SANGAT RENDAH |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 32.510.900 | | 18.254.900 | | 56,15 | Kecamatan Darangdan | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 18,00 | | 18,00 | | Kecamatan Darangdan | SANGAT RENDAH |
| 7.01.0.00.0.0 0.08.0000 | KECAMATAN BOJONG | | | | 4.260.383.744 | | 1.424.412.882 | 68,75 | 21,26 | Kecamatan Bojong | SEDANG |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | 4.260.383.744 | | 1.424.412.882 | 68,75 | 21,26 | Kecamatan Bojong | |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3.603.706.744 | | 1.388.544.882 | | 38,53 | Kecamatan Bojong | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | | A | | 112,50 | | Kecamatan Bojong | MELAMPAUI |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | 509.313.000 | | 0 | | 0,00 | Kecamatan Bojong | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | | Baik | | 100,00 | | Kecamatan Bojong | SANGAT TINGGI |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|----------------------------|---|--|----------|---|---------------|--|---------------|--|-------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.01.03 | Program : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 8.020.000 | | 0 | | 0,00 | Kecamatan Bojong | |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 50,00 | | 50,00 | | Kecamatan Bojong | SANGAT RENDAH |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | 9.450.000 | | 0 | | 0,00 | Kecamatan Bojong | |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | | 50,00 | | 50,00 | | Kecamatan Bojong | SANGAT RENDAH |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 97.860.000 | | 10.920.000 | | 11,16 | Kecamatan Bojong | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 50,00 | | 50,00 | | Kecamatan Bojong | SANGAT RENDAH |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 32.034.000 | | 24.948.000 | | 77,88 | Kecamatan Bojong | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 50,00 | | 50,00 | | Kecamatan Bojong | SANGAT RENDAH |
| 7.01.0.00.0.0 0.09.0000 | KECAMATAN WANAYASA | | | | 4.090.618.856 | | 1.738.464.024 | 38,54 | 19,23 | Kecamatan Wanayasa | SANGAT RENDAH |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | 4.090.618.856 | | 1.738.464.024 | 38,54 | 19,23 | Kecamatan Wanayasa | |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3.880.023.856 | | 1.709.585.024 | | 44,06 | Kecamatan Wanayasa | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | | BB | | 100,00 | | Kecamatan Wanayasa | SANGAT TINGGI |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | 112.600.000 | | 10.150.000 | | 9,01 | Kecamatan Wanayasa | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | | Baik | | 100,00 | | Kecamatan Wanayasa | SANGAT TINGGI |
| 7.01.03 | Program : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 4.905.000 | | 0 | | 0,00 | Kecamatan Wanayasa | |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Wanayasa | SANGAT RENDAH |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | 3.360.000 | | 840.000 | | 25,00 | Kecamatan Wanayasa | |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Wanayasa | SANGAT RENDAH |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 41.777.000 | | 0 | | 0,00 | Kecamatan Wanayasa | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Wanayasa | SANGAT RENDAH |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 47.953.000 | | 17.889.000 | | 37,31 | Kecamatan Wanayasa | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 31,25 | | 31,25 | | Kecamatan Wanayasa | SANGAT RENDAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|----------------------------|---|--|----------|---|---------------|--|---------------|--|-------|----------------------|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.01.0.00.0.0 0.10.0000 | KECAMATAN KIARAPEDES | | | | 3.682.603.115 | | 994.505.568 | 66,67 | 51,68 | Kecamatan Kiarapedes | SEDANG |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | 3.682.603.115 | | 994.505.568 | 66,67 | 51,68 | Kecamatan Kiarapedes | |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3.523.251.115 | | 923.523.568 | | 26,21 | Kecamatan Kiarapedes | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Kiarapedes | SANGAT RENDAH |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | 105.000.000 | | 43.560.000 | | 41,49 | Kecamatan Kiarapedes | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Kiarapedes | SANGAT RENDAH |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | 4.750.000 | | 2.980.000 | | 62,74 | Kecamatan Kiarapedes | |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | Kecamatan Kiarapedes | SANGAT TINGGI |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | 5.054.000 | | 4.304.000 | | 85,16 | Kecamatan Kiarapedes | |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | Kecamatan Kiarapedes | SANGAT TINGGI |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 35.033.000 | | 15.308.000 | | 43,70 | Kecamatan Kiarapedes | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | Kecamatan Kiarapedes | SANGAT TINGGI |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 9.515.000 | | 4.830.000 | | 50,76 | Kecamatan Kiarapedes | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | Kecamatan Kiarapedes | SANGAT TINGGI |
| 7.01.0.00.0.0 0.11.0000 | KECAMATAN PASAWAHAN | | | | 3.356.929.910 | | 1.420.143.864 | 62,90 | 20,04 | Kecamatan Pasawahan | RENDAH |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | 3.356.929.910 | | 1.420.143.864 | 62,90 | 20,04 | Kecamatan Pasawahan | |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3.129.704.910 | | 1.340.960.364 | | 42,85 | Kecamatan Pasawahan | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | | BB | | 100,00 | | Kecamatan Pasawahan | SANGAT TINGGI |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | 0 | | 0 | | 0,00 | Kecamatan Pasawahan | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | | Baik | | 100,00 | | Kecamatan Pasawahan | SANGAT TINGGI |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | 150.173.000 | | 40.173.000 | | 26,75 | Kecamatan Pasawahan | |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 26,75 | | 26,75 | | Kecamatan Pasawahan | SANGAT RENDAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|----------------------------|---|--|----------|---|----------------|--|----------------|--|-------|-----------------------|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | 0 | | 0 | | 0,00 | Kecamatan Pasawahan | |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | | 50,00 | | 50,00 | | Kecamatan Pasawahan | SANGAT RENDAH |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 0 | | 0 | | 0,00 | Kecamatan Pasawahan | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 50,00 | | 50,00 | | Kecamatan Pasawahan | SANGAT RENDAH |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 77.052.000 | | 39.010.500 | | 50,63 | Kecamatan Pasawahan | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 50,62 | | 50,62 | | Kecamatan Pasawahan | RENDAH |
| 7.01.0.00.0.0 0.12.0000 | KECAMATAN PONDOKSALAM | | | | 3.633.417.407 | | 749.802.774 | 26,77 | 24,03 | Kecamatan Pondoksalam | SANGAT RENDAH |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | 3.633.417.407 | | 749.802.774 | 26,77 | 24,03 | Kecamatan Pondoksalam | |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3.343.715.807 | | 703.681.174 | | 21,04 | Kecamatan Pondoksalam | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | | B | | 100,00 | | Kecamatan Pondoksalam | SANGAT TINGGI |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | 100.000.000 | | 0 | | 0,00 | Kecamatan Pondoksalam | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Pondoksalam | SANGAT RENDAH |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | 21.300.000 | | 10.650.000 | | 50,00 | Kecamatan Pondoksalam | |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 50,00 | | 50,00 | | Kecamatan Pondoksalam | SANGAT RENDAH |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | 10.650.000 | | 0 | | 0,00 | Kecamatan Pondoksalam | |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Pondoksalam | SANGAT RENDAH |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 133.990.000 | | 22.000.000 | | 16,42 | Kecamatan Pondoksalam | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 10,60 | | 10,60 | | Kecamatan Pondoksalam | SANGAT RENDAH |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 23.761.600 | | 13.471.600 | | 56,69 | Kecamatan Pondoksalam | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Pondoksalam | SANGAT RENDAH |
| 7.01.0.00.0.0 0.13.0000 | KECAMATAN PURWAKARTA | | | | 26.365.021.962 | | 10.422.283.650 | 71,65 | 14,04 | Kecamatan Purwakarta | SEDANG |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|----------------------------|---|--|----------|---|----------------|--|----------------|--|-------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | 26.365.021.962 | | 10.422.283.650 | 71,65 | 14,04 | Kecamatan Purwakarta | |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 16.917.700.944 | | 6.975.370.550 | | 41,23 | Kecamatan Purwakarta | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | | BB | | 100,00 | | Kecamatan Purwakarta | SANGAT TINGGI |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | 610.712.018 | | 10.520.000 | | 1,72 | Kecamatan Purwakarta | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | | Sangat Baik | | 113,25 | | Kecamatan Purwakarta | MELAMPAUI |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | 8.663.849.000 | | 3.435.393.100 | | 39,65 | Kecamatan Purwakarta | |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 50,00 | | 50,00 | | Kecamatan Purwakarta | SANGAT RENDAH |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | 87.500.000 | | 0 | | 0,00 | Kecamatan Purwakarta | |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | Kecamatan Purwakarta | SANGAT TINGGI |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 60.260.000 | | 1.000.000 | | 1,66 | Kecamatan Purwakarta | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 33,33 | | 33,33 | | Kecamatan Purwakarta | SANGAT RENDAH |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 25.000.000 | | 0 | | 0,00 | Kecamatan Purwakarta | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 33,33 | | 33,33 | | Kecamatan Purwakarta | SANGAT RENDAH |
| 7.01.0.00.0.0 0.14.0000 | KECAMATAN BABAKAN CIKAO | | | | 3.460.825.015 | | 1.716.779.277 | 46,24 | 20,97 | Kecamatan Babakan Cikao | SANGAT RENDAH |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | 3.460.825.015 | | 1.716.779.277 | 46,24 | 20,97 | Kecamatan Babakan Cikao | |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3.211.825.015 | | 1.686.126.277 | | 52,50 | Kecamatan Babakan Cikao | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | | BB | | 100,00 | | Kecamatan Babakan Cikao | SANGAT TINGGI |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | 125.000.000 | | 11.401.000 | | 9,12 | Kecamatan Babakan Cikao | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | | Sangat Baik | | 113,25 | | Kecamatan Babakan Cikao | MELAMPAUI |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | 30.000.000 | | 19.252.000 | | 64,17 | Kecamatan Babakan Cikao | |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 64,17 | | 64,17 | | Kecamatan Babakan Cikao | RENDAH |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | 10.000.000 | | 0 | | 0,00 | Kecamatan Babakan Cikao | |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Babakan Cikao | SANGAT RENDAH |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 80.000.000 | | 0 | | 0,00 | Kecamatan Babakan Cikao | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|----------------------------|---|--|----------|---|---------------|--|---------------|--|-------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Babakan Cikao | SANGAT RENDAH |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 4.000.000 | | 0 | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Babakan Cikao | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Babakan Cikao | SANGAT RENDAH |
| 7.01.0.00.0.0 0.15.0000 | KECAMATAN CAMPAKA | | | | 3.573.750.107 | | 1.500.936.192 | 54,88 | 27,73 | Kecamatan Campaka | RENDAH |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | 3.573.750.107 | | 1.500.936.192 | 54,88 | 27,73 | Kecamatan Campaka | |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3.307.839.207 | | 1.450.618.292 | | 43,85 | Kecamatan Campaka | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | | BB | | 114,29 | | Kecamatan Campaka | MELAMPAUI |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | 118.960.000 | | 15.090.000 | | 12,68 | Kecamatan Campaka | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | | Baik | | 100,00 | | Kecamatan Campaka | SANGAT TINGGI |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | 21.529.000 | | 0 | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Campaka | |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Campaka | SANGAT RENDAH |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | 14.260.000 | | 4.260.000 | | 29,87 | Kecamatan Campaka | |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | | 25,00 | | 25,00 | | Kecamatan Campaka | SANGAT RENDAH |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 77.394.000 | | 7.050.000 | | 9,11 | Kecamatan Campaka | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 40,00 | | 40,00 | | Kecamatan Campaka | SANGAT RENDAH |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 33.767.900 | | 23.917.900 | | 70,83 | Kecamatan Campaka | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 50,00 | | 50,00 | | Kecamatan Campaka | SANGAT RENDAH |
| 7.01.0.00.0.0 0.16.0000 | KECAMATAN CIBATU | | | | 4.124.682.803 | | 1.731.271.901 | 28,57 | 19,77 | Kecamatan Cibatu | SANGAT RENDAH |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | 4.124.682.803 | | 1.731.271.901 | 28,57 | 19,77 | Kecamatan Cibatu | |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3.805.153.507 | | 1.716.561.901 | | 45,11 | Kecamatan Cibatu | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | | C | | 71,43 | | Kecamatan Cibatu | SEDANG |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | 182.478.500 | | 0 | | 0,00 | Kecamatan Cibatu | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|------------------------------------|--|--|----------|---|----------------------|--|----------------------|--|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Cibatu | SANGAT RENDAH |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | 0 | | 0 | 0,00 | | Kecamatan Cibatu | |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Cibatu | SANGAT RENDAH |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | 0 | | 0 | 0,00 | | Kecamatan Cibatu | |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Cibatu | SANGAT RENDAH |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 117.040.796 | | 0 | 0,00 | | Kecamatan Cibatu | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Cibatu | SANGAT RENDAH |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 20.010.000 | | 14.710.000 | | 73,51 | Kecamatan Cibatu | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | Kecamatan Cibatu | SANGAT TINGGI |
| 7.01.0.00.0.0 0.17.0000 | KECAMATAN BUNGURSARI | | | | 3.418.969.154 | | 1.404.621.279 | 37,50 | 22,03 | Kecamatan Bungursari | SANGAT RENDAH |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | 3.418.969.154 | | 1.404.621.279 | 37,50 | 22,03 | Kecamatan Bungursari | |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3.220.260.154 | | 1.384.797.279 | 43,00 | | Kecamatan Bungursari | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | | BB | | 100,00 | | Kecamatan Bungursari | SANGAT TINGGI |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | 16.012.000 | | 11.812.000 | | 73,77 | Kecamatan Bungursari | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | | Baik | | 100,00 | | Kecamatan Bungursari | SANGAT TINGGI |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | 112.849.000 | | 0 | 0,00 | | Kecamatan Bungursari | |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Bungursari | SANGAT RENDAH |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | 10.650.000 | | 0 | 0,00 | | Kecamatan Bungursari | |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Bungursari | SANGAT RENDAH |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 52.040.000 | | 8.012.000 | | 15,40 | Kecamatan Bungursari | |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 25,00 | | 25,00 | | Kecamatan Bungursari | SANGAT RENDAH |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 7.158.000 | | 0 | 0,00 | | Kecamatan Bungursari | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|------------------------------------|---|--|----------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|--------------|--|-----------------------------|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kecamatan Bungursari | SANGAT RENDAH |
| 8.01.0.00.0.0 0.02.0000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | 51.578.977.434 | | 32.380.192.175 | 32,12 | 26,86 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | SANGAT RENDAH |
| 8.01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | 51.578.977.434 | | 32.380.192.175 | 32,12 | 26,86 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 8.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3.915.105.934 | | 1.422.810.675 | | 36,34 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | | A | | 100,00 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | SANGAT TINGGI |
| 8.01.02 | Program : Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | | | | 928.764.900 | | 87.396.000 | | 9,41 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | Tingkat peserta pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Persen | 100,00 | | 9,40 | | 9,40 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | SANGAT RENDAH |
| 8.01.03 | Program : Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | | | | 44.960.114.200 | | 30.300.000.000 | | 67,39 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes) | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | SANGAT RENDAH |
| | | Tingkat peserta pembinaan kegiatan politik | Persen | 100,00 | | 67,39 | | 67,39 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | SEDANG |
| 8.01.04 | Program : Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | | 224.920.000 | | 0 | | 0,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | Persentase Ormas yang menyampaikan laporan kegiatan | Persen | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | SANGAT RENDAH |
| 8.01.05 | Program : Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | | | | 180.965.900 | | 13.339.500 | | 7,37 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | Tingkat peserta pembinaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | | 7,37 | | 7,37 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | SANGAT RENDAH |
| 8.01.06 | Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | | | | 1.369.106.500 | | 556.646.000 | | 40,66 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | | 40,65 | | 40,65 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | SANGAT RENDAH |

Sumber : Laporan Monev Triwulan II Tahun 2024

2.2. Evaluasi RKPD Tahun 2024 terhadap RPD

Evaluasi terhadap hasil capaian kinerja diatas, diperoleh data bahwa terdapat 715 indikator program tahun 2024 sampai triwulan 2, dan sesuai dengan Permendagri 86/2017 bahwa evaluasi penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dihitung menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam Tabel T-E.1. Adapun evaluasi capaian kinerja indikator program sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Indikator Program
Tahun 2024 Triwulan 2

| NO. | INTERVAL NILAI KINERJA | KRITERIA KINERJA | JUMLAH |
|---------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | $\leq 50\%$ | SANGAT RENDAH | 410 |
| 2 | $51\% \leq 65\%$ | RENDAH | 48 |
| 3 | $66\% \leq 75\%$ | SEDANG | 26 |
| 4 | $76\% \leq 90\%$ | TINGGI | 38 |
| 5 | $91\% \leq 100\%$ | SANGAT TINGGI | 121 |
| 6 | $> 100\%$ | MELAMPAUI | 72 |
| JUMLAH | | | 715 |

Sumber : Laporan Monev Triwulan II Tahun 2024

Tabel 2.3

Rekap Capaian Kinerja dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan 2 per Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|---|---|---|--|--|--------------|--|-----------------------------|
| | | Rp | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH | | 2.709.858.394.270 | 1.013.013.265.627 | 47,76 | 37,38 | Kabupaten Purwakarta | SANGAT RENDAH |
| 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 714.756.181.859 | 275.445.170.120 | 89,58 | 14,55 | Dinas Pendidikan | TINGGI |
| 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 237.686.073.189 | 45.645.114.136 | 67,65 | 21,34 | Dinas Kesehatan | SEDANG |
| 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 204.061.620.297 | 100.011.539.441 | 96,21 | 12,61 | RSUD Bayu Asih | SANGAT TINGGI |
| 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 175.965.176.236 | 58.895.509.491 | 28,86 | 23,37 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | SANGAT RENDAH |
| 2.10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | SANGAT RENDAH |
| 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 36.375.849.657 | 5.943.534.910 | 55,81 | 15,42 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | RENDAH |
| 1.04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 63.156.879.235 | 21.650.692.684 | 72,38 | 21,51 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | SEDANG |
| 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 22.946.468.066 | 10.951.771.053 | 52,00 | 41,28 | Satuan Polisi Pamong Praja | RENDAH |
| 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 6.640.356.796 | 2.078.682.833 | 58,40 | 26,63 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | RENDAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|------|---|---|--|--|-------|---|-----------------------------|
| | | Rp | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 16.890.749.232 | 6.969.923.366 | 83,78 | 34,62 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | TINGGI |
| 1.06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 10.814.055.851 | 3.736.432.044 | 26,35 | 19,84 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SANGAT RENDAH |
| 2.08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 817.718.500 | 139.379.000 | 22,66 | 8,63 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SANGAT RENDAH |
| 2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 13.269.756.576 | 4.710.837.416 | 18,57 | 35,75 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | SANGAT RENDAH |
| 3.32 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | 425.000.000 | 40.524.000 | 20,00 | 36,07 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | SANGAT RENDAH |
| 2.09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 19.672.193.717 | 7.355.233.330 | 30,50 | 20,35 | Dinas Pangan dan Pertanian | SANGAT RENDAH |
| 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 9.340.000.000 | 696.684.000 | 24,99 | 24,72 | Dinas Pangan dan Pertanian | SANGAT RENDAH |
| 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 44.771.469.821 | 18.745.808.896 | 55,40 | 21,43 | Dinas Lingkungan Hidup | RENDAH |
| 2.12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 19.247.960.689 | 9.283.898.059 | 93,95 | 47,03 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | SANGAT TINGGI |
| 2.13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 22.283.734.005 | 7.372.804.965 | 86,04 | 28,01 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | TINGGI |
| 2.14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 23.266.501.469 | 3.573.133.760 | 32,77 | 12,20 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SANGAT RENDAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|------|--|---|--|--|-------|---|-----------------------------|
| | | Rp | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 43.862.873.684 | 19.157.079.165 | 123,27 | 30,68 | Dinas Perhubungan | MELAMPAUI |
| 2.16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 24.733.120.106 | 5.138.052.890 | 28,98 | 19,38 | Dinas Komunikasi dan Informatika | SANGAT RENDAH |
| 2.20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | 912.250.000 | 130.325.000 | 17,94 | 14,29 | Dinas Komunikasi dan Informatika | SANGAT RENDAH |
| 2.21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | 1.203.862.000 | 238.532.500 | 26,35 | 19,81 | Dinas Komunikasi dan Informatika | SANGAT RENDAH |
| 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 17.124.200.678 | 7.044.574.749 | 21,63 | 14,33 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | SANGAT RENDAH |
| 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 952.772.800 | 273.118.800 | 35,20 | 22,02 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | SANGAT RENDAH |
| 3.31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 1.049.913.000 | 451.664.000 | 46,50 | 34,42 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | SANGAT RENDAH |
| 2.18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 14.699.308.112 | 6.350.358.801 | 77,13 | 23,31 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | TINGGI |
| 2.19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 25.076.955.312 | 10.898.246.701 | 46,25 | 33,06 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| 2.22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 1.551.250.000 | 414.740.000 | 10,41 | 6,76 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| 3.26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 2.002.500.000 | 701.691.000 | 32,71 | 38,96 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | SANGAT RENDAH |
| 2.23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG | 11.964.565.976 | 4.802.649.191 | 9,38 | 24,11 | Dinas Kearsipan dan | SANGAT RENDAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|------|--|---|--|--|-------|--|-----------------------------|
| | | Rp | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | PERPUSTAKAAN | | | | | Perpustakaan | |
| 2.24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | 461.627.000 | 199.664.744 | 22,80 | 21,63 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | SANGAT RENDAH |
| 3.25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 14.482.869.614 | 7.116.672.768 | 98,61 | 23,24 | Dinas Perikanan dan Peternakan | SANGAT TINGGI |
| 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 2.288.419.649 | 671.852.200 | 63,35 | 33,03 | Dinas Perikanan dan Peternakan | RENDAH |
| 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | 81.416.093.594 | 28.257.265.098 | 39,11 | 28,16 | Sekretariat Daerah | SANGAT RENDAH |
| 5.06 | PENGLOLAAN PERBATASAN | 92.950.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | Sekretariat Daerah | SANGAT RENDAH |
| 4.02 | SEKRETARIAT DPRD | 84.203.465.484 | 48.907.805.277 | 40,94 | 57,88 | Sekretariat DPRD | SANGAT RENDAH |
| 5.01 | PERENCANAAN | 15.044.843.427 | 6.151.949.178 | 48,17 | 38,98 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | SANGAT RENDAH |
| 5.05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 848.750.000 | 16.652.060 | 0,00 | 1,96 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | SANGAT RENDAH |
| 5.02 | KEUANGAN | 481.132.722.341 | 178.828.184.346 | 105,60 | 24,37 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | MELAMPAUI |
| 5.02 | KEUANGAN | 34.824.748.125 | 16.022.824.013 | 132,29 | 40,26 | Badan Pendapatan Daerah | MELAMPAUI |
| 5.03 | KEPEGAWAIAN | 34.514.841.218 | 8.685.779.735 | 89,85 | 24,36 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | TINGGI |
| 5.04 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 4.102.688.300 | 327.080.000 | 60,00 | 7,97 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | RENDAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | Perangkat Daerah | Predikat Kinerja Tahun 2024 |
|------|--|---|--|--|-------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | Rp | Rp | Kinerja | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.01 | INSPEKTORAT DAERAH | 31.335.945.006 | 13.598.425.004 | 50,34 | 36,35 | Inspektorat | RENDAH |
| 7.01 | KECAMATAN | 3.577.340.893 | 1.387.329.700 | 47,53 | 18,75 | Kecamatan Jatiluhur | SANGAT RENDAH |
| 7.01 | KECAMATAN | 3.441.332.071 | 1.479.182.389 | 35,42 | 12,65 | Kecamatan Sukasari | SANGAT RENDAH |
| 7.01 | KECAMATAN | 3.218.289.234 | 1.466.382.861 | 53,71 | 16,31 | Kecamatan Maniis | RENDAH |
| 7.01 | KECAMATAN | 3.565.987.728 | 1.321.533.631 | 46,38 | 23,14 | Kecamatan Tegalwaru | SANGAT RENDAH |
| 7.01 | KECAMATAN | 3.755.398.442 | 1.631.351.666 | 40,48 | 18,83 | Kecamatan Plered | SANGAT RENDAH |
| 7.01 | KECAMATAN | 4.128.546.775 | 1.648.184.740 | 53,33 | 20,64 | Kecamatan Sukatani | RENDAH |
| 7.01 | KECAMATAN | 4.354.038.999 | 964.026.330 | 38,54 | 21,21 | Kecamatan Darangdan | SANGAT RENDAH |
| 7.01 | KECAMATAN | 4.260.383.744 | 1.424.412.882 | 68,75 | 21,26 | Kecamatan Bojong | SEDANG |
| 7.01 | KECAMATAN | 4.090.618.856 | 1.738.464.024 | 38,54 | 19,23 | Kecamatan Wanayasa | SANGAT RENDAH |
| 7.01 | KECAMATAN | 3.682.603.115 | 994.505.568 | 66,67 | 51,68 | Kecamatan Kiarapedes | SEDANG |
| 7.01 | KECAMATAN | 3.356.929.910 | 1.420.143.864 | 62,90 | 20,04 | Kecamatan Pasawahan | RENDAH |
| 7.01 | KECAMATAN | 3.633.417.407 | 749.802.774 | 26,77 | 24,03 | Kecamatan Pondoksalam | SANGAT RENDAH |
| 7.01 | KECAMATAN | 26.365.021.962 | 10.422.283.650 | 71,65 | 14,04 | Kecamatan Purwakarta | SEDANG |
| 7.01 | KECAMATAN | 3.460.825.015 | 1.716.779.277 | 46,24 | 20,97 | Kecamatan Babakan Cikao | SANGAT RENDAH |
| 7.01 | KECAMATAN | 3.573.750.107 | 1.500.936.192 | 54,88 | 27,73 | Kecamatan Campaka | RENDAH |
| 7.01 | KECAMATAN | 4.124.682.803 | 1.731.271.901 | 28,57 | 19,77 | Kecamatan Cibatu | SANGAT RENDAH |
| 7.01 | KECAMATAN | 3.418.969.154 | 1.404.621.279 | 37,50 | 22,03 | Kecamatan Bungursari | SANGAT RENDAH |
| 8.01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 51.578.977.434 | 32.380.192.175 | 32,12 | 26,86 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | SANGAT RENDAH |

Sumber : Laporan Monev Triwulan II Tahun 2024

2.3. Permasalahan Pelaksanaan Program Triwulan II Tahun 2024

Permasalahan pelaksanaan program pada triwulan II tahun 2024 antara lain:

1. Adanya penerimaan dana transfer dari pusat dan daerah provinsi Jawa Barat yang harus dilakukan penyesuaian pergeseran anggaran pada program, kegiatan dan subkegiatan yang berkenaan;
2. Adanya kegiatan dan subkegiatan yang output dan target belum berkesesuaian;
3. Masih terdapatnya pelaksanaan kegiatan/subkegiatan yang kurang mendongkrak dalam pencapaian target kinerja indikator program;
4. Terbatasnya SDM pelaksana kegiatan/subkegiatan di perangkat daerah, sehingga pelaksanaan kegiatan/subkegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan;
5. Adanya kebijakan nasional yang harus ditindaklanjuti, sehingga berdampak pada penundaan pelaksanaan sebagian kegiatan/subkegiatan, termasuk persiapan penyaluran hibah pelaksanaan pilkada serentak;
6. Masih terdapatnya sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai, sehingga menghambat dalam pelaksanaan kegiatan/subkegiatan;

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah:

1. Penyesuaian pagu anggaran pada program, kegiatan dan subkegiatan yang berkenaan;
2. Mengevaluasi kembali output kegiatan/subkegiatan yang kurang sesuai dengan capaian target kerjanya;
3. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan/subkegiatan yang mendukung pada pencapaian prioritas pembangunan daerah dan pencapaian target kinerja program perangkat daerah;
4. Peningkatan kapasitas aparatur teknis pelaksana kegiatan/subkegiatan;
5. Penyesuaian kembali pelaksanaan kegiatan/subkegiatan agar selaras dengan kebijakan nasional;
6. Memprioritaskan pada pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan guna menunjang dalam pelaksanaan kegiatan dinas;

Pencapaian Penerapan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, sampai dengan Triwulan II

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM di Kabupaten Purwakarta tahun 2024 pada triwulan II, sudah dilakukan secara optimal namun masih terdapat beberapa indikator capaian SPM yang harus di dorong dan didukung baik dari aspek anggaran maupun SDM pelaksanaannya. Adapun Hasil Capaian SPM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 triwulan II dapat dilihat dari Tabel dibawah ini :

Tabel 2.4

Hasil Capaian SPM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Triwulan II

| NO | NAMA BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN | CAPAIAN SPM |
|-----------|--|--------------------|
| 1 | PENDIDIKAN | 77,43 |
| 2 | KESEHATAN | 32,47 |
| 3 | PEKERJAAN UMUM | 0,12 |
| 4 | PERUMAHAN RAKYAT | 8,50 |
| 5 | TRANTIBUMLINMAS | 63,17 |
| 6 | SOSIAL | 91,00 |
| | KAB. PURWAKARTA | 45,45 % |

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Pada tahun ini, Kabupaten Purwakarta mencatat capaian Sistem Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (SPM) yang bervariasi di beberapa bidang urusan pemerintahan. Bidang Pendidikan menunjukkan capaian tertinggi dengan skor 77,43, mengindikasikan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Di sektor Kesehatan, capaian SPM mencapai 32,47, menunjukkan upaya untuk memperbaiki pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Namun demikian, terdapat bidang lain seperti Pekerjaan Umum yang masih menunjukkan capaian yang rendah, hanya mencapai 0,12. Begitu pula dengan Perumahan Rakyat yang mencatatkan capaian 8,50, menandakan perlunya

peningkatan upaya dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat. Di bidang Trantibumlinmas, capaian SPM mencapai 63,17, menunjukkan fokus pada penegakan tata tertib dan ketertiban masyarakat.

Bidang Sosial mencatatkan capaian tertinggi sebesar 91,00, mencerminkan upaya besar dalam mendukung kesejahteraan sosial masyarakat Purwakarta. Secara keseluruhan, Kabupaten Purwakarta berhasil mencapai capaian SPM sebesar 45,45%, menunjukkan komitmen dan usaha yang berkelanjutan dalam memajukan berbagai sektor pelayanan publik untuk kesejahteraan bersama.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah merupakan rumusan kebijakan yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan ekonomi di wilayahnya. Tujuan utama dari arah kebijakan ini adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan ekonomi di daerah tersebut.

Prinsip-prinsip dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah, antara lain : 1). Berbasis Potensi Daerah, yaitu bahwa kebijakan ekonomi daerah harus disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi pariwisata. 2). Berkelanjutan, yaitu bahwa kebijakan ekonomi daerah harus memperhatikan aspek keberlanjutan, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. 3). Inklusif, yaitu bahwa kebijakan ekonomi daerah harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dirasakan oleh semua pihak. dan 4). Terintegrasi, yaitu bahwa kebijakan ekonomi daerah harus terintegrasi dengan kebijakan ekonomi nasional dan kebijakan sektoral lainnya.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2024 mempertimbangkan hasil capaian realisasi indikator makro pembangunan tahun 2023 serta proyeksi pertumbuhan ekonomi di akhir tahun 2024. Adapun capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023 diantaranya sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional/daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu

tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses penambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik.

Pertumbuhan Ekonomi (PE) menggambarkan besarnya peningkatan produksi yang terjadi dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang telah berlangsung di Kabupaten Purwakarta dalam periode waktu tertentu. Sebagaimana diketahui, perkembangan perekonomian Kabupaten Purwakarta tidak lepas dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional secara umum. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta mengalami perlambatan di banding tahun-tahun sebelumnya, apalagi pada tahun 2020 saat pandemi covid-19 melanda yang membuat perekonomian dunia, nasional dan daerah baik provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Purwakarta mengakibatkan laju perekonomian tersebut meranggak turun sangat signifikan pada angka -2,13 persen. Namun demikian pada tahun 2021 dan 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta beranjak mulai naik kembali ke angka 3,42 persen dan 5,24 persen. Namun di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan ke angka 4,97 persen.

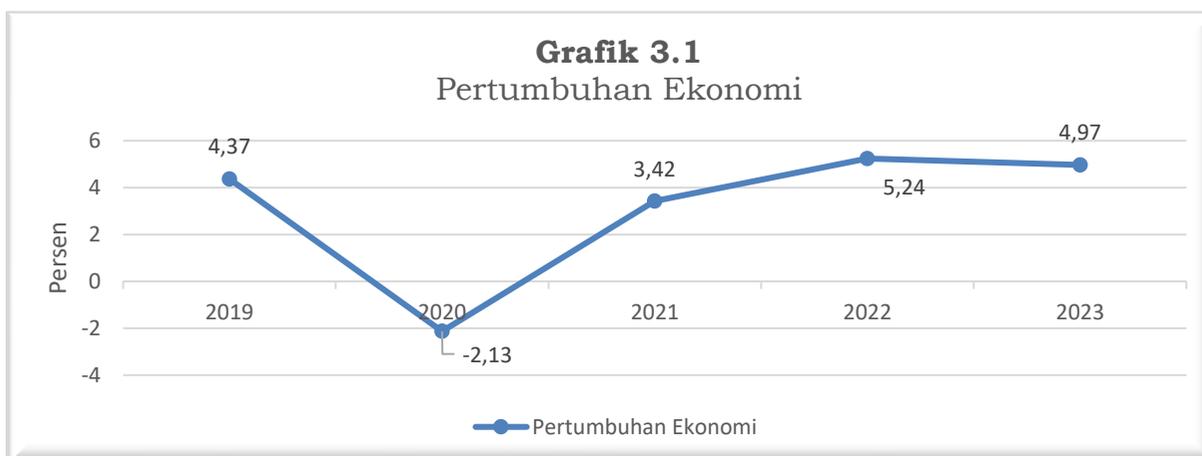
Adapun data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta dari tahun 2019-2023, dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 3.1

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023

| Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 4,37 | -2,13 | 3,42 | 5,24 | 4,97 |

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

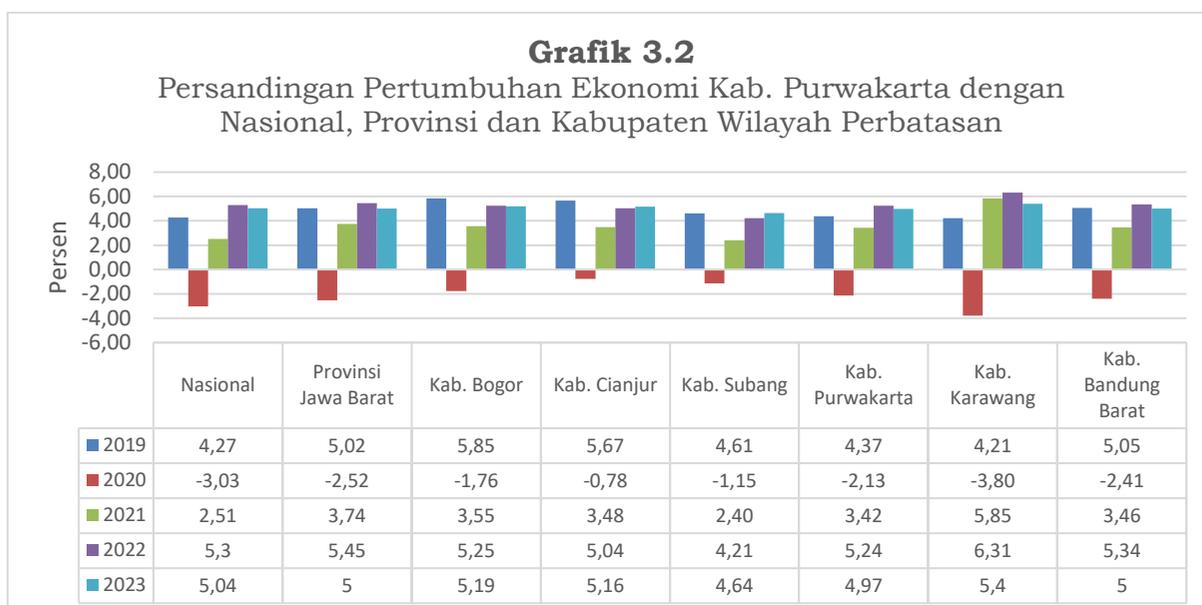
Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada pada wilayah perbatasan dengan Kab. Purwakarta, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.2

Persandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi dan Kab./Kota di Wilayah Perbatasan Tahun 2019-2023

| No. | Pertumbuhan Ekonomi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|---------------------|------|-------|------|------|------|
| 1 | Nasional | 4,27 | -3,03 | 2,51 | 5,30 | 5,04 |
| 2 | Provinsi Jawa Barat | 5,02 | -2,52 | 3,74 | 5,45 | 5,00 |
| 3 | Kab. Bogor | 5,85 | -1,76 | 3,55 | 5,25 | 5,19 |
| 4 | Kab. Cianjur | 5,67 | -0,78 | 3,48 | 5,04 | 5,16 |
| 5 | Kab. Subang | 4,61 | -1,15 | 2,40 | 4,21 | 4,64 |
| 6 | Kab. Purwakarta | 4,37 | -2,13 | 3,42 | 5,24 | 4,97 |
| 7 | Kab. Karawang | 4,21 | -3,80 | 5,85 | 6,31 | 5,40 |
| 8 | Kab. Bandung Barat | 5,05 | -2,41 | 3,46 | 5,34 | 5,00 |

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Kab. Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta sangat fluktuatif, dengan pertumbuhan positif di 2019, 2021, 2022, dan 2023, dan pertumbuhan negatif di 2020. Pertumbuhan di 2023 (4,97%) lebih rendah dibandingkan 2022 (5,24%). Penurunan terdalam terjadi di 2020 (-2,13%) akibat pandemi Covid-19. Namun demikian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta menunjukkan tren pemulihan setelah pandemi Covid-19 di 2020.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Purwakarta, sektor utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purwakarta adalah Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu fokus pada pengembangan sektor-sektor tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

b. Produk Domestik Regional Bruto

Penghitungan statistik neraca nasional mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dikenal sebagai Sistem Neraca Nasional (SNN). SNN adalah rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu bentuk adaptasi

pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi PBB yang tertuang dalam Sistem Neraca Nasional 2008 (SNA 2008).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, ini dapat dilihat dari nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam daerah tersebut. Total dari nilai tambah tersebut dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

PDB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010.

Ada dua cara perhitungan PDRB, yaitu PDRB menurut harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n- 1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, ini dapat dilihat dari nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam daerah tersebut. Total dari

nilai tambah tersebut dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berbeda dengan perhitungan PDRB sebelumnya, dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010.

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta dari tahun 2019-2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2019-2023

| LAPANGAN USAHA | | TAHUN | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2.720,79 | 2.726,05 | 2.770,71 | 2.870,50 | 2.901,24 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 31,59 | 30,91 | 33,49 | 33,2 | 33,46 |
| C | Industri Pengolahan | 26.974,84 | 26.205,23 | 27.126,57 | 28.876,61 | 30.483,68 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 279,6 | 274,22 | 306,12 | 314,04 | 323,39 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 13,15 | 14,84 | 16,27 | 16,64 | 16,98 |
| F | Konstruksi | 3.247,02 | 3.081,79 | 3.243,27 | 3.293,70 | 3.411,33 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5.665,63 | 5.393,40 | 5.506,10 | 5.717,88 | 5.914,43 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 1.060,28 | 1.029,85 | 1.037,98 | 1.091,34 | 1.199,83 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 574,21 | 556,41 | 561,28 | 595,94 | 636,99 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 988,61 | 1.265,58 | 1.345,83 | 1.406,78 | 1.508,61 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1.046,73 | 1.053,51 | 1.125,29 | 1.124,97 | 1.155,96 |
| L | Real Estat | 636,8 | 638,17 | 698,51 | 736,1 | 778,06 |
| M, N | Jasa Perusahaan | 214,89 | 202,6 | 219,43 | 240,03 | 255,32 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 522,5 | 499,32 | 488,12 | 480,35 | 487,99 |
| P | Jasa Pendidikan | 1.005,91 | 1.065,31 | 1.080,25 | 1.103,42 | 1.148,60 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 227,64 | 225,61 | 240,38 | 251,87 | 265,39 |
| R, S, T, U | Jasa lainnya | 1.068,02 | 1.030,44 | 1.040,55 | 1.139,61 | 1.219,24 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | | 46.278,21 | 45.293,24 | 46.840,15 | 49.292,98 | 51.740,50 |

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Tabel 3.4

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah), Tahun 2019-2023

| LAPANGAN USAHA | | TAHUN | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 4.582,19 | 4.650,21 | 4.650,04 | 5.026,60 | 5.332,31 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 43,44 | 43,07 | 47,94 | 49,2 | 50,85 |
| C | Industri Pengolahan | 38.714,75 | 38.224,62 | 40.769,59 | 44.549,33 | 47.918,05 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 450,52 | 441,74 | 502,83 | 520,9 | 540,61 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 21,73 | 24,63 | 27,16 | 28,08 | 28,89 |
| F | Konstruksi | 5.166,05 | 4.926,75 | 5.342,72 | 5.640,50 | 6.044,31 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 8.122,54 | 7.828,29 | 8.048,88 | 8.492,28 | 8.985,27 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 1.687,67 | 1.669,51 | 1.720,99 | 1.892,07 | 2.217,11 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 762,19 | 745,1 | 778,21 | 855,08 | 947,81 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 968,79 | 1.241,29 | 1.293,62 | 1.314,43 | 1.409,73 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1.675,07 | 1.680,88 | 1.824,62 | 1.982,94 | 2.080,86 |

| LAPANGAN USAHA | | TAHUN | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| L | Real Estat | 867,31 | 875,85 | 961,5 | 1.024,64 | 1.091,60 |
| M, N | Jasa Perusahaan | 327,99 | 316,27 | 343,89 | 380,77 | 420,49 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 903,63 | 868,07 | 856,85 | 841,98 | 864,88 |
| P | Jasa Pendidikan | 1.521,95 | 1.651,87 | 1.715,10 | 1.782,21 | 1.891,94 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 333,17 | 337,35 | 363,37 | 386,03 | 418,48 |
| R, S, T, U | Jasa lainnya | 1.560,51 | 1.526,09 | 1.530,92 | 1.710,50 | 1.886,06 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | | 67.709,51 | 67.051,58 | 70.778,25 | 76.477,55 | 82.129,26 |

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Tabel 3.5

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019-2023

| LAPANGAN USAHA | | TAHUN | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2,15 | 0,19 | 1,64 | 3,6 | 1,07 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | -0,08 | -2,13 | 8,32 | -0,85 | 0,77 |
| C | Industri Pengolahan | 3,09 | -2,85 | 3,52 | 6,45 | 5,57 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 5,28 | -1,92 | 11,63 | 2,58 | 2,98 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 4,74 | 12,8 | 9,63 | 2,31 | 2,04 |
| F | Konstruksi | 5,88 | -5,09 | 5,24 | 1,55 | 3,57 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 7,52 | -4,8 | 2,09 | 3,85 | 3,44 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 6,48 | -2,87 | 0,79 | 5,14 | 9,94 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 7,65 | -3,1 | 0,88 | 6,17 | 6,89 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 9,67 | 28,02 | 6,34 | 4,53 | 7,24 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 4,01 | 0,65 | 6,81 | -0,03 | 2,76 |
| L | Real Estat | 9,3 | 0,22 | 9,46 | 5,38 | 5,7 |
| M, N | Jasa Perusahaan | 9,23 | -5,72 | 8,31 | 9,39 | 6,37 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 5,24 | -4,44 | -2,24 | -1,59 | 1,59 |
| P | Jasa Pendidikan | 5,24 | 5,9 | 1,4 | 2,14 | 4,09 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 8,38 | -0,89 | 6,54 | 4,78 | 5,37 |
| R, S, T, U | Jasa lainnya | 8,09 | -3,52 | 0,98 | 9,52 | 6,99 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | | 4,37 | -2,13 | 3,42 | 5,24 | 4,97 |

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Tabel 3.6

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023

| LAPANGAN USAHA | | TAHUN | | | | |
|----------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 6,77 | 6,94 | 6,57 | 6,57 | 6,49 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
| C | Industri Pengolahan | 57,18 | 57,01 | 57,6 | 58,25 | 58,34 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,67 | 0,66 | 0,71 | 0,68 | 0,66 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| F | Konstruksi | 7,63 | 7,35 | 7,55 | 7,38 | 7,36 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 12 | 11,68 | 11,37 | 11,1 | 10,94 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 2,49 | 2,49 | 2,43 | 2,47 | 2,7 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,13 | 1,11 | 1,1 | 1,12 | 1,15 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 1,43 | 1,85 | 1,83 | 1,72 | 1,72 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,47 | 2,51 | 2,58 | 2,59 | 2,53 |
| L | Real Estat | 1,28 | 1,31 | 1,36 | 1,34 | 1,33 |
| M, N | Jasa Perusahaan | 0,48 | 0,47 | 0,49 | 0,5 | 0,51 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,33 | 1,29 | 1,21 | 1,1 | 1,05 |

| LAPANGAN USAHA | | TAHUN | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| P | Jasa Pendidikan | 2,25 | 2,46 | 2,42 | 2,33 | 2,3 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,49 | 0,5 | 0,51 | 0,5 | 0,51 |
| R, S, T, U | Jasa lainnya | 2,3 | 2,28 | 2,16 | 2,24 | 2,3 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Adapun ringkasan data capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta secara garis besar dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) | 46.278,21 | 45.293,24 | 46.840,15 | 49.292,98 | 51.740,50 |
| 2. | Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) | 67.709,51 | 67.051,58 | 70.778,25 | 76.477,55 | 82.129,26 |
| 3. | Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) | 4,37 | -2,13 | 3,42 | 5,24 | 4,97 |
| 4. | Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Purwakarta mengalami fluktuasi selama periode 2019-2023. Pada tahun 2020, terjadi penurunan PDRB sebesar -2,13% akibat pandemi COVID-19. PDRB mulai menunjukkan pemulihan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,42%. Pertumbuhan PDRB terus meningkat pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing sebesar 5,24% dan 4,97%.

PDRB atas dasar harga berlaku mengalami Tren serupa dengan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2020, terjadi penurunan PDRB sebesar 1,91%. PDRB mulai menunjukkan pemulihan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 5,22%. Pertumbuhan PDRB terus meningkat pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing sebesar 8,13% dan 7,54%.

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan

fluktuasi selama periode 2019-2023. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2022 (5,24%), dan Laju pertumbuhan PDRB terendah terjadi pada tahun 2020 (-2,13%).

Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan bahwa sektor terbesar dalam perekonomian Kabupaten Purwakarta adalah Industri Pengolahan (26,33% pada tahun 2023). Sektor lain yang juga memiliki kontribusi besar adalah Perdagangan Besar dan Eceran (18,83%) dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (12,27%). Dengan demikian, Sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah sektor terbesar dalam perekonomian Kabupaten Purwakarta.

Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada wilayah perbatasan dengan Kab. Purwakarta, maka dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta dengan Kab./Kota di wilayah perbatasan Tahun 2019-2023

| Uraian | Kabupaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) | Kab. Purwakarta | 46.278,21 | 45.293,24 | 46.840,15 | 49.292,98 | 51.740,50 |
| | Kab. Karawang | 163.732,48 | 157.849,53 | 166.941,49 | 177.470,89 | 187.051,65 |
| | Kab. Subang | 28.672,90 | 28.344,32 | 28.960,89 | 30.202,58 | 31.604,98 |
| | Kab. Bandung Barat | 31.398,35 | 30.640,41 | 31.701,79 | 33.393,29 | 35.062,19 |
| | Kab. Cianjur | 32.039,32 | 31.790,76 | 32.897,52 | 34.556,40 | 36.339,55 |
| | Kab. Bogor | 156.876,01 | 154.113,60 | 159.589,55 | 167.966,18 | 176.683,58 |
| Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) | Kab. Purwakarta | 67.709,51 | 67.051,58 | 70.778,25 | 76.477,55 | 82.129,26 |
| | Kab. Karawang | 230.021,38 | 225.063,63 | 243.713,20 | 268.228,79 | 290.916,32 |
| | Kab. Subang | 40.790,68 | 40.148,32 | 42.292,91 | 46.160,40 | 49.692,22 |
| | Kab. Bandung Barat | 47.180,08 | 46.478,90 | 48.764,31 | 52.921,29 | 56.945,18 |
| | Kab. Cianjur | 46.957,85 | 47.528,97 | 50.137,65 | 53.988,97 | 58.391,22 |
| | Kab. Bogor | 237.227,08 | 235.887,26 | 248.892,48 | 267.743,69 | 289.106,15 |
| Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) | Kab. Purwakarta | 4,37 | -2,13 | 3,42 | 5,24 | 4,97 |
| | Kab. Karawang | 4,21 | -3,8 | 5,85 | 6,31 | 5,4 |
| | Kab. Subang | 4,61 | -1,15 | 2,4 | 4,21 | 4,64 |
| | Kab. Bandung Barat | 5,05 | -2,41 | 3,46 | 5,34 | 5 |
| | Kab. Cianjur | 5,67 | -0,78 | 3,48 | 5,04 | 5,16 |
| | Kab. Bogor | 5,85 | -1,76 | 3,55 | 5,25 | 5,19 |

| Uraian | Kabupaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) | Kab. Purwakarta | 3,16 | 3,16 | 3,15 | 3,13 | 3,11 |
| | Kab. Karawang | 10,73 | 10,54 | 10,86 | 10,96 | 11 |
| | Kab. Subang | 1,9 | 1,89 | 1,88 | 1,89 | 1,88 |
| | Kab. Bandung Barat | 2,2 | 2,19 | 2,17 | 2,16 | 2,15 |
| | Kab. Cianjur | 2,19 | 2,24 | 2,23 | 2,21 | 2,21 |
| | Kab. Bogor | 11,06 | 11,12 | 11,09 | 10,94 | 10,93 |

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

c. Inflasi

Dalam ekonomi, inflasi memiliki pengertian suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinyu). Dengan kata lain, inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Inflasi merupakan proses suatu peristiwa dan bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Inflasi merupakan gejala kenaikan harga umum yang terjadi pada suatu wilayah, hal ini dipengaruhi oleh harga barang dan jasa serta kebijakan pemerintah.

Dengan kata lain, Inflasi merupakan dinamika harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Berdampak langsung terhadap daya beli dan biaya hidup masyarakat, perubahan nilai asset/kewajiban serta nilai kontrak/transaksi bisnis. Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

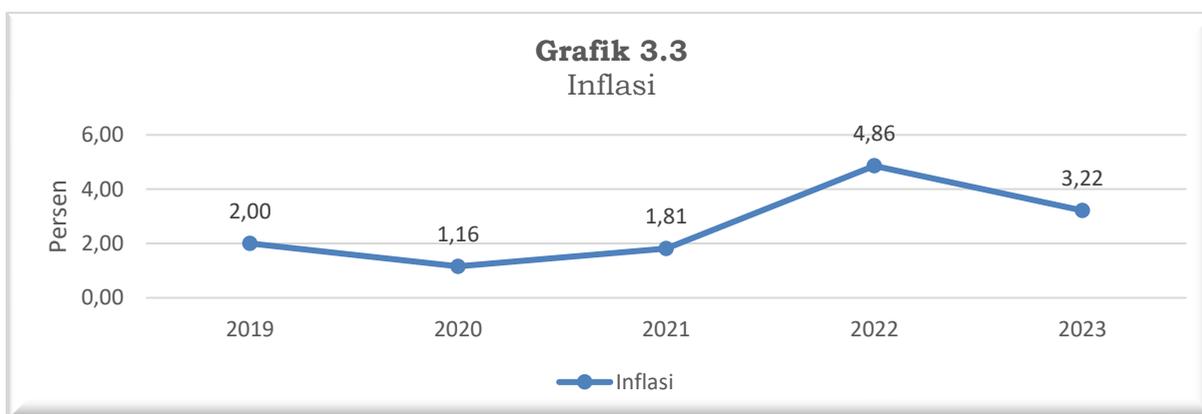
Pengukuran inflasi bisa dilakukan dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen atau dengan menggunakan deflator PDRB. Perkembangan inflasi sebagaimana yang tercermin pada nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan, menunjukkan adanya bentuk keseimbangan antara permintaan (demand) dengan penyediaan (supply). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, Inflasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 mengacu pada pengukuran di Kota Cirebon sebagai *sister city* yang dapat digunakan sebagai acuan pengukuran inflasi Kabupaten Purwakarta, dimana dapat dilihat sesuai daftar tabel dan grafik berikut ini :

Tabel 3.9

Inflasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023

| Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|--------|------|------|------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Inflasi | Persen | 2,00 | 1,16 | 1,81 | 4,86 | 3,22 |

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Inflasi di Kabupaten Purwakarta menunjukkan data fluktuasi selama periode 2019-2023. Inflasi terendah terjadi pada tahun 2020 (1,16%) dan Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 (4,86%). Inflasi pada tahun 2023 (3,22%) lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 dan 2021, tetapi lebih rendah dibandingkan tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus berupaya merumuskan kebijakan dan program yang tepat sasaran untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga di daerahnya.

Faktor-faktor yang mendorong inflasi di Kabupaten Purwakarta antara lain; Harga bahan makanan merupakan salah satu faktor utama yang mendorong inflasi di Kabupaten Purwakarta. Fluktuasi harga bahan makanan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti cuaca, musim, dan pasokan. Kemudian harga barang dan jasa lainnya, seperti transportasi, perumahan, dan pendidikan juga dapat mendorong inflasi. Selain itu kebijakan pemerintah, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL), juga dapat mendorong inflasi.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi, antara lain; dengan mengadakan operasi pasar secara rutin untuk menyediakan bahan makanan pokok dengan harga yang lebih murah kepada masyarakat. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara rutin mengadakan rapat untuk membahas perkembangan inflasi dan merumuskan kebijakan pengendalian inflasi. Kerjasama dengan distributor untuk menjaga kelancaran pasokan dan stabilitas harga bahan makanan. kemudian Pemerintah Kabupaten Purwakarta juga mengembangkan program ketahanan pangan untuk meningkatkan produksi dan ketersediaan bahan

makanan.

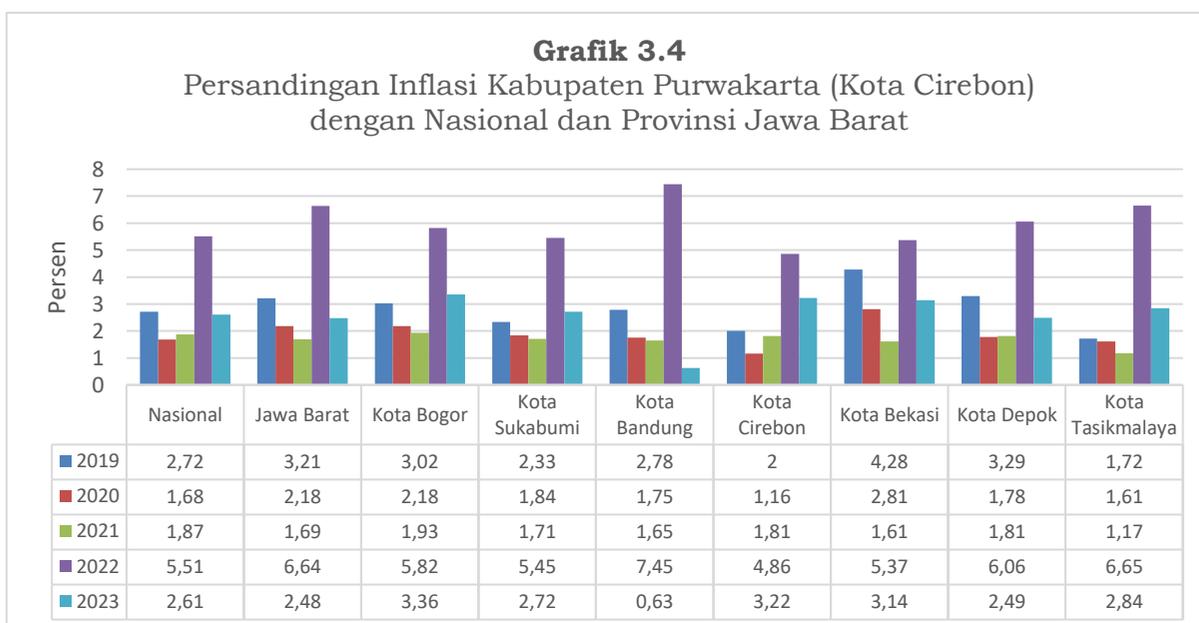
Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada pada wilayah Jawa Barat, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.10

Persandingan Inflasi Kabupaten Purwakarta (Kota Cirebon) dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

| No. | Inflasi (persen) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Nasional | 2,72 | 1,68 | 1,87 | 5,51 | 2,61 |
| 2 | Jawa Barat | 3,21 | 2,18 | 1,69 | 6,64 | 2,48 |
| 3 | Kota Bogor | 3,02 | 2,18 | 1,93 | 5,82 | 3,36 |
| 4 | Kota Sukabumi | 2,33 | 1,84 | 1,71 | 5,45 | 2,72 |
| 5 | Kota Bandung | 2,78 | 1,75 | 1,65 | 7,45 | 0,63 |
| 6 | Kota Cirebon | 2,00 | 1,16 | 1,81 | 4,86 | 3,22 |
| 7 | Kota Bekasi | 4,28 | 2,81 | 1,61 | 5,37 | 3,14 |
| 8 | Kota Depok | 3,29 | 1,78 | 1,81 | 6,06 | 2,49 |
| 9 | Kota Tasikmalaya | 1,72 | 1,61 | 1,17 | 6,65 | 2,84 |

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

d. Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Kemiskinan menurut pengertian umum adalah keadaan dimana individu atau sekelompok masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan yang layak.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Purwakarta dari tahun 2019-2023 sebagaimana tertuang dalam tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 3.11

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

| Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tingkat Kemiskinan | Persen | 7,48 | 8,27 | 8,83 | 8,7 | 8,46 |
| Jumlah Penduduk Miskin | Ribu Jiwa | 71,86 | 80,17 | 84,27 | 83,44 | 81,54 |

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Tabel 3.12

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

| NO. | URAIAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|------------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 1. | Jumlah Penduduk (ribu jiwa) | 950,10 | 997,87 | 1.011,47 | 1.028,57 | 1.037,07 |
| 2. | Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) | 71,86 | 80,17 | 84,27 | 83,44 | 81,54 |
| 3. | Persentase Penduduk Miskin | 7,48 | 8,27 | 8,83 | 8,70 | 8,46 |
| 4. | Garis Kemiskinan (Rp/Kap/ Bulan) | 367.273 | 378.287 | 387.754 | 403.663 | 434.187 |

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Tabel 3.13

Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten di Wilayah Perbatasan Tahun 2019-2023

| Uraian | Kabupaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jumlah Penduduk (ribu jiwa) | Kab. Purwakarta | 950,10 | 997,87 | 1.011,47 | 1.028,57 | 1.037,07 |
| | Kab. Karawang | 2.353,92 | 2.439,09 | 2.468,58 | 2.505,25 | 2.526,00 |
| | Kab. Subang | 1.595,83 | 1.595,32 | 1.608,59 | 1.624,39 | 1.649,82 |
| | Kab. Bandung Barat | 1.699,90 | 1.788,34 | 1.814,23 | 1.846,97 | 1.859,64 |
| | Kab. Cianjur | 2.263,07 | 2.477,56 | 2.506,68 | 2.542,79 | 2.558,14 |
| | Kab. Bogor | 5.965,41 | 5.427,07 | 5.489,54 | 5.566,84 | 5.627,02 |
| | Prov. Jawa Barat | 49.316,7 | 48.274,2 | 48.782,4 | 49.405,81 | 49.860,33 |
| | Nasional | 268.074,6 | 270.203,9 | 272.682,5 | 275.773,8 | 278.696,2 |
| Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) | Kab. Purwakarta | 71,86 | 80,17 | 84,27 | 83,44 | 81,54 |
| | Kab. Karawang | 171,721 | 195,410 | 210,780 | 199,910 | 187,23 |
| | Kab. Subang | 127,460 | 149,810 | 158,970 | 155,340 | 152,33 |
| | Kab. Bandung Barat | 163,437 | 179,460 | 190,770 | 183,670 | 179,43 |
| | Kab. Cianjur | 209,751 | 234,470 | 260,020 | 246,810 | 240,06 |
| | Kab. Bogor | 395,000 | 465,670 | 491,240 | 474,740 | 453,76 |
| | Prov. Jawa Barat | 3.399,16 | 3.920,23 | 4.195,34 | 4.070,98 | 3.888,60 |
| | Nasional | 25.144,72 | 26.424,02 | 27.542,77 | 26.161,16 | 25.898,55 |

| Uraian | Kabupaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Persentase Penduduk Miskin (persen) | Kab. Purwakarta | 7,48 | 8,27 | 8,83 | 8,70 | 8,46 |
| | Kab. Karawang | 7,39 | 8,26 | 8,95 | 8,44 | 7,87 |
| | Kab. Subang | 8,12 | 9,31 | 10,03 | 9,75 | 9,52 |
| | Kab. Bandung Barat | 9,38 | 10,49 | 11,30 | 10,82 | 10,52 |
| | Kab. Cianjur | 9,15 | 10,36 | 11,18 | 10,55 | 10,22 |
| | Kab. Bogor | 6,66 | 7,69 | 8,13 | 7,73 | 7,27 |
| | Prov. Jawa Barat | 6,91 | 7,88 | 8,40 | 8,06 | 7,62 |
| | Nasional | 9,41 | 9,78 | 10,14 | 9,54 | 9,36 |
| Garis Kemiskinan (Rp/Kap/ Bulan) | Kab. Purwakarta | 367.273 | 378.287 | 387.754 | 403.663 | 434.187 |
| | Kab. Karawang | 440.347 | 466.152 | 496.201 | 521.158 | 555.889 |
| | Kab. Subang | 339.607 | 351.885 | 360.691 | 372.308 | 404.320 |
| | Kab. Bandung Barat | 341.307 | 362.212 | 374.470 | 393.956 | 426.355 |
| | Kab. Cianjur | 350.760 | 371.699 | 387.631 | 406.829 | 437.327 |
| | Kab. Bogor | 373.799 | 402.877 | 418.483 | 443.787 | 482.174 |
| | Prov. Jawa Barat | 391.009 | 411.342 | 433.041 | 477.969 | 495.229 |
| | Nasional | 418.515 | 437.902 | 464.474 | 513.170 | 547.175 |

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Tingkat kemiskinan, yang diukur dalam persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, mengalami kenaikan dari 7,48% pada tahun 2019 menjadi 8,46% pada tahun 2023. Meskipun mengalami fluktuasi selama periode tersebut, terlihat bahwa tingkat kemiskinan cenderung menurun setelah mencapai puncaknya pada tahun 2021.

Secara paralel, jumlah penduduk miskin, yang diukur dalam ribu jiwa, menunjukkan peningkatan dari 71,86 ribu jiwa pada tahun 2019 menjadi 81,54 ribu jiwa pada tahun 2023. Meskipun terjadi peningkatan absolut dalam jumlah ini, perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi dampak kemiskinan meskipun tingkat kemiskinan secara umum masih stabil atau mengalami peningkatan yang kecil.

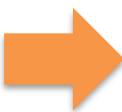
Dinamika ini mencerminkan tantangan dalam upaya mengurangi kemiskinan yang mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, kebijakan sosial dan ekonomi domestik, serta respon terhadap perubahan sosial dan demografis di dalam negeri. Upaya lanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang tepat terus diimplementasikan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat.

Kemudian terkait Kemiskinan Ekstrem yang ada di Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) bahwa jumlah penduduk miskin ekstrem terdiri dari, jumlah keluarga ekstrem sebanyak 5.668 keluarga dan individu sebanyak 30.397 jiwa.

Gambar 3.1

Data Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Purwakarta

| NO | KECAMATAN | DATA KELUARGA | | DATA INDIVIDU | |
|-------|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | | DESIL 1 | DESIL 2 - 4 | DESIL 1 | DESIL 2 - 4 |
| 1 | BABAKANCIKAO | 571 | 3.632 | 2.760 | 13.616 |
| 2 | BOJONG | 3.137 | 6.761 | 14.213 | 22.801 |
| 3 | BUNGURSARI | 577 | 3.240 | 2.623 | 11.609 |
| 4 | CAMPAKA | 663 | 3.702 | 3.136 | 12.970 |
| 5 | CIBATU | 284 | 2.137 | 1.321 | 7.244 |
| 6 | DARANGDAN | 2.803 | 8.869 | 12.696 | 29.844 |
| 7 | JATILUHUR | 909 | 3.767 | 4.709 | 14.176 |
| 8 | KIARAPEDES | 944 | 3.541 | 4.037 | 11.566 |
| 9 | MANIIS | 2.268 | 3.946 | 9.891 | 12.443 |
| 10 | PASAWAHAN | 799 | 4.128 | 3.640 | 14.083 |
| 11 | PLERED | 3.360 | 9.140 | 16.062 | 31.859 |
| 12 | PONDOKSALAM | 474 | 2.849 | 2.143 | 10.174 |
| 13 | PURWAKARTA | 2.020 | 8.952 | 10.289 | 33.257 |
| 14 | SUKASARI | 821 | 2.378 | 3.683 | 7.754 |
| 15 | SUKATANI | 2.416 | 7.566 | 11.341 | 26.862 |
| 16 | TEGALWARU | 2.477 | 6.926 | 10.750 | 22.650 |
| 17 | WANAYASA | 1.717 | 4.726 | 7.639 | 16.221 |
| TOTAL | | 26.240 | 86.260 | 120.933 | 299.129 |



| NO | KECAMATAN | PERSENTIL 1-2 DARI DESIL 1 (MISKIN EKSTREM) | |
|-------|--------------|---|---------------|
| | | DATA KELUARGA | DATA INDIVIDU |
| 1 | BABAKANCIKAO | 80 | 458 |
| 2 | BOJONG | 838 | 4.406 |
| 3 | BUNGURSARI | 92 | 485 |
| 4 | CAMPAKA | 100 | 559 |
| 5 | CIBATU | 21 | 111 |
| 6 | DARANGDAN | 555 | 2.910 |
| 7 | JATILUHUR | 164 | 1.034 |
| 8 | KIARAPEDES | 181 | 912 |
| 9 | MANIIS | 725 | 3.730 |
| 10 | PASAWAHAN | 126 | 669 |
| 11 | PLERED | 726 | 4.070 |
| 12 | PONDOKSALAM | 66 | 334 |
| 13 | PURWAKARTA | 287 | 1.687 |
| 14 | SUKASARI | 208 | 1.092 |
| 15 | SUKATANI | 560 | 3.042 |
| 16 | TEGALWARU | 525 | 2.739 |
| 17 | WANAYASA | 414 | 2.159 |
| TOTAL | | 5.668 | 30.397 |

Sumber : Kemenko PMK, 2024

Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem :
 Keluarga : 5.668 dan Individu : 30.397

Perkembangan jumlah penduduk miskin ekstrem, selain dipengaruhi oleh tingkat garis kemiskinan dan juga dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk, karena akan mempengaruhi perhitungan jumlah persentil 1 dan 2 pada Desil 1.

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

IPM diukur berdasarkan tiga dimensi: Umur panjang dan sehat (diukur dengan UHH); Pengetahuan (diukur dengan APK-SD dan APS); Kehidupan yang layak (diukur dengan pengeluaran per kapita).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta tahun 2020 adalah 70,82, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 ada peningkatan menjadi 70,98 dan 71,56 poin. Kemudian pada tahun 2023 ada peningkatan kembali menjadi 73,43 poin.

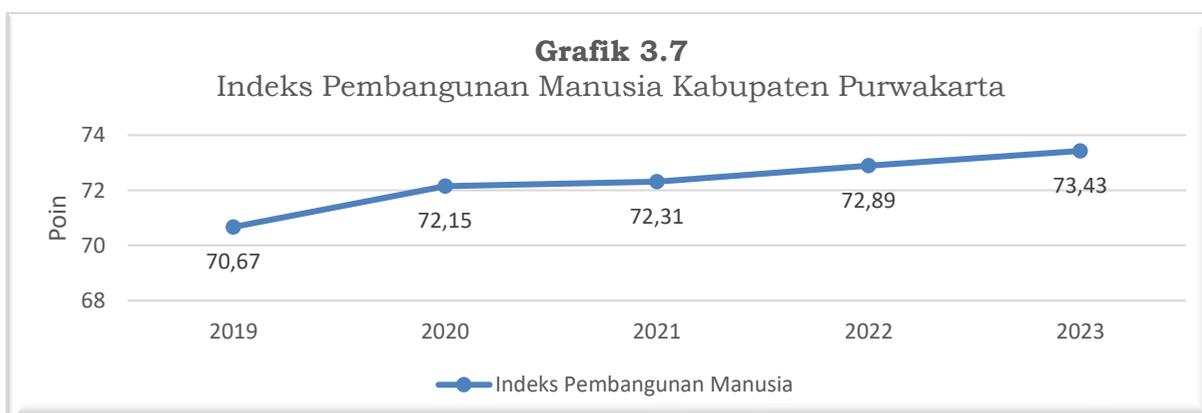
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Tahun 2019-2023, seperti terlihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 3.14

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

| Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Indeks Pembangunan Manusia | Poin | 70,67 | 72,15 | 72,31 | 72,89 | 73,43 |
| Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 7,92 | 8,09 | 8,10 | 8,11 | 8,13 |
| Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,1 | 12,11 | 12,12 | 12,13 | 12,18 |
| Angka Harapan Hidup | Tahun | 70,8 | 73,92 | 74,11 | 74,40 | 74,67 |
| Pengeluaran Perkapita Disesuaikan | Ribu Rp | 11.819 | 11.614 | 11.669 | 12.193 | 12.619 |

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, BPS Provinsi Jawa Barat, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

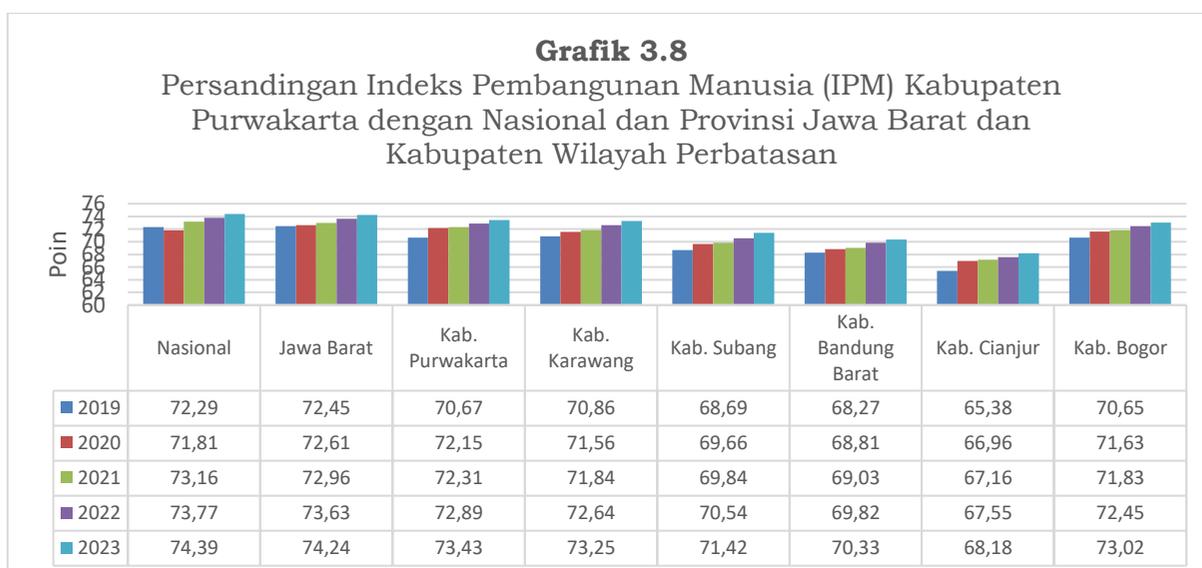
Bila dibandingkan dengan Kabupaten yang berada pada wilayah Jawa Barat, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.15

Persandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten di wilayah perbatasan Tahun 2019-2023

| No. | Indeks Pembagunan Manusia (IPM) (poin) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Nasional | 72,29 | 71,81 | 73,16 | 73,77 | 74,39 |
| 2 | Jawa Barat | 72,45 | 72,61 | 72,96 | 73,63 | 74,24 |
| 3 | Kab. Purwakarta | 70,67 | 72,15 | 72,31 | 72,89 | 73,43 |
| 4 | Kab. Karawang | 70,86 | 71,56 | 71,84 | 72,64 | 73,25 |
| 5 | Kab. Subang | 68,69 | 69,66 | 69,84 | 70,54 | 71,42 |
| 6 | Kab. Bandung Barat | 68,27 | 68,81 | 69,03 | 69,82 | 70,33 |
| 7 | Kab. Cianjur | 65,38 | 66,96 | 67,16 | 67,55 | 68,18 |
| 8 | Kab. Bogor | 70,65 | 71,63 | 71,83 | 72,45 | 73,02 |

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

IPM di Kabupaten Purwakarta menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 (70,67) ke tahun 2023 (73,43). Peningkatan IPM ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk, seperti peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, peningkatan angka partisipasi pendidikan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Purwakarta.

f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja.

Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru, dan dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Indikator ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain tingkat kemiskinan.

Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja.

Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun dan lebih. Mereka terdiri dari “Angkatan Kerja” dan “Bukan Angkatan Kerja”. Proporsi penduduk yang tergolong “Angkatan Kerja” adalah mereka yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Purwakarta.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2020 menunjukkan angka penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini diakibatkan adanya dampak pandemi covid-19 yang menurunkan sisi perekonomian nasional dan daerah sehingga berdampak pada penurunan dari sector dunia usaha termasuk tenaga kerja yang banyak di PHK untuk menyelamatkan keuangan perusahaan. Akibat hal tersebut maka pada tahun 2020 TPT Kabupaten Purwakarta meningkat mencapai angka 11,07 dan TPAK turun ke angka 60,91. Namun demikian sampai dengan tahun 2023, perkembangan angka TPT dan TPAK secara berangsur menunjukkan perkembangan yang positif, dimana pada tahun 2023 TPT Kabupaten Purwakarta berada pada angka 7,72 persen dan TPAK pada angka 66,37 persen.

Berikut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi

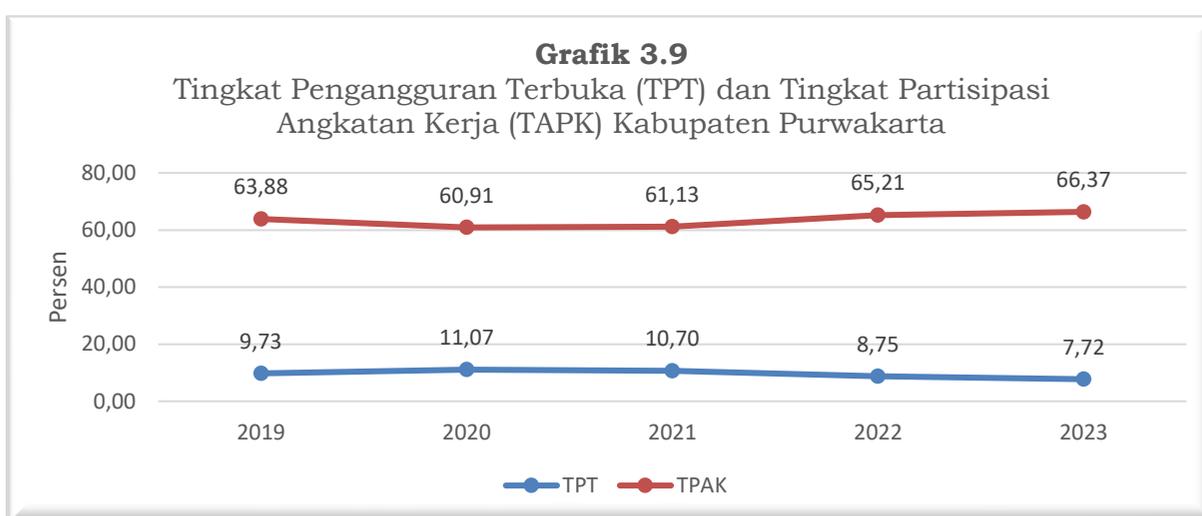
Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah :

Tabel 3.16

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

| Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 9,73 | 11,07 | 10,7 | 8,75 | 7,72 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Persen | 63,88 | 60,91 | 61,13 | 65,21 | 66,37 |

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Bila dibandingkan dengan Kabupaten yang berada pada wilayah Jawa Barat, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

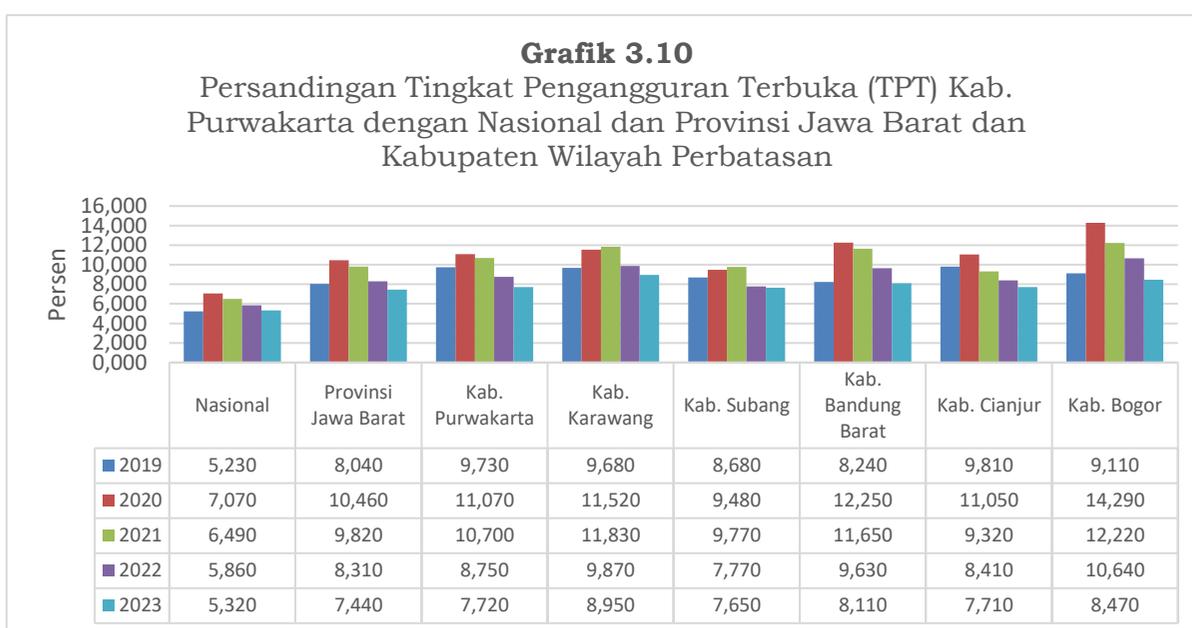
Tabel 3.17

Persandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten diwilayah perbatasan Tahun 2019-2023

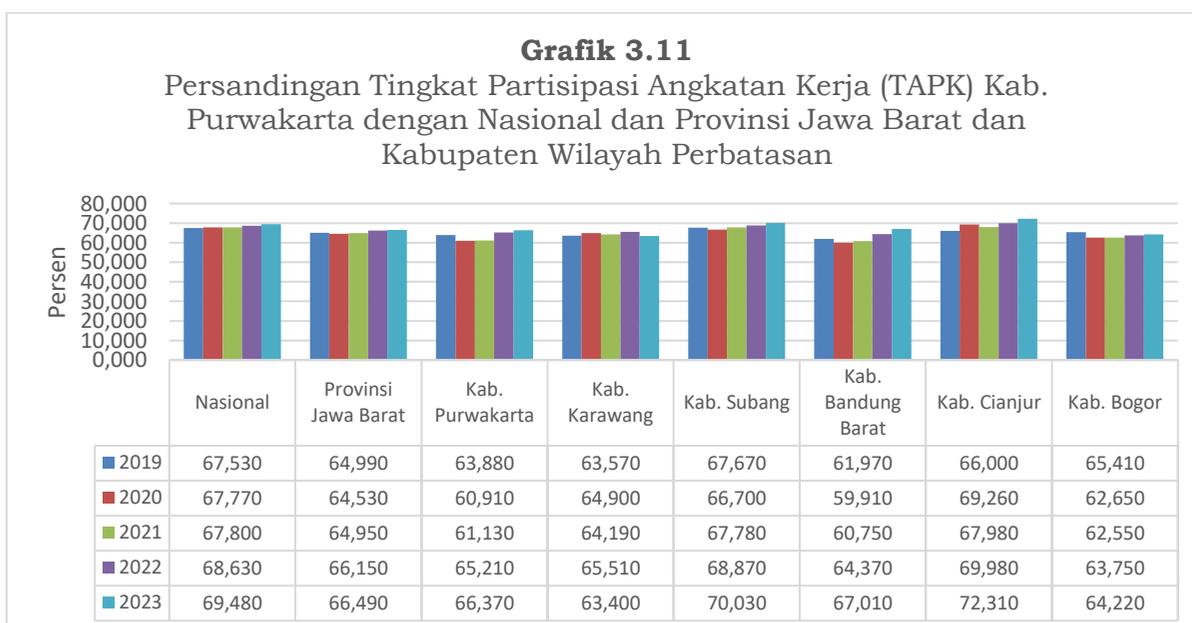
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|------|-------|-------|-------|------|
| Nasional | 5,23 | 7,07 | 6,49 | 5,86 | 5,32 |
| Provinsi Jawa Barat | 8,04 | 10,46 | 9,82 | 8,31 | 7,44 |
| Kab. Purwakarta | 9,73 | 11,07 | 10,70 | 8,75 | 7,72 |
| Kab. Karawang | 9,68 | 11,52 | 11,83 | 9,87 | 8,95 |
| Kab. Subang | 8,68 | 9,48 | 9,77 | 7,77 | 7,65 |
| Kab. Bandung Barat | 8,24 | 12,25 | 11,65 | 9,63 | 8,11 |
| Kab. Cianjur | 9,81 | 11,05 | 9,32 | 8,41 | 7,71 |
| Kab. Bogor | 9,11 | 14,29 | 12,22 | 10,64 | 8,47 |

| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nasional | 67,53 | 67,77 | 67,80 | 68,63 | 69,48 |
| Provinsi Jawa Barat | 64,99 | 64,53 | 64,95 | 66,15 | 66,49 |
| Kab. Purwakarta | 63,88 | 60,91 | 61,13 | 65,21 | 66,37 |
| Kab. Karawang | 63,57 | 64,90 | 64,19 | 65,51 | 63,40 |
| Kab. Subang | 67,67 | 66,70 | 67,78 | 68,87 | 70,03 |
| Kab. Bandung Barat | 61,97 | 59,91 | 60,75 | 64,37 | 67,01 |
| Kab. Cianjur | 66,00 | 69,26 | 67,98 | 69,98 | 72,31 |
| Kab. Bogor | 65,41 | 62,65 | 62,55 | 63,75 | 64,22 |

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

g. Ketimpangan

Pencapaian pembangunan daerah terkait pengukuran ketimpangan, digunakan indikator Gini Rasio. Gini ratio adalah ukuran pemerataan pendapatan yang di hitung berdasarkan kelas pendapatan. Rasio Gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva lorenz (daerah A) dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Rasio gini digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk.

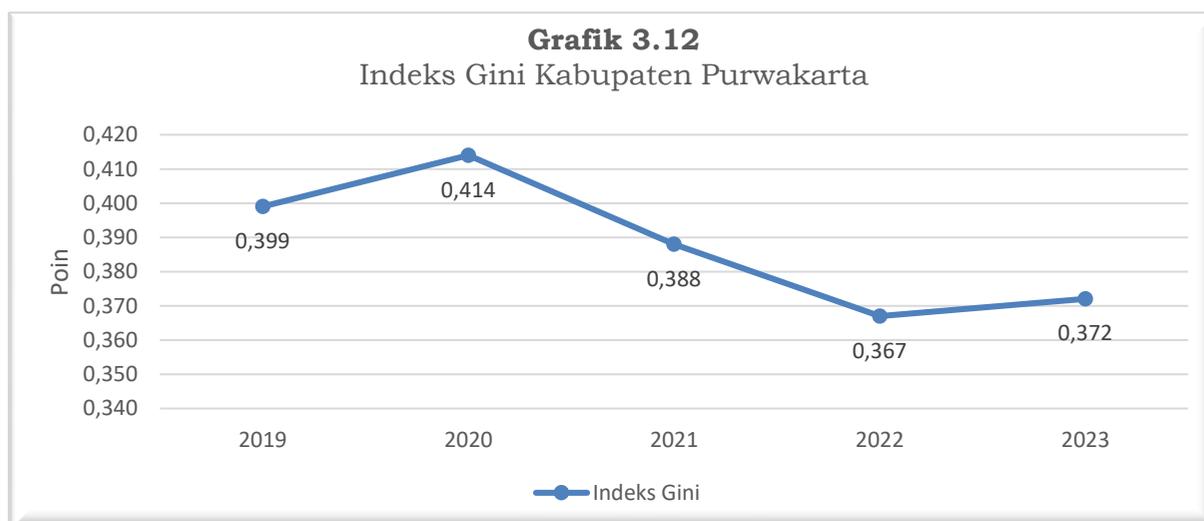
Tingkat ketimpangan atau Gini Rasio Kabupaten Purwakarta pada tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 3.18

Capaian Indeks Gini / Gini Rasio Kab. Purwakarta pada Tahun 2019 – 2023

| Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Indeks Gini / Gini Rasio | Poin | 0,399 | 0,414 | 0,388 | 0,367 | 0,372 |

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

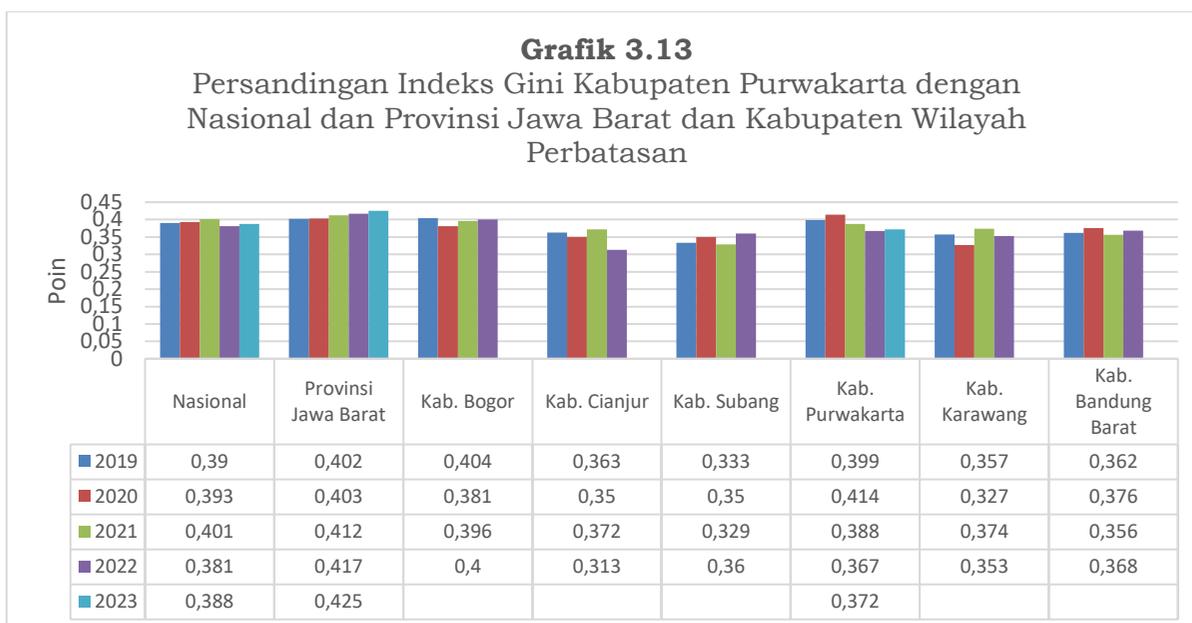
**Tabel 3.19**

Persandingan Indeks Gini/Gini Rasio Kab. Purwakarta dengan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kab. di wilayah perbatasan Tahun 2019-2023

| No. | Indek Gini / Gini Rasio (poin) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Nasional | 0,390 | 0,393 | 0,401 | 0,381 | 0,388 |
| 2 | Provinsi Jawa Barat | 0,402 | 0,403 | 0,412 | 0,417 | 0,425 |
| 3 | Kab. Bogor | 0,404 | 0,381 | 0,396 | 0,400 | n/a |
| 4 | Kab. Cianjur | 0,363 | 0,350 | 0,372 | 0,313 | n/a |

| No. | Indek Gini / Gini Rasio (poin) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5 | Kab. Subang | 0,333 | 0,350 | 0,329 | 0,360 | n/a |
| 6 | Kab. Purwakarta | 0,399 | 0,414 | 0,388 | 0,367 | 0,372 |
| 7 | Kab. Karawang | 0,357 | 0,327 | 0,374 | 0,353 | n/a |
| 8 | Kab. Bandung Barat | 0,362 | 0,376 | 0,356 | 0,368 | n/a |

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Pada tahun 2019, Indeks Gini atau Gini Rasio berada pada nilai 0,399, yang menunjukkan tingkat ketimpangan ekonomi yang cukup signifikan. Namun, pada tahun 2020, angka ini mengalami peningkatan menjadi 0,414, menandakan adanya peningkatan ketimpangan yang lebih tinggi dalam distribusi pendapatan atau kekayaan.

Tren kemudian berubah pada tahun 2021, di mana nilai Indeks Gini turun menjadi 0,388, menunjukkan adanya penurunan sedikit dalam ketimpangan ekonomi. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan yang lebih signifikan, dengan Indeks Gini turun menjadi 0,367. Hal ini menandakan upaya atau perubahan kebijakan yang mungkin telah diimplementasikan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.

Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2022, angka tersebut sedikit meningkat kembali pada tahun 2023, dengan Indeks Gini mencapai 0,372. Meskipun masih di bawah angka tahun 2020, peningkatan ini mungkin menunjukkan adanya tekanan ekonomi atau perubahan kebijakan yang berdampak pada ketimpangan ekonomi yang lebih besar.

h. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah indikator atau tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Jadi, pendapatan perkapita adalah total penghasilan negara dibagi jumlah seluruh penduduknya sehingga diketahui pendapatan rata-rata penduduk tersebut. Pendapatan perkapita di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 walaupun masih dibawah capaian tahun 2019, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi yang menurun akibat pandemi Covid-19.

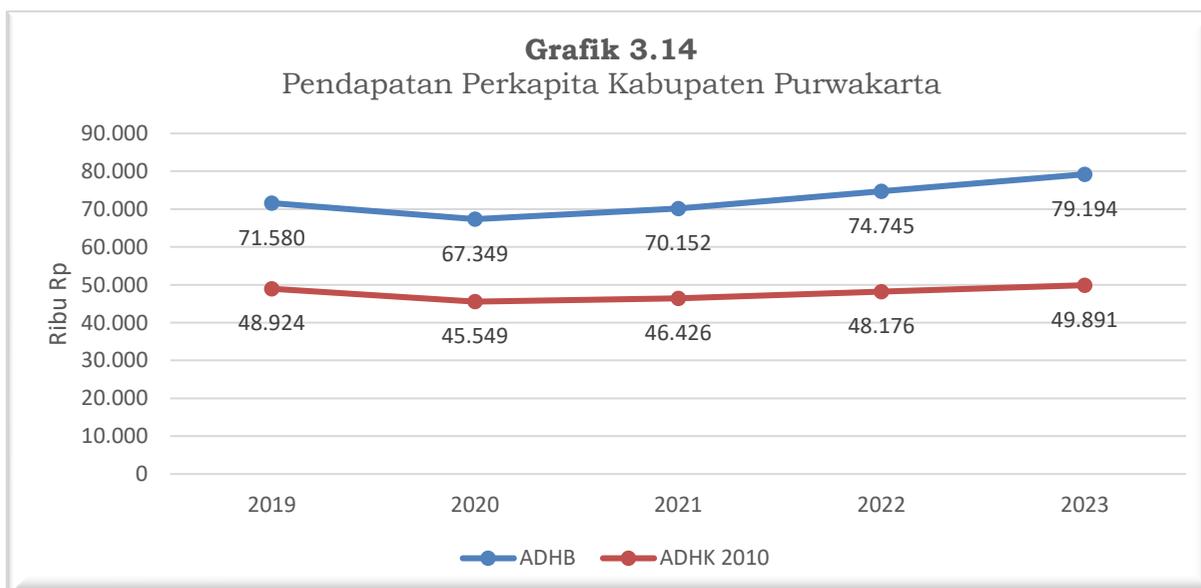
Berikut tingkat capaian pendapatan perkapita Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 3.20

Pendapatan Perkapita Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

| Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pendapatan Per Kapita - PDRB ADHB | Ribu Rp. | 71.580 | 67.349 | 70.152 | 74.745 | 79.194 |
| Pendapatan Per Kapita - PDRB ADHK 2010 | Ribu Rp. | 48.924 | 45.549 | 46.426 | 48.176 | 49.891 |

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Pendapatan per kapita dari PDRB-ADHB pada tahun 2019 adalah sebesar 71.580 ribu rupiah. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2020 menjadi 67.349 ribu rupiah, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 70.152 ribu rupiah. Tren kenaikan ini berlanjut pada tahun 2022 dan 2023, dengan

pendapatan per kapita mencapai 74.745 ribu rupiah dan 79.194 ribu rupiah berturut-turut.

Sementara itu, pendapatan per kapita dari PDRB-ADHK 2010 juga mengalami tren yang serupa. Pada tahun 2019, pendapatan per kapita sebesar 48.924 ribu rupiah, turun menjadi 45.549 ribu rupiah pada tahun 2020, kemudian mengalami peningkatan kembali menjadi 46.426 ribu rupiah pada tahun 2021. Tren kenaikan ini berlanjut pada tahun 2022 dan 2023, dengan pendapatan per kapita mencapai 48.176 ribu rupiah dan 49.891 ribu rupiah berturut-turut.

Meskipun kedua indikator menunjukkan peningkatan pendapatan per kapita dari tahun ke tahun, terdapat perbedaan dalam skala nilai antara PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010, dengan PDRB ADHB memiliki nilai yang lebih tinggi secara konsisten dibandingkan dengan PDRB ADHK 2010. Hal ini mungkin mencerminkan perbedaan dalam metodologi perhitungan antara kedua pendekatan tersebut.

Dengan memperhatikan capaian realisasi indikator makro pembangunan pada tahun sebelumnya, maka di akhir tahun 2024 arah kebijakan ekonomi daerah difokuskan pada pemulihan ekonomi berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor industri pengolahan, yang dominan dalam struktur ekonomi Kabupaten Purwakarta, akan mendapatkan perhatian khusus. Kebijakan akan diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong inovasi dalam proses produksi, serta meningkatkan daya saing produk-produk lokal di pasar nasional maupun internasional.

Investasi dalam infrastruktur juga akan ditingkatkan untuk mendukung konektivitas antarwilayah dan aksesibilitas terhadap pasar. Hal ini diharapkan dapat mempercepat distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan efisiensi biaya logistik. Kemudian kebijakan pendapatan daerah akan diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan non-pajak dan peningkatan efisiensi pengelolaan pajak daerah. Hal ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah dan mendukung berbagai program pembangunan, termasuk pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta akan terus meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan kerja guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini penting untuk mendukung transformasi ekonomi ke arah sektor-sektor berbasis pengetahuan dan teknologi tinggi, yang dapat menciptakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan. Kebijakan terhadap pengentasan kemiskinan juga difokuskan pada peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja dan kewirausahaan, serta penguatan jaringan sosial dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, termasuk percepatan pelaksanaan strategi penanganan kemiskinan ekstrem.

Kemudian pada aspek penguatan sektor unggulan berbasis potensi lokal dan inovasi teknologi. Sektor pertanian akan didorong menuju pertanian modern dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan produk olahan bernilai tambah, dan perluasan akses pasar digital. Sektor pariwisata akan difokuskan pada pengembangan destinasi wisata unggulan tematik yang mengedepankan kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan. Sektor industri kreatif akan diperkuat melalui inkubasi bisnis, pelatihan keterampilan digital, dan fasilitasi akses permodalan. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti akses transportasi akan terus ditingkatkan.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah secara makro dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Proyeksi indikator makro ekonomi daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.21

Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kab. Purwakarta, Tahun 2024

| No. | Indikator Makro Pembangunan | Satuan | Target 2024 |
|-----|-------------------------------------|----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | Poin | 72,99 |
| 2 | Angka Kemiskinan | Persen | 7,25 |
| 3 | Angka Pengangguran | Persen | 7,00 |
| 4 | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 5,80 |
| 5 | Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) | Poin | 0,306 |
| 6 | Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHK | Juta Rp. | 54,19 |

Sumber : Kesepakatan Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

3.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, yaitu adanya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK.

RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. Memasuki pertengahan tahun berjalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta memandang perlu melakukan Perubahan RKPD Tahun 2024 guna memastikan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan target yang akan dicapai pada tahun perencanaan. Beberapa hal yang mendasari kebijakan untuk melakukan perubahan RKPD Tahun 2024, yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 318/KU.01.03.07/BPKAD tanggal 12 Januari 2024 perihal Penyampaian Rincian Bagi Hasil Pajak Provisi dan Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada APBD Tahun Anggaran Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
3. Penyesuaian proyeksi target pendapatan daerah hasil analisis terhadap realisasi target sebelumnya selama kurun waktu semester I tahun 2024;
4. Penyesuaian proyeksi kebutuhan pagu anggaran belanja daerah pada masing-masing perangkat daerah, disesuaikan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah;

5. Penyesuaian target kinerja, lokasi sasaran, dan pagu anggaran pada subkegiatan yang akan dilaksanakan;
6. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan II Tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kebijakan keuangan dan kerangka pendanaan anggaran daerah Kabupaten Purwakarta diarahkan pada penyediaan anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan dan subkegiatan untuk mendukung kebijakan-kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2024, sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat selaras dan harmonis dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kerangka pendanaan keuangan daerah perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap asumsi/proyeksi pencapaian target pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerah yang lebih realistis yang dapat dicapai secara optimal.

3.2. Kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Purwakarta diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan), Pendapatan Transfer (transfer pemerintah pusat dan antar daerah), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Purwakarta antara lain:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;

- b. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, antara pusat dan daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana transfer dan pendapatan lainnya yang sah;
- c. Merasionalisasikan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- d. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
- e. Meningkatkan pelayanan publik terkait pendapatan daerah berupa pelayanan konsultasi, pengaduan, penelusuran dan pemberian apresiasi atau penghargaan kepada wajib pajak teladan;
- f. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
- g. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana teknis dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
- h. Mengoptimalkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
- i. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima;
- j. Meningkatkan iklim investasi dalam penanaman modal di daerah yang ramah, cepat, transparan dan mudah diakses;
- k. Meningkatkan promosi daerah dan penataan destinasi wisata yang berpotensi terhadap peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan;
- l. Meningkatkan penataan sarana dan prasarana lokasi/tempat yang berpotensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah;
- m. Mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah

Sedangkan untuk meningkatkan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh pasal 21, pajak ekspor, dan PPh badan;
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan;
3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada obyek pendapatan yang menjadi hak dan kewenangan Kabupaten Purwakarta; dan
4. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.

Berikut kami sajikan tabel Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.22

Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2024

| KODE REKENING | URAIAN | RKPD 2024 | APBD 2024 | PERUBAHAN RKPD 2024 | SELISIH | % |
|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5-4) | 7 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 2.451.297.029.258,00 | 2.615.297.224.652,00 | 2.689.952.706.922,00 | 74.655.482.270,00 | 2,85 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 749.285.264.555,00 | 761.958.601.536,00 | 714.963.786.340,00 | -46.994.815.196,00 | -6,17 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 493.164.444.405,00 | 504.885.237.213,00 | 457.890.422.017,00 | -46.994.815.196,00 | -9,31 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 40.131.794.939,00 | 227.926.390.425,00 | 227.926.390.425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 7.635.881.071,00 | 7.635.881.071,00 | 7.635.881.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 208.353.144.140,00 | 21.511.092.827,00 | 21.511.092.827,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.702.011.764.703,00 | 1.851.934.623.116,00 | 1.973.584.920.582,00 | 121.650.297.466,00 | 6,57 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.506.316.436.671,00 | 1.629.018.099.000,00 | 1.672.399.479.975,00 | 43.381.380.975,00 | 2,66 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 195.695.328.032,00 | 222.916.524.116,00 | 301.185.440.607,00 | 78.268.916.491,00 | 35,11 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 0,00 | 1.404.000.000,00 | 1.404.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 0,00 | 1.404.000.000,00 | 1.404.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.02 | Dana Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sumber: TAPD Kab. Purwakarta. 2024 (data diolah)

3.3. Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengelolaan belanja daerah harus mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, partisipatif, disiplin anggaran, berkeadilan, efisien dan efektif. Pengelolaan belanja mempunyai tiga tujuan pokok yang ingin dicapai, yaitu menjamin dijalkannya disiplin fiskal melalui pengendalian belanja, menyesuaikan alokasi anggaran dengan arah kebijakan anggaran dan prioritas

anggaran, serta menjamin efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran. Manajemen belanja akan menyesuaikan arah kebijakan anggaran terutama yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah daerah seperti : pro poor, pro job dan pro growth.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Kebijakan Belanja Daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif.

Adapun kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif, sebagai berikut :

1. Pemenuhan anggaran untuk membiayai belanja yang sifatnya wajib dan mengikat, meliputi belanja pegawai, belanja listrik, air, telepon/internet, belanja premi asuransi kesehatan, dll;
2. Dukungan pendanaan dalam penanganan kesehatan masyarakat, insentif tenaga kesehatan, belanja kesehatan lainnya, dan pelaksanaan kegiatan prioritas pembangunan lainnya;
3. Dukungan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah;
4. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) bidang, urusan wajib non pelayanan dasar sejumlah 18 (delapan belas) bidang dan urusan pilihan sejumlah 8 (delapan) bidang serta fungsi penunjang, fungsi pendukung dan fungsi pemerintahan lainnya sejumlah 10 (sepuluh) bidang;
6. Dukungan terhadap program Sustainable Development Goals (SDGs);
7. Pemenuhan dana fungsi pendidikan sebesar 20% dalam rangka peningkatan pemenuhan penyelenggaraan pendidikan;
8. Pemenuhan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan pemenuhan penyelenggaraan kesehatan;

9. Pemenuhan dana fungsi infrastruktur sebesar 40% secara bertahap dalam rangka peningkatan pemenuhan infrastruktur daerah;
10. Penyediaan bantuan keuangan desa, hibah dan bantuan sosial serta pemberian subsidi yang dibutuhkan;
11. Penyediaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan belanja yang sifatnya darurat dan mendesak; dan
12. Penyediaan belanja modal pembangunan daerah, seperti, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi;
13. Mendorong optimalisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah guna meningkatkan perekonomian daerah;
14. Dukungan terhadap penyelenggaraan trantibumlinmas, pilkada serentak dan penanggulangan kebencanaan, dan lain-lain;

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah terletak pada kebutuhan belanja daerah yang harus dibayarkan guna membiayai kebutuhan rumah tangga daerah pada tahun 2024. Secara garis besar Perubahan Kebijakan Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.23

Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024

| KODE REKENING | URAIAN | RKPD 2024 | APBD 2024 | PERUBAHAN RKPD 2024 | SELISIH | % |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5-4) | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 2.489.589.282.385,00 | 2.653.589.477.779,00 | 2.722.204.644.583,00 | 68.615.166.804,00 | 2,59 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.955.085.354.777,00 | 2.035.558.242.704,00 | 2.106.955.204.378,00 | 71.396.961.674,00 | 3,51 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 995.261.945.631,00 | 1.029.883.293.341,00 | 1.064.358.248.742,00 | 34.474.955.401,00 | 3,35 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 908.632.645.891,00 | 885.505.935.365,00 | 924.897.896.135,00 | 39.391.960.770,00 | 4,45 |
| 5.1.03 | Belanja Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 45.698.163.255,00 | 117.859.013.998,00 | 114.689.059.501,00 | -3.169.954.497,00 | -2,69 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 5.492.600.000,00 | 2.310.000.000,00 | 3.010.000.000,00 | 700.000.000,00 | 30,30 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 162.486.404.445,00 | 229.293.941.356,00 | 260.524.967.396,00 | 31.231.026.040,00 | 13,62 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 1.237.828.888,00 | 1.896.200.000,00 | 2.437.424.550,00 | 541.224.550,00 | 28,54 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 71.964.513.876,00 | 79.130.065.230,00 | 99.348.170.238,00 | 20.218.105.008,00 | 25,55 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 40.631.694.266,00 | 60.948.438.384,00 | 70.931.907.946,00 | 9.983.469.562,00 | 16,38 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 35.953.645.869,00 | 77.548.749.204,00 | 78.036.976.124,00 | 488.226.920,00 | 0,63 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 12.698.721.546,00 | 9.770.488.538,00 | 9.770.488.538,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 23.348.210.605,00 | 40.067.981.161,00 | 15.127.215.622,00 | 24.940.765.539,00 | -62,25 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 23.348.210.605,00 | 40.067.981.161,00 | 15.127.215.622,00 | -24.940.765.539,00 | -62,25 |

| KODE REKENING | URAIAN | RKPD 2024 | APBD 2024 | PERUBAHAN RKPD 2024 | SELISIH | % |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5-4) | 7 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 348.669.312.558,00 | 348.669.312.558,00 | 339.597.257.187,00 | -9.072.055.371,00 | -2,60 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 44.927.822.558,00 | 44.927.822.558,00 | 35.855.767.187,00 | -9.072.055.371,00 | -20,19 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 303.741.490.000,00 | 303.741.490.000,00 | 303.741.490.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Surplus/(Defisit) | | -38.292.253.127,00 | -38.292.253.127,00 | -32.251.937.661,00 | 6.040.315.466,00 | -15,77 |

Sumber: TAPD Kab. Purwakarta. 2024 (data diolah)

3.4. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024

Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dapat dilakukan perubahan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, sehingga dalam Perubahan RKPD Kab. Purwakarta Tahun 2024 telah menggunakan perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2023, yakni perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK.

Adapun kerangka Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 di sajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.24

Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2024

| KODE REKENING | URAIAN | RKPD 2024 | APBD 2024 | PERUBAHAN RKPD 2024 | SELISIH | % |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5-4) | 7 |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | 38.292.253.127,00 | 38.292.253.127,00 | 32.251.937.661,00 | -6.040.315.466,00 | -15,77 |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 43.292.253.127,00 | 43.292.253.127,00 | 37.251.937.661,00 | -6.040.315.466,00 | -13,95 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 43.292.253.127,00 | 43.292.253.127,00 | 37.251.937.661,00 | -6.040.315.466,00 | -13,95 |
| 6.1.02 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.03 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.04 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.06 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.01 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.04 | Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.05 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLpa) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL APBD | | 2.494.589.282.385,00 | 2.658.589.477.779,00 | 2.727.204.644.583,00 | 68.615.166.804,00 | 2,58 |

Sumber: TAPD Kab. Purwakarta. 2024 (data diolah)

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 – 2024 :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Visi Pemerintah Pusat yaitu :

“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”

9 Misi Pemerintah Pusat yakni :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa, dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

5 Arahan Presiden yakni :

1. **Pembangunan SDM**, yaitu Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. **Pembangunan Infrastruktur**, yaitu Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. **Penyederhanaan Regulasi**, yaitu Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. **Penyederhanaan Birokrasi**, yaitu Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. **Transformasi Ekonomi**, yaitu Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

7 Agenda Pembangunan Nasional yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Penjabaran dari 7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional tersebut diatas diantaranya yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan

harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a) pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b) distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c) peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d) memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
- e) meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a) pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b) penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e) peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f) pengentasan kemiskinan; dan
- g) peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a) revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c) revolusi mental dalam sistem sosial.

Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a) menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b) peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c) pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d) rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e) mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a) peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- c) pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a) reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b) meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- c) memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d) mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e) mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Adapun Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 terdiri dari :

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian;
3. Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera;
4. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dan Menguatnya Tata Kelola Kependudukan;
5. Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk;
6. Terpenuhinya Layanan Dasar, Bidang Kesehatan dan Pendidikan;
7. Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
8. Terwujudnya pengentasan kemiskinan;
9. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing;
10. Menguatnya Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memantapkan Ketahanan Budaya;

11. Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan;
12. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Daya Rekat Sosial;
13. Menguatnya Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Kerukunan Umat dan Membangun Harmoni Sosial dalam Kehidupan Masyarakat;
14. Meningkatnya Ketahanan Keluarga untuk Memperkukuh Karakter Bangsa;
15. Meningkatnya Budaya Literasi untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan, Inovatif dan Kreatif;
16. Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar;
17. Meningkatnya Konektivitas Wilayah;
18. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan;
19. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien;
20. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi;
21. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
22. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
23. Pembangunan Rendah Karbon;
24. Konsolidasi Demokrasi;
25. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
26. Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
27. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
28. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional;

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Dokumen RPD Daerah Tahun 2024-2026 tidak memuat visi dan misi Kepala Daerah, dengan demikian penentuan tujuan dan sasaran didasarkan pada visi dan misi, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, serta isu strategis aktual

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mewujudkan visi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, yaitu **“DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA”**, melalui upaya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Tujuan pertama RPD adalah **Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**. Tujuan tersebut memiliki 5 (lima) sasaran, meliputi: 1). Meningkatnya akses dan mutu pendidikan; 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 3). Meningkatnya standar hidup layak masyarakat; 4). Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, dan 5). Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk.

Tujuan kedua RPD adalah **Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan**. Tujuan tersebut memiliki 7 (tujuh) sasaran, yaitu: 1). Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan; 2). Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan; 3). Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif; 4). Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha; 5). Terkendalinya tingkat kemiskinan; 6). Meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja; dan 7). Meningkatnya ketahanan pangan daerah;

Tujuan ketiga RPD adalah **Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan**. Tujuan tersebut memiliki 3 (tiga) sasaran, yaitu 1). Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan; dan 2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup; dan dan 3). Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah

Tujuan keempat RPD atau yang terakhir adalah **Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Birokrasi yang didukung oleh Inovasi Daerah**. Tujuan tersebut memiliki 3 (tiga) sasaran, yaitu: 1). Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi; 2). Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah; dan 3). Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan
3. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur Dasar
4. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

Sedangkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat 2024-2026 adalah sebagai berikut

1. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata.
2. Refotmasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama.
3. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah.
4. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana.
5. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa.
6. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Purwakarta

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kabupaten Purwakarta serta merujuk kepada Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026, maka tujuan dan sasaran pembangunan pada Penyusunan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 mengacu kepada Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, dimana Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta yaitu:

VISI :

"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

MISI :

- Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah
- Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup
- Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal
- Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah
- Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga tiga tahun ke depan. Sasaran RPD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi RPJPD 2005-2025, juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan tahunan.

Berdasarkan rumusan visi dan misi RPJPD 2005-2025 maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga tiga tahun ke depan.

Berikut disajikan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 yang dilengkapi dengan indikator kinerja serta target tahunan, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 |
|----------------|--|--|--|---------|---|----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| | Visi : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH" | | | | | | |
| I. | | Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah | | | | | |
| I.1 | | | Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berdaya Saing | | | | |
| | | | | | Indek Pembangunan Manusia | Poin | 72,99 |
| | | | | | Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka Pengangguran | Persen | 7 |
| | | | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Persen | 82,22 |
| I.1.1 | | | Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan | | | | |
| | | | | | Indek Pembangunan Manusia | Poin | 72,99 |
| | | | | | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 9,23 |
| | | | | | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 13,85 |
| | | | | | Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan | Persen | 60 |
| I.1.2 | | | Sasaran 2 : Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat | | | | |
| | | | | | Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka Pengangguran | Persen | 7 |
| | | | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Persen | 82,22 |
| | | | | | Persentase Pemuda Berprestasi | Persen | 0,06 |
| II. | | Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup | | | | | |
| II.1 | | | Tujuan 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat | | | | |
| | | | | | Angka Harapan Hidup | Tahun | 72,01 |
| II.1.1 | | | Sasaran 3 : Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana | | | | |
| | | | | | Angka Harapan Hidup | Tahun | 72,01 |
| | | | | | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | Persen | 1,5 |
| II.2 | | | Tujuan 3 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana | | | | |
| | | | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota | Poin | 67,49 |
| | | | | | Indeks Ketahanan Daerah | Persen | 0,48 |
| II.2.1 | | | Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | | | | |
| | | | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota | Poin | 67,49 |
| II.2.2 | | | Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana | | | | |
| | | | | | Indeks Ketahanan Daerah | Persen | 0,48 |
| | | | | | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) | Predikat | Sedang |
| III. | | Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal | | | | | |
| III.1 | | | Tujuan 4 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat | | | | |
| | | | | | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 5,8 |
| | | | | | Inflasi | Persen | 1,34 |
| | | | | | Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta) | Rp. | 82,77 |
| III.1.1 | | | Sasaran 6 : Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah | | | | |
| | | | | | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 5,8 |
| | | | | | Persentase Koperasi Aktif dan Sehat | Persen | 89,7 |
| | | | | | Pertumbuhan UMKM | Persen | 11,86 |

Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 |
|---------|----------------------|--|--|---|--|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| III.1.2 | | | | Sasaran 7 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian | | | |
| | | | | | Inflasi | Persen | 1,34 |
| | | | | | Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta) | Rp. | 82,77 |
| | | | | | Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB (Trilyun) | Rp. | 56,08 |
| | | | | | Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun) | Rp. | 93,32 |
| III.1.3 | | | | Sasaran 8 : Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat | | | |
| | | | | | Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan | Persen | 0,03 |
| | | | | | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | Persen | 9,23 |
| III.1.4 | | | | Sasaran 9 : Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan | | | |
| | | | | | Nilai Tukar Petani | Poin | 101,71 |
| | | | | | Skor Pola Pangan Harapan | Poin | 95,7 |
| | | | | | Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB | Persen | 6,39 |
| III.2 | | | Tujuan 5 : Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat | | | | |
| | | | | | Angka Kemiskinan | Persen | 7,25 |
| | | | | | Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan | Poin | 0,306 |
| | | | | | Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Juta) | Rp. | 12,64 |
| III.2.1 | | | | Sasaran 10 : Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan | | | |
| | | | | | Angka Kemiskinan | Persen | 7,25 |
| | | | | | Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan | Poin | 0,306 |
| | | | | | Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Juta) | Rp. | 12,64 |
| III.2.2 | | | | Sasaran 11 : Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | |
| | | | | | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Poin | 87,38 |
| | | | | | Indeks Perberdayaan Gender (IDG) | Poin | 79,92 |
| IV. | | Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah | | | | | |
| IV.1 | | | Tujuan 6 : Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah | | | | |
| | | | | | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota | Persen | 85 |
| | | | | | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota | Persen | 100 |
| IV.1.1 | | | | Sasaran 12 : Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah | | | |
| | | | | | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota | Persen | 85 |
| | | | | | Cakupan Layanan Air Bersih | Persen | 81 |
| IV.1.2 | | | | Sasaran 13 : Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien | | | |
| | | | | | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota | Persen | 100 |
| | | | | | Cakupan Layanan Air Limbah Domestik | Persen | 89 |
| | | | | | Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik | Persen | 37,6 |

Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 |
|---------------|----------------------|---|--|---|--|-----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| V. | | Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat | | | | | |
| V.1 | | | Tujuan 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel | | | | |
| | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi | Poin | 67,41 |
| | | | | | Nilai SAKIP Kabupaten | Poin | 69,64 |
| | | | | | Nilai LPPD Kabupaten | Poin | 3,5 |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik |
| | | | | | Indeks Inovasi Daerah | Nilai | 50,62 |
| | | | | | Opini BPK terhadap laporan keuangan | Opini | WTP |
| V.1.1 | | | | Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE | | | |
| | | | | | Nilai SAKIP Kabupaten | Poin | 69,64 |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik |
| | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi | Poin | 67,41 |
| | | | | | Indeks SPBE | Poin | 2,6 |
| V.1.2 | | | | Sasaran 15 : Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | | | Indeks Profesionalitas ASN | Predikat | Sangat Rendah |
| | | | | | Sistem Merit Kabupaten | Predikat | Baik |
| | | | | | Nilai LPPD Kabupaten | Poin | 3,5 |
| | | | | | Opini BPK terhadap laporan keuangan | Opini | WTP |
| | | | | | Indeks Kemandirian Fiskal | Poin | 0,228 |
| | | | | | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Poin | 82,45 |
| | | | | | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level | 3 |
| | | | | | Indeks Inovasi Daerah | Nilai | 50,62 |
| V.2 | | | | Tujuan 8 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai | | | |
| | | | | | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Persen | 77,95 |
| | | | | | Indeks Desa Membangun | Predikat | Maju |
| V.2.1 | | | | Sasaran 16 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan | | | |
| | | | | | Indeks Desa Membangun | Predikat | Maju |
| V.2.2 | | | | Sasaran 17 : Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat | | | |
| | | | | | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Persen | 77,95 |
| JUMLAH | 1 | 5 | 8 | 17 | 70 | 70 | 70 |

Sumber : RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026,
BA Kesepakatan Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Dalam Narasi RPJMN 2020-2024 dimana terdapat **7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional** diantaranya yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Agenda Pembangunan Nasional tersebut dalam pelaksanaannya, difokuskan atau diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan daya ungkit besar terhadap pembangunan nasional serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Penjabaran dari 7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional tersebut diatas diantaranya yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan

- b. akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 - 2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
 - 3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
 - 4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
 - 5) pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
- b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
 - 2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - 3) penyediaan air untuk pertanian;
 - 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 - 5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 - 6) pengembangan waduk multiguna.
- c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 2) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
 - 3) peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 - 4) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 - 5) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.

- d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 - 2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 - 3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
 - 4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
 - 5) peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 - 2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
 - 4) peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.
- f. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 - 3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
 - 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 - 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 - 6) pengembangan industri halal.

- g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
 - 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - 3) pengelolaan impor;
 - 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
 - 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
 - 6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan
 - 7) peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
- h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
 - 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0;
 - 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
 - 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
 - 5) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;

- d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
- e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. pengentasan kemiskinan; dan
- g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
 - 1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;
 - 2) integrasi sistem administrasi kependudukan;
 - 3) pendampingan dan layanan terpadu; dan
 - 4) pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) sistem jaminan sosial nasional;
 - 2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
 - 3) kesejahteraan sosial.
- c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
 - 2) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
 - 3) peningkatan pengendalian penyakit;
 - 4) penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan
 - 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:
 - Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan,
 - Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan,
 - Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat Kesehatan,
 - Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, dan
 - Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan Kesehatan.
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
 - 2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
 - 3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 4) penjaminan mutu pendidikan; dan
 - 5) peningkatan tata kelola pendidikan.
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - 2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
 - 3) kualitas pemuda.
- f. Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 - 2) keberantaraan usaha dan dampak sosial;
 - 3) reforma agraria; dan
 - 4) perhutanan sosial.
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
- 2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
- 3) peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi; dan
- 4) prestasi olahraga.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a. revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c. revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 - 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
 - 3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
 - 4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
 - 5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
 - 6) pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;

- b. meningkatkan pemajuan Dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
 - 2) pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 - 3) perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - 4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
 - 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c. memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 - 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat Beragama;
 - 3) penyelarasan relasi agama dan budaya;
 - 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
 - 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
- d. peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan budaya literasi;
 - 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
 - 3) pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
 - 4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. infrastruktur pelayanan dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
 - 2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
 - 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
 - 4) keselamatan dan keamanan transportasi;
 - 5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan
 - 6) waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.
- b. infrastruktur ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) konektivitas jalan;
 - 2) konektivitas kereta api;
 - 3) konektivitas laut;
 - 4) konektivitas udara; dan
 - 5) konektivitas darat.
- c. infrastruktur perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) transportasi perkotaan; dan
 - 2) infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perkotaan.

- d. energi dan ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
 - 2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - 3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.
- e. transformasi digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
 - 2) pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan
 - 3) fasilitas pendukung transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
- c. pembangunan rendah karbon

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) penanggulangan bencana; dan
 - 2) peningkatan ketahanan iklim.
- c. pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pembangunan energi berkelanjutan;
 - 2) pemulihan lahan berkelanjutan; dan
 - 3) pengembangan industri hijau

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. meningkatkan hak politik dan kebebasan sipil;
- c. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. konsolidasi demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
 - 2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
 - 3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
- b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri; dan
 - 2) penguatan kerjasama pembangunan internasional.
- c. reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan implementasi manajemen ASN;
 - 2) transformasi pelayanan publik;
 - 3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan

- 4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
- d. menjaga stabilitas keamanan nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan keamanan dalam negeri;
 - 2) penguatan keamanan laut; dan
 - 3) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sedangkan Tema Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yaitu:

TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2024

“MEMPERCEPAT TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”

Gambar 4.1



Sumber : Permen PPN Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan RKP Tahun 2024

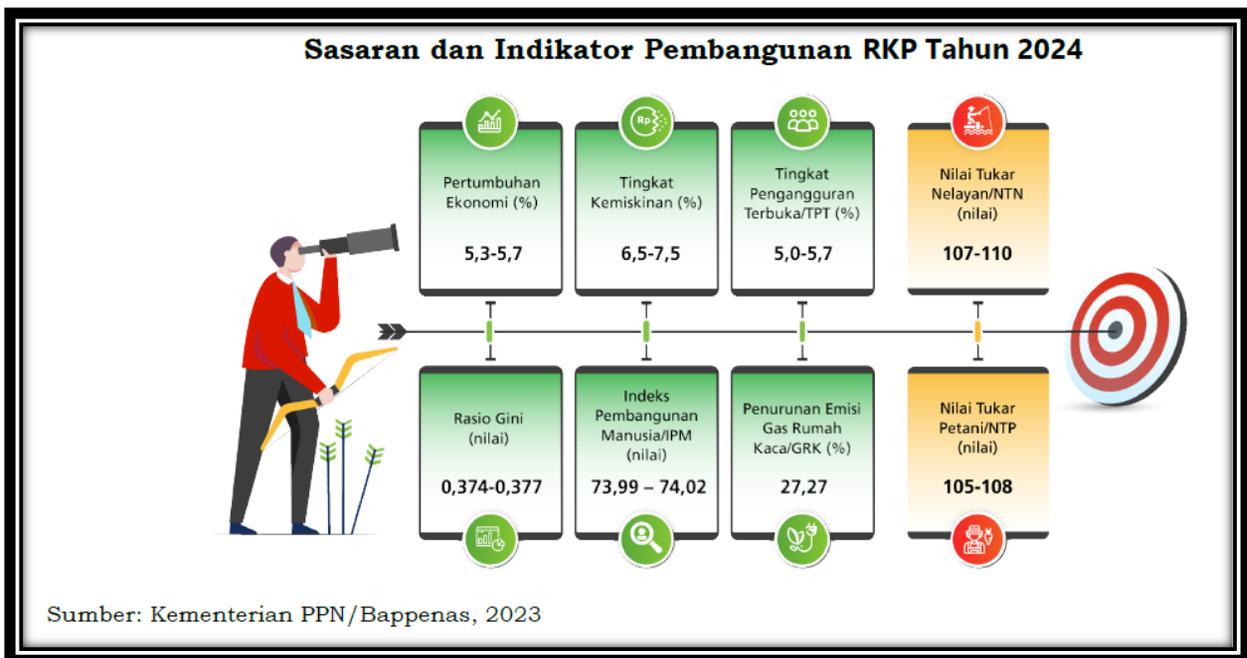
Adapun Arah Kebijakan Nasional dan Target Capaian Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :

Gambar 4.2



Sumber : Permen PPN Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan RKP Tahun 2024

Gambar 4.3



Sumber : Permen PPN Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan RKP Tahun 2024

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Dalam Dokumen RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, Prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat Tahun 2024 merupakan fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan untuk mencapai arah kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, serta isu strategis aktual.

Tema pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah :

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

“MELANJUTKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT”

Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan
3. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur Dasar
4. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

Sedangkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat 2024-2026 adalah sebagai berikut

1. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata.
2. Refotmasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama.
3. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah.
4. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana.
5. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa.
6. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Purwakarta

Prioritas Pembangunan Kabupaten Purwakarta untuk Tahun 2024 merupakan tindaklanjut dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026, yang merupakan penjabaran dari rumusan tujuan, sasaran, strategi, tema pembangunan, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

Adapun Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

” MENINGKATKAN PEMULIHAN EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH”

Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 terdiri dari 8 (delapan) arah kebijakan pokok yang masing – masing dijabarkan menjadi 100 arah kebijakan. Kemudian arah kebijakan pokok tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan setiap tahunnya.

Adapun arah kebijakan pembangunan dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 antara lain :

1. Peningkatan Kualitas SDM

1. Meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar, menengah/ kesetaraan dan PAUD
2. Mengembangkan pengelolaan kurikulum berbasis kearifan lokal
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan
4. Mengembangkan kebudayaan daerah dan kesenian tradisional
5. Mengelola dan melestarikan nilai-nilai sejarah dan aset cagar budaya
6. Meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan
7. Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan serta pelestarian referensi nasional dan naskah kuno
8. Mengembangkan inovasi dalam upaya menumbuhkan minat baca masyarakat
9. Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi tenaga kerja

10. Menciptakan iklim kerja yang harmonis dan berkeadilan
11. Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan dan olahraga
12. Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi para calon transmigran
13. Mengembangkan potensi dan kompetensi bagi seluruh pegawai

2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB

1. Meningkatkan pemenuhan mutu pelayanan kesehatan dan kapasitas tenaga kesehatan
2. Memperluas jaminan kesehatan masyarakat secara merata menuju UHC
3. Menurunkan angka stunting dan AKI-AKB serta penyakit menular lainnya
4. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan
5. Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan pola hidup sehat masyarakat
6. Menerapkan rencana pengendalian penduduk
7. Meningkatkan pelayanan dan akseptor KB
8. Mendorong dan memperluas pembentukan kampung KB disemua wilayah
9. Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan ketahanan keluarga sehat sejahtera

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

1. Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan hidup
2. Menerapkan rencana pembangunan berbasis ramah lingkungan
3. Memperluas penyediaan ruang terbuka hijau
4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan lingkungan serta pengelolaan limbah B3
5. Meningkatkan pengembangan pengelolaan dan pelayanan persampahan
6. Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan masyarakat sadar dan peduli lingkungan
7. Meningkatkan pelayanan penanganan korban bencana dan penyelamatan

8. Mengembangkan sistem peringatan dini dan reformasi kebencanaan
9. Meningkatkan hubungan koordinasi yang harmonis dalam upaya penanganan bencana dengan instansi terkait baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun stakeholder (swasta, Komunitas dan masyarakat)

4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

1. Mendorong pengembangan usaha perkoperasian yang berbasis inovasi dan kemitraan
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas SDM perkoperasian
3. Mengembangkan usaha dan pemasaran produk UMKM berbasis digital dan standar nasional
4. Mendorong dan memfasilitasi pemberian modal usaha
5. Meningkatkan pertumbuhan wira usaha baru UMKM
6. Menyediakan Sistem Data Base UMKM
7. Meningkatkan promosi dan pelayanan perijinan yang cepat dan mudah diakses
8. Menyiapkan peta informasi investasi berdasarkan potensi wilayah dan sektor usaha
9. Menyiapkan sarana dan prasarana pemasaran yang representatif dan strategis
10. Mempermudah perolehan ijin usaha dan perdagangan secara transparan dan tepat waktu
11. Mendorong penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
12. Meningkatkan pengawasan stabilitasi harga kebutuhan barang pokok dan ketersediaannya di pasaran termasuk pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di daerah
13. Meningkatkan upaya standarisasi dan perlindungan konsumen
14. Meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan
15. Meningkatkan akses dan sarana prasarana pariwisata sesuai standar
16. Meningkatkan promosi dan pemberdayaan masyarakat sadar wisata
17. Mendorong pengembangan usaha pariwisata berbasis inovasi dan kemitraan

18. Mendorong pemberdayaan wirausaha mandiri dan ekonomi kreatif masyarakat berbasis wisata
19. Memperkuat ekosistem ekonomi kreatif digital dan perlindungan HAKI
20. Meningkatkan pemenuhan ketersediaan dan cadangan pangan daerah
21. Meningkatkan produksi dan pengawasan hasil pangan dan pertanian
22. Meningkatkan produksi dan pengawasan budidaya hasil perikanan dan peternakan
23. Meningkatkan pembinaan dan perlindungan tanaman pertanian
24. Meningkatkan pembinaan dan perlindungan hewan ternak
25. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang efektif dan merata
26. Meningkatkan pengelolaan pengawasan dan penyediaan ketersediaan bibit dan benih yang bermutu dan berkualitas

5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

1. Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
2. Memperluas perlindungan dan jaminan sosial masyarakat
3. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan ATENSI Penyandang Disabilitas
4. Menyediakan sistem informasi database masyarakat miskin sesuai kriteria penerima manfaat
5. Meningkatkan upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
6. Meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, remaja dan anak

6. Peningkatan Infrastruktur Daerah

1. Meningkatkan kualitas kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan yang merata
2. Mempercepat pembangunan dan peningkatan akses jalan wilayah lingkaran timur dan lingkaran barat

3. Meningkatkan penyediaan dan distribusi sumber daya air dan SPAM yang merata
4. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan pelayanan jasa perhubungan
5. Memperluas penataan lahan parkir yang tertib dan aman
6. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana umum masyarakat
7. Meningkatkan ketaatan penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya
8. Meningkatkan penyediaan rumah layak huni
9. Revitalisasi sistem saluran irigasi jalan dan drainase lingkungan
10. Meningkatkan pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh

7. Reformasi Birokrasi

1. Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah
2. Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi
3. Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4. Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD
5. Meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat berbasis inovasi dan digital
6. Memperluas akses penyediaan data informasi publik yang akurat, aman dan akuntabel
7. Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan tertib administrasi data kependudukan
8. Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
9. Meningkatkan koordinasi percepatan penerapan kebijakan pemerintah pusat dan daerah secara efektif dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah terkait
10. Meningkatkan pengelolaan proses pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien serta mendorong penggunaan produk dalam negeri

11. Meningkatkan pengelolaan arsip yang tertib dan berbasis elektronik/digital
12. Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, konsisten, selaras dan berkelanjutan
13. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berbasis perencanaan terintegrasi yang efektif, efisien dan tepat sasaran
14. Mengoptimalkan pengelolaan aset barang milik daerah secara tertib dan efektif
15. Mengoptimalkan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah
16. Meningkatkan penerapan kajian dan inovasi daerah yang tepat guna
17. Meningkatkan pengelolaan administrasi dan kepegawaian secara profesional
18. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan
19. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa
20. Meningkatkan kapasitas dan integritas APIP
21. Mendorong penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang taat aturan, bersih, dan berintegritas

8. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
2. Meningkatkan pembinaan administrasi dan kapasitas aparatur pemerintahan desa
3. Mendorong pengembangan BUMDesa berbasis inovasi dan kemitraan
4. Meningkatkan soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat
5. Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
6. Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi pancasila

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemajuan kebudayaan daerah
2. Peningkatan kualitas mutu pelayanan, akses pelayanan, dan sarana/prasarana bidang Kesehatan dan KB
3. Reformasi sistem ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup
4. Penguatan sosial ekonomi masyarakat melalui terobosan inovasi
5. Penyediaan infrastruktur dan konektivitas wilayah secara merata
6. Efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara maju dan modern
7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak

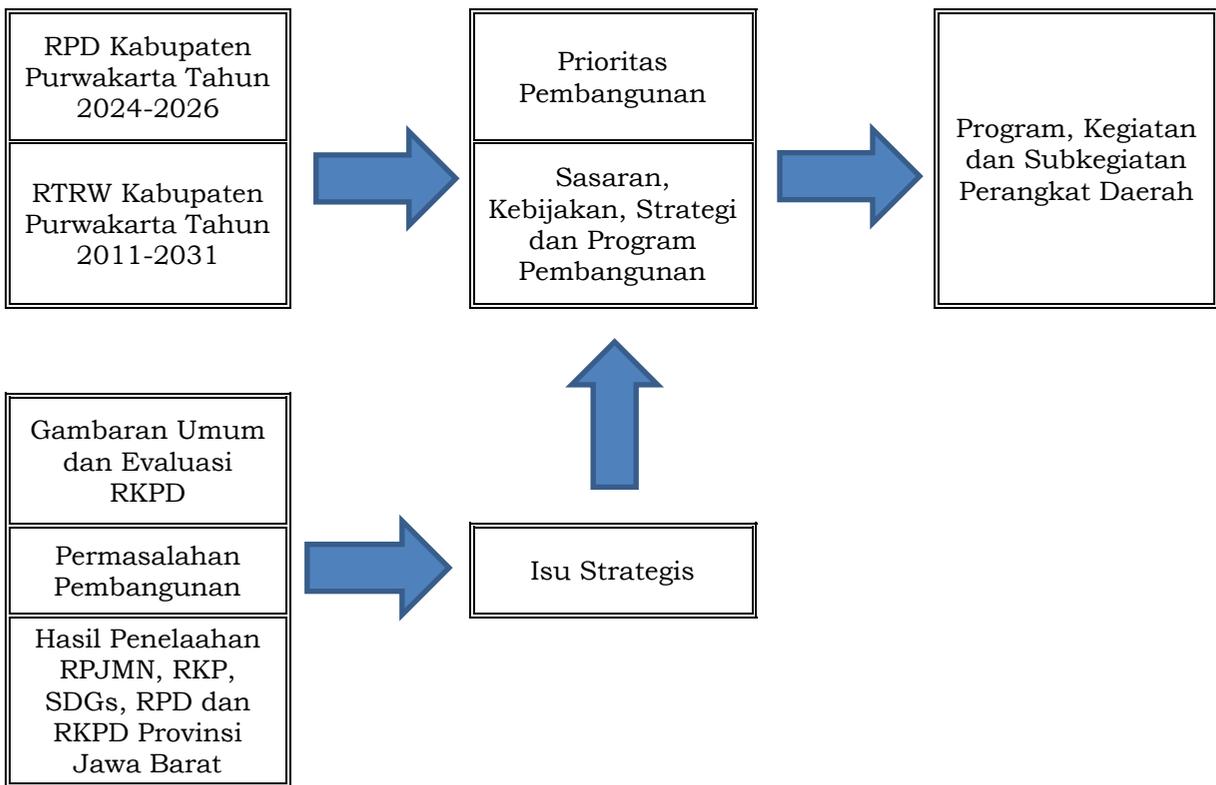
Dalam merespon permasalahan pembangunan yang menjadi isu strategis yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, maka berdasarkan tema pembangunan dan arah kebijakan yang telah dirumuskan diatas, Prioritas Pembangunan daerah Kab. Purwakarta Tahun 2024 – 2026 yaitu :

1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan
2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
4. Pengembangan Koperasi dan UMKM
5. Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan
6. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat
7. Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan
8. Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah
10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
11. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
12. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa kerangka pikir perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 4.2

Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah



Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda, Tahun 2024

Dalam penyusunan dokumen RKPD telah memperhatikan poin-poin ringkasan dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kab. Purwakarta yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3

Keselarasan Pokok-pokok Pikiran DPRD dengan Prioritas Pembangunan Kab. Purwakarta Tahun 2024

| POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD | PRIORITAS PEMBANGUNAN |
|--|--|
| 1 | 2 |
| a. Pokir : Perbaikan Jalan Kabupaten b. Pokir : Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan/Perkotaan c. Pokir : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni d. Pokir : Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Penunjang Hunian (Jalan Lingkungan Perkotaan, Jalan Lingkungan Sekolah, Drainase, TPT, Sanitasi) | 9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah |

Penyusunan dokumen RKPD juga telah memperhatikan keselarasan kebijakan pembangunan antar dokumen perencanaan baik pada tingkat Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Purwakarta, sebagaimana tertuang dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 4.4

Keselarasan Sasaran Pokok RPJPD Kab. Purwakarta Tahun 2005-2025 dengan RPD Kab. Purwakarta Tahun 2024-2026

| SASARAN POKOK RPJPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2005 - 2025 | SASARAN RPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berdaya Saing | 1. Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 2. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat |
| 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | 3. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| 3. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana | 4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup |
| | 5. Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana |
| 4. Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat | 6. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah |
| | 7. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian |
| | 8. Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat |
| | 9. Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 5. Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat | 10. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan |
| | 11. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 6. Meningkatnya Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah | 12. Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah |
| | 13. Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien |
| 7. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel | 14. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE |
| | 15. Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
| 8. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tenram dan Damai | 16. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan |
| | 17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat |

Sumber : RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026

Tabel 4.5

Keselarasan Sasaran RPD Kab. Purwakarta Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Tahun 2020 – 2024

| SASARAN RPJMN TAHUN 2020 - 2024 | SASARAN RPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026 |
|--|---|
| 1 | 2 |
| 1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; | 6. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah |
| | 7. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian |
| | 8. Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat |
| | 9. Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian; | 2. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat |
| | 6. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah |
| | 7. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian |
| | 8. Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat |
| 3. Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera; | 12. Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah |
| | 13. Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien |
| 4. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dan Menguatnya Tata Kelola Kependudukan; | 14. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE |
| 5. Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk; | 10. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan |
| 6. Terpenuhinya Layanan Dasar, Bidang Kesehatan dan Pendidikan; | 1. Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 3. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| 7. Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda; | 11. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 8. Terwujudnya pengentasan kemiskinan; | 10. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan |
| 9. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing; | 2. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat |

| SASARAN RPJMN TAHUN 2020 - 2024 | SASARAN RPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 10. Menguatnya Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memantapkan Ketahanan Budaya; | 17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat |
| 11. Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan; | 1. Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan |
| 12. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Daya Rekat Sosial; | 16. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan |
| | 17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat |
| 13. Menguatnya Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Kerukunan Umat dan Membangun Harmoni Sosial dalam Kehidupan Masyarakat; | 17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat |
| 14. Meningkatnya Ketahanan Keluarga untuk Memperkuat Karakter Bangsa; | 3. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| 15. Meningkatnya Budaya Literasi untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan, Inovatif dan Kreatif; | 1. Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan |
| 16. Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar; | 12. Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah |
| | 13. Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien |
| 17. Meningkatnya Konektivitas Wilayah; | 12. Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah |
| 18. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan; | 12. Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah |
| 19. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien; | 13. Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien |
| 20. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; | 14. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE |
| 21. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; | 4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup |
| 22. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; | 5. Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana |
| 23. Pembangunan Rendah Karbon; | 4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup |
| 24. Konsolidasi Demokrasi; | 17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat |
| 25. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri; | - |
| 26. Penegakan Hukum Nasional yang Mantap; | 17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat |

| SASARAN RPJMN TAHUN 2020 - 2024 | SASARAN RPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 27. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; | 14. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE |
| | 15. Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
| 28. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional; | 17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat |

Sumber : RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026

Tabel 4.6

Keselarasan Sasaran RPD Kabupaten Purwakarta dengan dan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

| SASARAN RPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024 - 2026 | SASARAN RPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus | 1. Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat | 3. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| 3. Meningkatnya standar hidup layak masyarakat | 10. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan |
| | 6. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah |
| 4. Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak serta ketahanan keluarga | 11. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 5. Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk | 2. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat |
| 6. Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan | 7. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian |
| 7. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan | 9. Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 8. Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif | 8. Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat |
| 9. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha | 7. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian |
| 10. Terkendalinya tingkat kemiskinan | 10. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan |
| 11. Meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja | 1. Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan |
| 12. Meningkatnya ketahanan pangan daerah | 9. Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan |

| SASARAN RPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024 - 2026 | SASARAN RPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 13. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah | 4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup |
| | 5. Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana |
| 14. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan | 12. Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah |
| | 13. Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien |
| 15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup |
| 16. Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien | 14. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE |
| | 16. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan |
| | 17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat |
| 17. Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera | 15. Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
| 18. Terwujudnya pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi, dan akuntabel | 14. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE |
| 19. Terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas | 14. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE |
| 20. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan | 15. Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |

Sumber : RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026

Tabel 4.7

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kab. Purwakarta dengan Prioritas Nasional Tahun 2024

| PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS KABUPATEN PURWAKARTA |
|--|---|
| 1 | 2 |
| 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 4. Pengembangan Koperasi dan UMKM |
| | 5. Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan |
| | 6. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat |
| | 7. Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| | 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik |
| 2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | 9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah |
| 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan |
| | 2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB |
| | 8. Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan |
| | 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik |
| | 11. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| | 12. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat |
| 5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | 9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah |
| | 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik |
| 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim | 3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana |
| 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik |
| | 12. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat |

Sumber : Hasil Analisa Bappelitbangda, 2024

Tabel 4.8

Keselarasan Arah Kebijakan dan Indikator Sasaran RKP Nasional dengan RKPD Kab. Purwakarta Tahun 2024

| ARAH KEBIJAKAN NASIONAL | INDIKATOR SASARAN | ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN PURWAKARTA | INDIKATOR SASARAN |
|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem | a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%; b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%. | 5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat | a. Angka Kemiskinan; 7,25 Persen b. Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan; 0,306 Poin c. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Juta); 12,636 Rp. |
| 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan | a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%; b. Insidensi tuberkulosis: 190 per 100.000 penduduk; c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 405 kab/kota; d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kab/kota; e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 c) Sains 402. | 1. Peningkatan Kualitas SDM | a. Indek Pembangunan Manusia; 72,99 Poin b. Rata-Rata Lama Sekolah; 9,23 Tahun c. Angka Harapan Lama Sekolah; 13,85 Tahun d. Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan; 60 Persen |
| | | 2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB | a. Angka Harapan Hidup; 72,01 Tahun b. Laju pertumbuhan penduduk (LPP); 1,5 Persen |
| 3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan | a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%; b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5%- 20,6% per Target RPJMN 21,0%. | 4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah | a. Inflasi; 1,34 Persen b. Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta); 82,771 Rp. c. Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB (Trilyun); 56,08 Rp. d. Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun); 93,32 Rp. |
| 4. Penguatan Daya Saing Usaha | a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%; b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38-13,0 miliar. | | |
| 5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi | a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%; b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 17% | 3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana | a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota; 67,49 Poin |

| ARAH KEBIJAKAN NASIONAL | INDIKATOR SASARAN | ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN PURWAKARTA | INDIKATOR SASARAN |
|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas | <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten-kota: 95%/75%/65%; b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman; c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%; d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86% akses layak termasuk 12 % akses aman; e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 11 lokasi; f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita. | 6. Peningkatan Infrastruktur Daerah | <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota; 85 Persen b. Cakupan Layanan Air Bersih; 81 Persen c. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas d. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota; 100 Persen e. Cakupan Layanan Air Limbah Domestik; 89 Persen f. Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik; 37,6 Persen |
| 7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara | <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden: 100%; b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100%; c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM: 100%. | - | - |
| 8. Pelaksanaan Pemilu 2024 | <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker. | 8. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> a. Indeks Desa Membangun; Maju Predikat b. Indeks Kerukunan Umat Beragama; 77,95 Persen |
| - | - | 7. Reformasi Birokrasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Nilai SAKIP Kabupaten; 69,64 Poin b. Indeks Kepuasan Masyarakat; Baik Predikat c. Indeks Reformasi Birokrasi; 67,41 Poin |

| ARAH KEBIJAKAN NASIONAL | INDIKATOR SASARAN | ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN PURWAKARTA | INDIKATOR SASARAN |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | d. Indeks SPBE; 2,6 Poin e. Indeks Profesionalitas ASN; Sangat Rendah Predikat f. Sistem Merit Kabupaten; Baik Predikat g. Nilai LPPD Kabupaten; 3,5 Poin h. Opini BPK terhadap laporan keuangan; WTP Opini i. Indeks Kemandirian Fiskal; 0,228 Poin j. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah; 82,45 Poin k. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 3 Level l. Indeks Inovasi Daerah; 50,62 Nilai |

Sumber : Hasil Analisa Bappelitbangda, 2024

Tabel 4.9

Keselarasan Indikator Sasaran Nasional dengan Indikator Sasaran Daerah Kab. Purwakarta Tahun 2024

| NO. | INDIKATOR SASARAN NASIONAL | INDIKATOR SASARAN DAERAH |
|-----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional (%) | - |
| 2 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (nilai) | Skor Pola Pangan Harapan |
| 3 | Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan (WPP) | Skor Pola Pangan Harapan |
| 4 | Rasio kewirausahaan nasional (%) | Pertumbuhan UMKM |
| 5 | Pertumbuhan PDB pertanian (%)d) | Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB |
| 6 | Pertumbuhan PDB perikanan (%) | Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta) |
| 7 | Pertumbuhan PDB industri pengolahan (9.2.1)a) (%) | Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB (Trilyun) |
| 8 | Kontribusi PDB industri pengolahan (9.2.1)a) (%) | Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB (Trilyun) |
| 9 | Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c))a) (miliar US\$) | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD |
| 10 | Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1)a) (%) | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD |

| NO. | INDIKATOR SASARAN NASIONAL | INDIKATOR SASARAN DAERAH |
|-----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 11 | Penyediaan lapangan kerja per tahun (juta orang)c) | Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka Pengangguran |
| 12 | Pertumbuhan investasi (PMTB) (%) | Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun) |
| 13 | Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%) | Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB (Trilyun) |
| 14 | Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%) | Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB (Trilyun) |
| 15 | Tingkat inflasi umum (%) | Inflasi |
| 16 | Rasio perpajakan terhadap PDB (17.1.1)a) (%) | Indeks Kemandirian Fiskal |
| 17 | Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI (%/tahun) | Pertumbuhan Ekonomi |
| 18 | IPM KTI (nilai min-maks) | Indek Pembangunan Manusia |
| 19 | Persentase penduduk miskin KTI (%) | Angka Kemiskinan |
| 20 | Laju pertumbuhan PDRB KBI (%/tahun) | Pertumbuhan Ekonomi |
| 21 | IPM KBI (nilai min-maks) | Indek Pembangunan Manusia |
| 22 | Persentase penduduk miskin KBI (%) | Angka Kemiskinan |
| 23 | Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) (per wanita usia subur usia 15-49 tahun) | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) |
| 24 | Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%) | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) |
| 25 | Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial (%): a. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%) b. Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%) | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) |
| 26 | Tingkat kemiskinan ekstrem (%) | Angka Kemiskinan |
| 27 | Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) | Angka Harapan Hidup |
| 28 | Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup) | Angka Harapan Hidup |
| 29 | Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%) | Angka Harapan Hidup |
| 30 | Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | Angka Harapan Hidup |
| 31 | Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (%) | Angka Harapan Hidup |
| 32 | Insidensi <i>tuberkulosis</i> (per 100.000 penduduk) | Angka Harapan Hidup |
| 33 | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota) | Angka Harapan Hidup |
| 34 | Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta (kabupaten/kota) | Angka Harapan Hidup |
| 35 | Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%) | Angka Harapan Hidup |
| 36 | Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%) | Angka Harapan Hidup |

| NO. | INDIKATOR SASARAN NASIONAL | INDIKATOR SASARAN DAERAH |
|-----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 37 | Nilai rata-rata hasil PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains | Indek Pembangunan Manusia |
| 38 | Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun) | Rata-Rata Lama Sekolah |
| 39 | Harapan lama sekolah (tahun) | Angka Harapan Lama Sekolah |
| 40 | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | |
| 41 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks Pembangunan Gender (IPG) |
| 42 | Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) | Persentase Pemuda Berprestasi |
| 43 | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (%) | Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan |
| 44 | Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%) | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) |
| 45 | Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%) | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) |
| 46 | Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>world class university</i> (PT): a. Top 200 b. Top 300 c. Top 500 | Indek Pembangunan Manusia |
| 47 | Peringkat <i>Global Innovation Index</i> | Indeks Inovasi Daerah |
| 48 | Peringkat pada Olympic Games | Persentase Pemuda Berprestasi |
| 49 | Peringkat pada Paralympic Games | Persentase Pemuda Berprestasi |
| 50 | Indeks Capaian Revolusi Mental (nilai) | Indeks Reformasi Birokrasi |
| 51 | Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila (nilai) | Indeks Kerukunan Umat Beragama |
| 52 | Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai) | Indeks Kerukunan Umat Beragama |
| 53 | Indeks Pembangunan Masyarakat (nilai) | Indeks Desa Membangun |
| 54 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai) | Indeks Kerukunan Umat Beragama |
| 55 | Indeks Pembangunan Keluarga (nilai) | Indek Pembangunan Manusia |
| 56 | Median Usia Kawin Pertama Perempuan (tahun) | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) |
| 57 | Nilai Budaya Literasi (nilai) | Indek Pembangunan Manusia |
| 58 | Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%) | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota |
| 59 | Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%) | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota |
| 60 | Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif, %) | Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik |
| 61 | Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif, %) | Cakupan Layanan Air Bersih |
| 62 | Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 km) | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota |
| 63 | Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (<i>loop</i>) (%) | - |
| 64 | Kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) kategori 1 dan 2 (%) | - |
| 65 | Persentase capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) transportasi udara (%) | - |

| NO. | INDIKATOR SASARAN NASIONAL | INDIKATOR SASARAN DAERAH |
|-----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 66 | Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) | - |
| 67 | Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan (%) | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota |
| 68 | Rasio elektrifikasi (%) | - |
| 69 | Rata-rata pemenuhan kebutuhan (Konsumsi) listrik (kWh/Kapita) | - |
| 70 | Penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton) | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota |
| 71 | Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) (%) | - |
| 72 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (nilai) | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota |
| 73 | Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (%) | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) |
| 74 | Persentase penurunan emisi GRK (%) : a. Kumulatif b. Tahunan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota |
| 75 | Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%) | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota |
| 76 | Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)1) (nilai) | Indeks Kerukunan Umat Beragama |
| 77 | Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah2) (%) | Indeks Kepuasan Masyarakat |
| 78 | Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional3) (nilai) | - |
| 79 | Indeks Pembangunan Hukum (nilai) | Indeks Reformasi Birokrasi |
| 80 | Indeks Pelayanan Publik (nilai)4) | Indeks Kepuasan Masyarakat |
| 81 | Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya (%)5) | - |

Sumber : Hasil Analisa Bappelitbangda, 2024

Guna mendukung pencapaian target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan agar lebih efektif dan efisien khususnya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat agar lebih mudah, cepat dan terjangkau, maka diperlukan terobosan atau inovasi daerah guna mewujudkan pelayanan publik yang prima, cepat dan modern sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja pembangunan daerah. Adapun terobosan atau inovasi daerah dalam rangka penyediaan pelayanan publik pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 4.10

Rekap Inovasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Urusan Pemerintahan di Kabupaten Purwakarta

| No | Nama Inovasi | Perangkat Daerah yang bertanggungjawab | Tahun Penerapan/Pembaruan |
|-----|--|--|---------------------------|
| 1. | Mitra TB (Tim jejaring layanan Tuberkolosis dengan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta) | Dinas Kesehatan | 2021 |
| 2. | Mas Bunting (Optimalisasi kelas ibu untuk turunkan stunting) | Dinas Kesehatan (Puskesmas Purwakarta) | 2021 |
| 3. | Keju Cedar (Kader Juara, Cerdas, Aktif dan Responsif) | Dinas Kesehatan (Puskesmas Sukatani) | 2021 |
| 4. | Bale Sauyunan (Integrasi berbagai kegiatan dalam satu wadah) | Dinas Kesehatan | 2022 |
| 5. | Kebon Ambu (Kawasan percontohan pertanian terpadu untuk para penyuluh pertanian dan kelompok petani dengan edukasi dan agrowisata) | Dinas Pangan dan Pertanian | 2021 |
| 6. | Sadapur (Satu Data Purwakarta) | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2021 |
| 7. | Mepeling Mepende Ceu Ati (Metrologi Pelayanan Keliling dan Metrologi Pelayanan Desa Cek Ukuran Akurasi Timbangan) | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian | 2021 |
| 8. | Simdag (Sistem Informasi Perdagangan) | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian | 2022 |
| 9. | Edacil (Edukasi Pemadam Cilik) | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 2021 |
| 10. | RedKar (Relawan Pemadam Kebakaran) | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 2022 |
| 11. | Website BPBD Purwakarta | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2022 |
| 12. | Cekatan (Cek Kesehatan Ternak dan Hewan) | Dinas Perikanan dan Peternakan | 2022 |
| 13. | Sikasep (Sistem Informasi Kepemudaan yang Aktual, Sinergis, Edukatif dan Produktif) | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | 2021 |
| 14. | Dimata (Digital Market Purwakarta) | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | 2021 |
| 15. | Digital Signage (Media informasi dan promosi destinasi wisata melalui online) | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | 2021 |
| 16. | Idola (Informasi dokumen lingkungan) | Dinas Lingkungan Hidup | 2023 |
| 17. | Si Saham (Sistem Informasi Suara Hati Masyarakat/e-Pokir) | Sekretariat DPRD | 2022 |

| No | Nama Inovasi | Perangkat Daerah yang bertanggungjawab | Tahun Penerapan/Pembaruan |
|-----|--|--|---------------------------|
| 18. | Gerakan Ambu (Gerakan Anak Membaca Buku) | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 2021 |
| 19. | Galendo (Gerakan Literasi Masyarakat Peduli Naskah Kuno) | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 2021 |
| 20. | Lipperpul (Lima Program Perpustakaan unggulan) | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 2021 |
| 21. | Siceupol (Sistem Informasi Cek PBB Online) | Badan Pendapatan Daerah | 2022 |
| 22. | Disepedah (Dashboard Informasi Seputar Pendapatan Daerah) | Badan Pendapatan Daerah | 2022 |
| 23. | E-BPHTB (Elektronik Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan) | Badan Pendapatan Daerah | 2022 |
| 24. | Madukara (Manajemen Pelayanan Terpadu Purwakarta Istimewa) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2022 |
| 25. | Silapak Prestasi (Pelayanan Proaktif Promosi Investasi dan Inovasi Pelayanan Publik) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2022 |
| 26. | Japati Bodas (Jasa antar cepat izin, bebas ongkir dan aman sampai tujuan) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2022 |
| 27. | Gerakan "Ulin Ka Mal" (Urus Langsung Izin & Non Izin Ka Mal Pelayanan Publik) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2022 |
| 28. | Gardu Pasti (Pengaduan Terpadu Perizinan dan Investasi) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2022 |
| 29. | Gerai Pelayanan Publik Teras Madukara | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2022 |
| 30. | Hallo Pehape Online (Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan melalui Pengaduan Online dan Call Center) | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2021 |
| 31. | Si Pelaku (Sistem Pelaporan Keuangan) | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2022 |
| 32. | Siyansos (Sistem Informasi Pelayanan Sosial) | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2022 |
| 33. | Gempungan Ngariung di buruan urang lembur | Sekretaris Daerah | 2022 |
| 34. | Ambu Keren (Sistem Aplikasi untuk mempermudah pelayanan dan edukasi kepada calon akseptor mengenai informasi keluarga berencana, pengendalian penduduk dan ketahanan keluarga) | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2021 |
| 35. | Sipila (Sistem Informasi Pendaftaran Terintegrasi Layanan Adminduk) | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2022 |
| 36. | Silpy (Sistem Informasi Loker) | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2022 |

| No | Nama Inovasi | Perangkat Daerah yang bertanggungjawab | Tahun Penerapan/Pembaruan |
|-----|---|---|---------------------------|
| 37. | Sikepo (Sebarikan Informasi Kependudukan Online) | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2022 |
| 38. | DC Prokila (Dashboard Center Progress Kinerja Layanan Administrasi Kependudukan) | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2022 |
| 39. | Ceria (Cetak Rekam KIA di Sekolah) | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2021 |
| 40. | Disdukcapil Goes To School (Perekaman KTP El) | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2022 |
| 41. | Sijempol (Perekaman KTP el bagi sakit, lansia, ODGJ dan disabilitas) | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2021 |
| 42. | Lampu Umat (Pelayanan Jemput Bola di Hari Jum'at) | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2022 |
| 43. | PERKIMSERU (Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman dan Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum). | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2022 |

Sumber : Keputusan Bupati Purwakarta No. 050/Kep.431-Bappelitbangda/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Inovasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Penerapan 2021, 2022 dan 2023

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 yang dituangkan dalam Bab V ini, merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi yang telah diuraikan pada Bab II sampai dengan Bab IV tersebut diatas. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk uraian rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026.

Mengenai penyajian Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah yang digunakan dalam Bab V ini adalah mengacu kepada:

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Uraian rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang disajikan dalam Bab V ini hanya memuat rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang didanai oleh APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar; Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar; Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang, Unsur Pendukung, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari 6 (Enam) Bidang Urusan Pemerintahan yang meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari 18 (Delapan Belas) Bidang Urusan Pemerintahan yang meliputi :

1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan Hidup;
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan Informatika;
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. Penanaman Modal;
13. Kepemudaan dan Olahraga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan;

18. Kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri dari 6 (Enam) Bidang Urusan Pemerintahan yang meliputi :

1. Pariwisata;
2. Pertanian;
3. Perdagangan;
4. Perindustrian;
5. Transmigrasi;
6. Kelautan dan Perikanan.

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) Unsur yang meliputi :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari 6 (enam) Unsur yang meliputi :

1. Perencanaan;
2. Keuangan;
3. Kepegawaian;
4. Pendidikan dan Pelatihan;
5. Penelitian dan Pengembangan;
6. Pengelolaan Perbatasan

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan terdiri dari 1 (satu) Unsur yang meliputi :

1. Inspektorat;

Unsur Kewilayahan terdiri dari 1 (satu) Unsur yang meliputi :

1. Kecamatan;

Unsur Pemerintahan Umum terdiri dari 1 (satu) Unsur yang meliputi :

1. Kesatuan Bangsa dan Politik;

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, telah mengakomodir kebutuhan pembiayaan operasional pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan pada semua Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan bidang urusan pemerintahan yang diampunya masing-masing.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah menetapkan program-program pembangunan untuk melaksanakan kegiatan dan subkegiatan yang menunjang dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran I tentang matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Program Pembangunan pada Perangkat Daerah Tahun 2024 berdasarkan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 terdiri dari :

A. PROGRAM PADA SEMUA PERANGKAT DAERAH

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

B. PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH

1. DINAS PENDIDIKAN

Program Teknis Urusan Pendidikan

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan
- 2) Program Pengembangan Kurikulum
- 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- 4) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
- 5) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

2. DINAS KESEHATAN

Program Teknis Urusan Kesehatan

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

3. RSUD BAYU ASIH

Program Teknis Urusan Kesehatan

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Program Teknis Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- 3) Program Penataan Bangunan Gedung
- 4) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- 5) Program Penyelenggaraan Jalan
- 6) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- 7) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Teknis Urusan Pertanahan

- 1) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- 2) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
- 3) Program Pengelolaan Tanah Kosong

5. DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Program Teknis Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- 4) Program Pengembangan Permukiman

Program Teknis Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Program Pengembangan Perumahan
- 2) Program Kawasan Permukiman
- 3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

6. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program Teknis Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program Teknis Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- 1) Program Penanggulangan Bencana

8. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Program Teknis Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- 1) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

9. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program Teknis Urusan Sosial

- 1) Program Pemberdayaan Sosial
- 2) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- 3) Program Rehabilitasi Sosial
- 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 5) Program Penanganan Bencana
- 6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program Teknis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 2) Program Perlindungan Perempuan
- 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- 5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 6) Program Perlindungan Khusus Anak

10. DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Program Teknis Urusan Ketenagakerjaan

- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 2) Program Penempatan Tenaga Kerja
- 3) Program Hubungan Industrial

Program Teknis Urusan Transmigrasi

- 1) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
- 2) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- 3) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

11. DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Program Teknis Urusan Pangan

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

- 2) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 3) Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 4) Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program Teknis Urusan Pertanian

- 1) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 3) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- 4) Program Perizinan Usaha Pertanian
- 5) Program Penyuluhan Pertanian

12. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program Teknis Urusan Lingkungan Hidup

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- 6) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
- 7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 8) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 9) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- 10) Program Pengelolaan Persampahan

13. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program Teknis Urusan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- 1) Program Pendaftaran Penduduk
- 2) Program Pencatatan Sipil
- 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- 4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan

14. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program Teknis Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- 1) Program Penataan Desa
- 2) Program Peningkatan Kerjasama Desa
- 3) Program Administrasi Pemerintahan Desa
- 4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

15. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program Teknis Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

- 1) Program Pengendalian Penduduk
- 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- 3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

16. DINAS PERHUBUNGAN

Program Teknis Urusan Perhubungan

- 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 2) Program Pengelolaan Pelayaran

17. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program Teknis Urusan Komunikasi Dan Informatika

- 1) Program Informasi dan Komunikasi Publik
- 2) Program Aplikasi Informatika

Program Teknis Urusan Statistik

- 1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Teknis Urusan Persandian

- 1) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

18. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Program Teknis Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah

- 1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- 2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- 3) Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi
- 4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- 5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- 6) Program Pengembangan UMKM

Program Teknis Urusan Perdagangan

- 1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- 3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- 4) Program Pengembangan Ekspor
- 5) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- 6) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program Teknis Urusan Perindustrian

- 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
- 3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

19. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Program Teknis Urusan Penanaman Modal

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- 2) Program Promosi Penanaman Modal
- 3) Program Pelayanan Penanaman Modal
- 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

20. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Program Teknis Urusan Kepemudaan, dan Olahraga

- 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- 3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program Teknis Urusan Kebudayaan

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan
- 2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- 3) Program Pembinaan Sejarah
- 4) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- 5) Program Pengelolaan Permuseuman

Program Teknis Urusan Pariwisata

- 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 2) Program Pemasaran Pariwisata
- 3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- 4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

21. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Program Teknis Urusan Perpustakaan

- 1) Program Pembinaan Perpustakaan
- 2) Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

Program Teknis Urusan Kearsipan

- 1) Program Pengelolaan Arsip
- 2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

22. DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Program Teknis Urusan Kelautan dan Perikanan

- 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- 3) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

- 4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Teknis Urusan Pertanian

- 1) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 2) Program Penyuluhan Pertanian
- 3) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 4) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

23. SEKRETARIAT DAERAH

Program Teknis Unsur Pendukung Urusan Sekretariat Daerah

- 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 2) Program Perekonomian dan Pembangunan

Program Teknis Unsur Penunjang Urusan Pengelolaan Perbatasan

- 1) Program Pengelolaan Perbatasan

24. SEKRETARIAT DPRD

Program Teknis Unsur Pendukung Urusan Sekretariat DPRD

- 1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

25. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Program Teknis Unsur Penunjang Urusan Perencanaan

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Teknis Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan

- 1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

26. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program Teknis Unsur Penunjang Urusan Keuangan

- 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

27. BADAN PENDAPATAN DAERAH

Program Teknis Unsur Penunjang Urusan Keuangan

- 1) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

28. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Program Teknis Urusan Kepegawaian

- 1) Program Kepegawaian Daerah

Program Teknis Urusan Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

29. INSPEKTORAT

Program Teknis Unsur Pengawas

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

30. KECAMATAN JATILUHUR

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

31. KECAMATAN SUKASARI

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

32. KECAMATAN MANIIS

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

33. KECAMATAN TEGALWARU

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

34. KECAMATAN PLERED

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

35. KECAMATAN SUKATANI

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

36. KECAMATAN DARANGDAN

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

37. KECAMATAN BOJONG

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

38. KECAMATAN WANAYASA

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

39. KECAMATAN KIARAPEDES

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

40. KECAMATAN PASAWAHAN

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

41. KECAMATAN PONDOKSALAM

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

42. KECAMATAN PURWAKARTA

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

43. KECAMATAN BABAKANCIKAO

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

44. KECAMATAN CAMPAKA

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

45. KECAMATAN CIBATU

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

46. KECAMATAN BUNGURSARI

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

47. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program Teknis Unsur Pemerintahan Umum

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Selengkapnya mengenai Jumlah Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1

Jumlah Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pagu Anggaran pada Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

| No | Perangkat Daerah | RKPD 2024 | | | | APBD 2024 | | | | PERUBAHAN RKPD 2024 | | | | SELISIH RKPD - PERUBAHAN RKPD 2024 | | | |
|----|---|-----------|----------|-------------|-----------------|-----------|----------|-------------|-----------------|---------------------|----------|-------------|-----------------|------------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| | | Program | Kegiatan | Subkegiatan | Pagu Anggaran | Program | Kegiatan | Subkegiatan | Pagu Anggaran | Program | Kegiatan | Subkegiatan | Pagu Anggaran | Program | Kegiatan | Subkegiatan | Pagu Anggaran |
| 1 | Dinas Pendidikan | 6 | 18 | 106 | 679.159.956.234 | 6 | 18 | 117 | 695.386.981.859 | 6 | 18 | 122 | 739.104.181.782 | 0 | 0 | 16 | 59.944.225.548 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 5 | 23 | 110 | 207.133.828.294 | 5 | 25 | 115 | 210.854.818.328 | 5 | 25 | 115 | 248.629.073.189 | 0 | 2 | 5 | 41.495.244.895 |
| 3 | Rumah Sakit Bayu Asih | 4 | 16 | 57 | 209.374.458.648 | 4 | 16 | 57 | 204.061.620.297 | 4 | 16 | 57 | 210.617.192.829 | 0 | 0 | 0 | 1.242.734.181 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 11 | 24 | 110 | 196.926.512.236 | 11 | 24 | 117 | 174.465.176.236 | 11 | 24 | 118 | 170.765.176.236 | 0 | 0 | 8 | -26.161.336.000 |
| 5 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 8 | 16 | 77 | 80.164.774.892 | 8 | 16 | 77 | 88.582.728.892 | 8 | 16 | 77 | 107.160.618.613 | 0 | 0 | 0 | 26.995.843.721 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja | 2 | 10 | 57 | 20.165.673.187 | 2 | 10 | 53 | 22.946.468.066 | 2 | 10 | 53 | 22.810.298.930 | 0 | 0 | -4 | 2.644.625.743 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2 | 12 | 70 | 6.223.973.206 | 2 | 12 | 78 | 6.268.138.206 | 2 | 12 | 78 | 6.994.821.534 | 0 | 0 | 8 | 770.848.328 |
| 8 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 2 | 13 | 76 | 15.186.494.622 | 2 | 13 | 76 | 16.553.950.844 | 2 | 13 | 76 | 17.029.030.163 | 0 | 0 | 0 | 1.842.535.541 |
| 9 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 13 | 29 | 80 | 10.456.274.986 | 13 | 29 | 80 | 11.431.774.351 | 13 | 29 | 81 | 11.274.061.049 | 0 | 0 | 1 | 817.786.063 |
| 10 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | 7 | 20 | 53 | 12.696.905.340 | 7 | 20 | 53 | 13.467.095.611 | 7 | 20 | 53 | 12.973.758.479 | 0 | 0 | 0 | 276.853.139 |
| 11 | Dinas Pangan dan Pertanian | 10 | 21 | 77 | 21.410.467.828 | 10 | 21 | 77 | 28.237.193.717 | 10 | 21 | 78 | 27.619.352.279 | 0 | 0 | 1 | 6.208.884.451 |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup | 11 | 24 | 80 | 40.580.305.302 | 11 | 24 | 80 | 44.195.953.321 | 11 | 24 | 80 | 44.121.842.486 | 0 | 0 | 0 | 3.541.537.184 |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5 | 14 | 29 | 18.422.960.689 | 5 | 14 | 29 | 18.347.960.689 | 5 | 15 | 31 | 19.577.819.457 | 0 | 1 | 2 | 1.154.858.768 |
| 14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 5 | 12 | 67 | 21.659.426.756 | 5 | 12 | 67 | 20.292.519.871 | 5 | 12 | 67 | 22.050.800.995 | 0 | 0 | 0 | 391.374.239 |
| 15 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 4 | 15 | 45 | 22.655.262.469 | 4 | 15 | 45 | 23.266.501.469 | 4 | 15 | 45 | 22.153.108.231 | 0 | 0 | 0 | -502.154.238 |
| 16 | Dinas Perhubungan | 3 | 21 | 73 | 21.908.385.684 | 3 | 21 | 74 | 43.062.873.684 | 3 | 21 | 75 | 47.729.534.447 | 0 | 0 | 2 | 25.821.148.763 |
| 17 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 5 | 15 | 83 | 27.385.482.106 | 5 | 14 | 76 | 26.849.232.106 | 5 | 14 | 76 | 30.292.029.944 | 0 | -1 | -7 | 2.906.547.838 |
| 18 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | 16 | 30 | 71 | 16.929.207.120 | 16 | 30 | 71 | 19.126.886.478 | 16 | 30 | 71 | 19.512.151.484 | 0 | 0 | 0 | 2.582.944.364 |
| 19 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 6 | 14 | 41 | 13.194.823.196 | 6 | 14 | 41 | 14.236.601.361 | 6 | 14 | 41 | 14.378.811.989 | 0 | 0 | 0 | 1.183.988.793 |
| 20 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | 13 | 34 | 142 | 32.809.455.312 | 13 | 34 | 142 | 28.630.705.312 | 13 | 34 | 142 | 28.690.299.527 | 0 | 0 | 0 | -4.119.155.785 |
| 21 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 5 | 16 | 56 | 11.701.069.627 | 5 | 16 | 56 | 12.134.858.286 | 5 | 16 | 56 | 12.519.071.111 | 0 | 0 | 0 | 818.001.484 |
| 22 | Dinas Perikanan dan Peternakan | 9 | 29 | 84 | 16.431.289.263 | 9 | 29 | 82 | 16.771.289.263 | 9 | 29 | 82 | 15.684.333.940 | 0 | 0 | -2 | -746.955.323 |
| 23 | Sekretariat Daerah | 4 | 20 | 81 | 83.152.282.031 | 4 | 21 | 90 | 81.674.043.594 | 4 | 21 | 90 | 80.049.917.694 | 0 | 1 | 9 | -3.102.364.337 |
| 24 | Sekretariat DPRD | 2 | 15 | 44 | 71.700.171.332 | 2 | 16 | 50 | 86.203.465.484 | 2 | 16 | 54 | 79.570.595.484 | 0 | 1 | 10 | 7.870.424.152 |
| 25 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 4 | 18 | 72 | 13.692.741.053 | 4 | 18 | 72 | 15.493.593.427 | 4 | 18 | 72 | 16.406.672.561 | 0 | 0 | 0 | 2.713.931.508 |

| No | Perangkat Daerah | RKPD 2024 | | | | APBD 2024 | | | | PERUBAHAN RKPD 2024 | | | | SELISIH RKPD - PERUBAHAN RKPD 2024 | | | |
|---------------|--|------------|------------|--------------|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------------------|---------------------|------------|--------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|-------------|------------------------|
| | | Program | Kegiatan | Subkegiatan | Pagu Anggaran | Program | Kegiatan | Subkegiatan | Pagu Anggaran | Program | Kegiatan | Subkegiatan | Pagu Anggaran | Program | Kegiatan | Subkegiatan | Pagu Anggaran |
| 26 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 3 | 14 | 71 | 426.466.644.072 | 3 | 14 | 71 | 490.387.358.504 | 3 | 14 | 71 | 456.524.778.327 | 0 | 0 | 0 | 30.058.134.255 |
| 27 | Badan Pendapatan Daerah | 2 | 9 | 56 | 32.862.578.527 | 2 | 9 | 56 | 34.424.748.125 | 2 | 9 | 56 | 36.306.850.436 | 0 | 0 | 0 | 3.444.271.909 |
| 28 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3 | 14 | 65 | 39.833.428.518 | 3 | 14 | 65 | 38.617.529.518 | 3 | 14 | 65 | 35.201.765.892 | 0 | 0 | 0 | -4.631.662.626 |
| 29 | Inspektorat | 3 | 12 | 41 | 30.124.030.316 | 3 | 12 | 41 | 31.335.945.006 | 3 | 12 | 41 | 29.616.639.616 | 0 | 0 | 0 | -507.390.700 |
| 30 | Kecamatan Jatiluhur | 6 | 16 | 40 | 3.485.424.995 | 6 | 16 | 40 | 3.577.340.893 | 6 | 16 | 40 | 3.577.340.893 | 0 | 0 | 0 | 91.915.898 |
| 31 | Kecamatan Sukasari | 6 | 16 | 49 | 3.236.466.067 | 6 | 16 | 49 | 3.441.332.071 | 6 | 16 | 49 | 3.457.935.789 | 0 | 0 | 0 | 221.469.722 |
| 32 | Kecamatan Maniis | 6 | 15 | 37 | 2.987.507.138 | 6 | 15 | 37 | 3.218.289.234 | 6 | 15 | 38 | 3.431.389.234 | 0 | 0 | 1 | 443.882.096 |
| 33 | Kecamatan Tegalwaru | 6 | 15 | 36 | 3.485.424.995 | 6 | 15 | 36 | 3.565.987.728 | 6 | 15 | 36 | 3.353.987.728 | 0 | 0 | 0 | -131.437.267 |
| 34 | Kecamatan Plered | 6 | 15 | 37 | 3.485.424.995 | 6 | 15 | 37 | 3.682.188.442 | 6 | 15 | 39 | 3.805.578.442 | 0 | 0 | 2 | 320.153.447 |
| 35 | Kecamatan Sukatani | 6 | 14 | 34 | 3.983.342.851 | 6 | 14 | 34 | 4.128.546.775 | 6 | 14 | 34 | 3.933.546.775 | 0 | 0 | 0 | -49.796.076 |
| 36 | Kecamatan Darangdan | 6 | 15 | 35 | 3.734.383.923 | 6 | 15 | 35 | 4.296.132.999 | 6 | 15 | 35 | 4.354.038.999 | 0 | 0 | 0 | 619.655.076 |
| 37 | Kecamatan Bojong | 6 | 14 | 37 | 3.734.383.923 | 6 | 14 | 37 | 4.260.383.744 | 6 | 14 | 37 | 4.170.383.744 | 0 | 0 | 0 | 435.999.821 |
| 38 | Kecamatan Wanayasa | 6 | 14 | 39 | 3.734.383.923 | 6 | 14 | 39 | 4.090.618.856 | 6 | 14 | 39 | 4.090.618.856 | 0 | 0 | 0 | 356.234.933 |
| 39 | Kecamatan Kiarapedes | 6 | 11 | 23 | 3.485.424.995 | 6 | 11 | 23 | 3.682.603.115 | 6 | 11 | 23 | 3.682.603.115 | 0 | 0 | 0 | 197.178.120 |
| 40 | Kecamatan Pasawahan | 3 | 8 | 25 | 3.236.466.067 | 3 | 8 | 25 | 3.356.929.910 | 5 | 13 | 31 | 3.442.929.910 | 2 | 5 | 6 | 206.463.843 |
| 41 | Kecamatan Pondoksalam | 6 | 13 | 32 | 3.485.424.995 | 6 | 13 | 32 | 3.633.417.407 | 6 | 13 | 32 | 3.583.417.407 | 0 | 0 | 0 | 97.992.412 |
| 42 | Kecamatan Purwakarta | 6 | 15 | 42 | 22.655.262.469 | 6 | 15 | 42 | 25.286.317.287 | 6 | 15 | 42 | 25.569.021.962 | 0 | 0 | 0 | 2.913.759.493 |
| 43 | Kecamatan Babakancikao | 6 | 12 | 35 | 3.236.466.067 | 6 | 12 | 35 | 3.405.497.915 | 6 | 12 | 35 | 3.562.028.324 | 0 | 0 | 0 | 325.562.257 |
| 44 | Kecamatan Campaka | 6 | 14 | 34 | 3.485.424.995 | 6 | 14 | 34 | 3.573.750.107 | 6 | 14 | 34 | 3.573.750.107 | 0 | 0 | 0 | 88.325.112 |
| 45 | Kecamatan Cibatu | 6 | 12 | 32 | 3.983.342.851 | 6 | 13 | 33 | 4.084.182.803 | 6 | 14 | 34 | 4.321.287.803 | 0 | 2 | 2 | 337.944.952 |
| 46 | Kecamatan Bungursari | 6 | 14 | 31 | 3.236.466.067 | 6 | 14 | 31 | 3.418.969.154 | 6 | 14 | 31 | 3.548.969.154 | 0 | 0 | 0 | 312.503.087 |
| 47 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 6 | 13 | 44 | 10.509.398.223 | 6 | 13 | 44 | 51.578.977.434 | 6 | 13 | 44 | 51.381.227.637 | 0 | 0 | 0 | 40.871.829.414 |
| JUMLAH | | 278 | 774 | 2.716 | 2.489.589.282.385 | 278 | 778 | 2.751 | 2.653.589.477.779 | 280 | 785 | 2.776 | 2.722.204.644.583 | 2 | 11 | 60 | 232.615.362.198 |

Sumber : <https://purwakartakab.sipd-ri.kemendagri.go.id/>

Selanjutnya mengenai Rincian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat Program Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat diakses melalui tautan “ <https://tinyurl.com/bab-v-perubahan-rkpd-pwk-2024> “

BAB VI

P E N U T U P

Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebijakan peraturan perundang-undangan baik dari pusat maupun daerah yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan dan harus diselaraskan dengan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Perubahan RKPD Tahun 2024 dilakukan juga dalam rangka penyesuaian kemampuan riil keuangan daerah berdasarkan realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester 1 tahun 2024 dan proyeksi potensi pendapatan daerah sampai dengan akhir tahun 2024, guna menjamin ketersediaan pagu anggaran dan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah yang dibutuhkan oleh perangkat daerah untuk pelaksanaan pembangunan. Sehingga diharapkan target pembangunan daerah tahun 2024 dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Perubahan RKPD Tahun 2024 memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta menjadi dasar pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Perubahan RKPD Tahun 2024 juga digunakan sebagai rujukan dan acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam menyusun Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024.

Ketercapaian kinerja pembangunan daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sangat tergantung kepada peran serta dari seluruh pemangku kepentingan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat agar senantiasa bahu membahu dan terus bersinergi meningkatkan soliditas, harmonitas dan integritas dalam upaya membangun Kabupaten Purwakarta sehingga pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien dan tepat sasaran demi meningkatkan kemajuan pembangunan daerah dan masyarakat yang sejahtera.

Semoga rencana pembangunan daerah ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta dapat memenuhi harapan dan aspirasi semua pihak.

PJ. BUPATI PURWAKARTA



Benni Irwan

BENNI IRWAN